



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LKPK & LSKP

TAHUN 2023 *UNAUDITED*
Kanwil DJPb Sumsel



GOVERNMENT FINANCE STATISTICS

Tahun 2023 Unaudited

LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

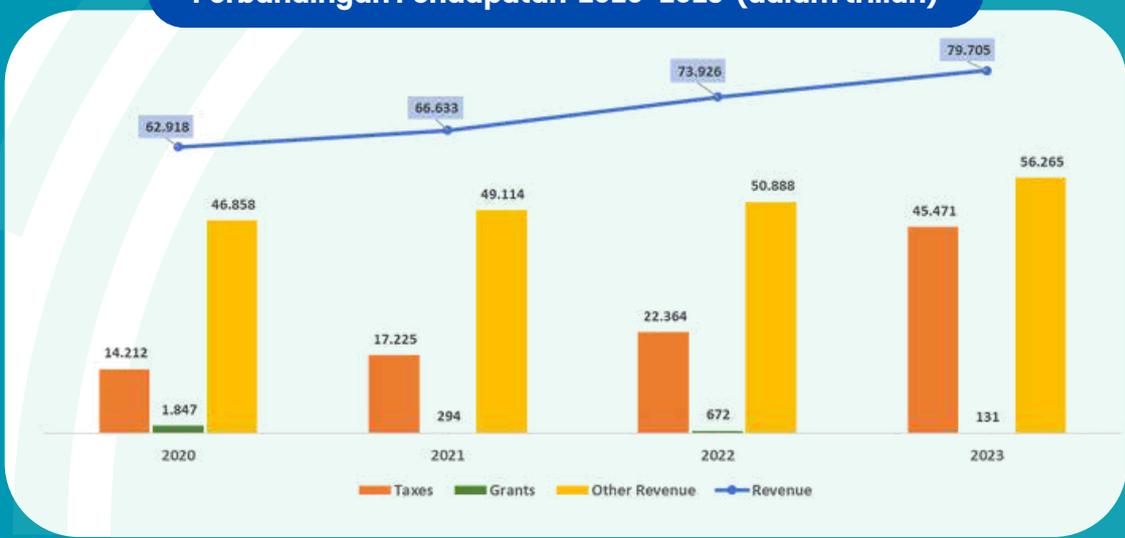
Laporan Operasional Statistik



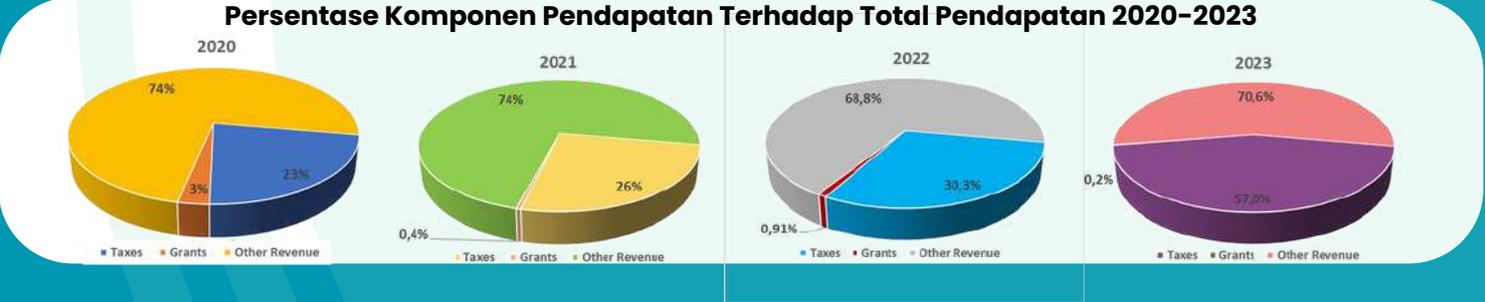
Laporan Operasional (LO) GFS merupakan ikhtisar transaksi Pemerintah Daerah pada periode pelaporan tertentu. LO GFS menyajikan detail transaksi pendapatan dan beban, investasi neto pada aset non keuangan, akuisisi neto aset keuangan dan jumlah neto kewajiban yang timbul

Tren Pendapatan LO Statistik

Perbandingan Pendapatan 2020-2023 (dalam triliun)



Persentase Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan 2020-2023



LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH



Beban LO Statistik

Total Expense
Rp45,47 Triliun



01 Pempus
Rp9,78 Triliun

02 Pemda
Rp3,35 Triliun

03 Eliminasi
Rp5,43 Triliun

Compensation of employees 17,97 T	↑ 0,07%
Use of goods and service 16,47 T	↑ 9,37%
Interest 54,78 M	↓ 27,18%
Subsidies 15,90 M	↑ 105,3 %
Grants 8,41 T	↑ 26,41
Social Benefit 60,72 M	↓ 2,65%
Other Expense 2,47 T	↑ 57,28

Neraca Statistik



Neraca Statistik menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan netto pada akhir periode pelaporan

Financial Assets
Rp22,48 Triliun

Nonfinancial Assets
Rp305,47 Triliun

Liabilities
Rp4,98 Triliun

Net Worth
Rp322,96 Triliun



Perbandingan Komponen Neraca Statistik Tahun 2022 dan 2023 (dalam triliun)



Perbandingan Komponen Aset non Keuangan Tahun 2022 dan 2023 (dalam triliun)





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGANTAR

LKPK & LSKP TAHUN 2023 *UNAUDITED*
Kanwil DJPb Sumsel



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2023 (*Unaudited*). Sejak berkumandangnya genta reformasi di negeri ini, yang ditandai dengan ditetapkannya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah secara terus-menerus melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara. Dalam rangkaian proses reformasi tersebut, penerapan Akuntansi Berbasis Akrua dan penyelenggaraan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) telah menjadi salah satu *milestones* dalam Reformasi Manajemen Keuangan Publik di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan agar Laporan Keuangan Pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah yang berstandar global sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal dan perbandingannya antarnegara. Selanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) dalam rangka mewujudkan konsolidasi Pelaporan dan Statistik Keuangan Pemerintah secara Nasional.

Konsolidasi Pelaporan dan Statistik Keuangan Pemerintah ini bermanfaat dalam menyediakan informasi fiskal dan keuangan yang lebih komprehensif dan lebih andal bagi pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintahan, dan untuk menilai kinerja fiskal pemerintah secara nasional. Statistik Keuangan Pemerintah menyajikan informasi akuntansi ke dalam bahasa yang lebih dimengerti tanpa mengabaikan sistem statistik makroekonomi. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, informasi Statistik Keuangan Pemerintah yang konsolidatif dapat digunakan oleh lembaga *rating* baik domestik maupun internasional dalam melakukan penilaian *rating* Indonesia sebagai penerbit obligasi Pemerintah. Penilaian *rating* tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi dan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan *global business players* terhadap Pemerintah Indonesia. Berkat reformasi di bidang pengelolaan Keuangan Negara, berangsur-angsur Indonesia menjadi negara yang disegani di kancah perekonomian internasional yang antara lain ditandai dengan naiknya peringkat Indonesia sebagai tujuan investasi (*Investment Grade*), sehingga dapat sejajar dengan negara-negara maju.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa penyusunan laporan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics*) telah menjadi salah satu pilar penting peningkatan kualitas informasi keuangan pemerintah. Sebagai bagian dari komponen penyelenggaraan Pelaporan Keuangan Dan Statistik Keuangan Pemerintah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian



Tingkat Wilayah secara tepat waktu. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 dan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun Laporan Keuangan Konsolidasian (*high level mapping*) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keuangan pemerintah tingkat wilayah Sumatera Selatan yang berguna dalam perencanaan, analisis dan pengambilan kebijakan fiskal daerah di Sumatera Selatan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kontribusi semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada Pemerintah Daerah yang telah menyediakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara memadai dan tepat waktu. Kami berharap Laporan ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi sarana peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, serta dalam mewujudkan pengelolaan Keuangan Negara yang lebih baik.

Palembang, Mei 2024

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan



Ditandatangani secara elektronik
Rahmadi Murwanto



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

LKPK & LSKP TAHUN 2023 *UNAUDITED*
Kanwil DJPb Sumsel





DAFTAR ISI

kata Pengantar.....	i
ringkasan Eksekutif.....	1
Laporan.....	9
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian	9
Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah	11
Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian	13
Laporan Perubahan Ekuitas.....	15
Laporan Operasional Statistik Pemerintah Umum	16
Neraca Konsolidasian Statistik Keuangan Pemerintah Umum	17
Laporan Sumber dan Penggunaan Kas.....	19
Meta Data.....	21
Catatan Atas Laporan Keuangan.....	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian	25
A.3. Kebijakan Akuntansi Dan Eliminasi Akun Timbal Balik.....	36
A.4. Kebijakan Fiskal/Keuangan Dan Ekonomi Makro Tingkat Wilayah Tahun 2023	39
B. Catatan Atas Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun Anggaran 2023	44
B.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tahun Anggaran 2023	44
B.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca Konsolidasian Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2023.....	53
B.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2022.....	66
C. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian Sektor Pemerintah Umum Tahun 2022.....	71
C. 1. Statistik Keuangan Pemerintah.....	71
C. 2. Pendekatan Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah.....	72
C. 3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Statistik Keuangan Pemerintah.....	73



C. 3.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasiional Statistik Keuangan Pemerintah.....	73
C. 3.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca Statistik Keuangan Pemerintah	79
C. 3.3 Penjelasan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas.....	73



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKPK & LSKP TAHUN 2023 *UNAUDITED*
Kanwil DJPb Sumsel





RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dan LKPD dilakukan dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antara negara (*cross country studies*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional tersebut, Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai perlu diterbitkannya pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Konsolidasi Fiskal dan statistik keuangan pemerintah diperlukan untuk menghasilkan informasi aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah berupa ringkasan informasi kinerja dan posisi keuangan secara keseluruhan untuk sektor pemerintah umum (*general government*) dan sektor publik (*public sector*) sehingga dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan fiskal. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Pemerintah Daerah tidak dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi lebih pada tujuan transparansi fiskal. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Lampiran I PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (*high level mapping*) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan konsolidasian yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Neraca Konsolidasian dan Laporan Operasional Konsolidasian, yang proses konsolidasinya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (1) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), (2) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan (3) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023, proses konsolidasi dilakukan terhadap 18 LKPD. Dari 18 LKPD, kesemuanya merupakan LKPD *Unaudited*.

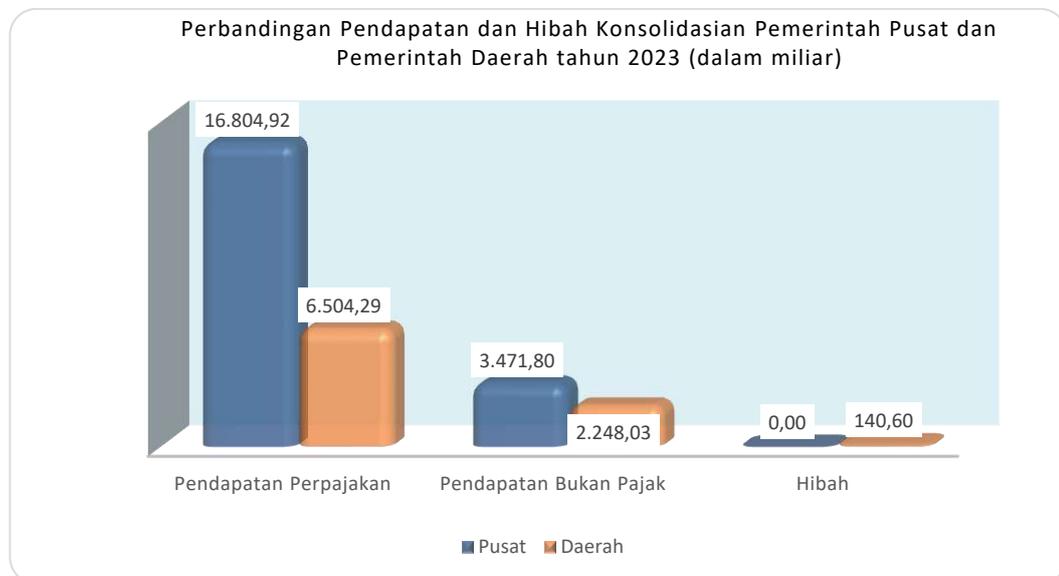
Pada laporan keuangan konsolidasian ini, kebijakan eliminasi akun timbal balik meliputi (1) Eliminasi akun timbal balik yang jumlahnya sama, (2) Eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya, (3) Eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya



2. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tahun 2023

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan baik untuk LRA Pemerintah Pusat maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian ini mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

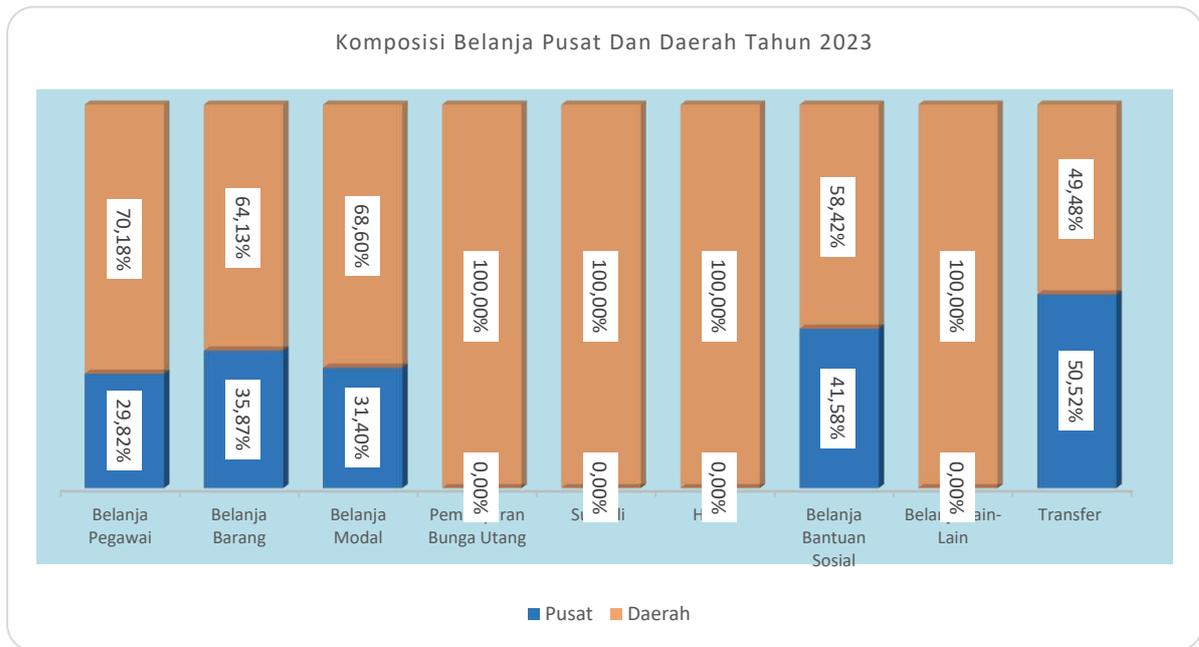
Pada tahun 2023, Pendapatan dan Hibah Konsolidasian mencapai Rp29.169.729.815.937, yang merupakan konsolidasian pendapatan negara dan hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp20.276.734.573.405 dan pendapatan pemerintah daerah konsolidasian sebesar Rp39.017.814.635.911 setelah dieliminasi akun resiprokal sebesar Rp30.124.819.393.379. Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar Rp23.309.222.171.057, Pendapatan Bukan Pajak konsolidasian sebesar Rp5.719.843.112.303 dan Pendapatan Hibah sebesar Rp140.664.532.577, sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah dieliminasi dengan Belanja Transfer Pemerintah Pusat.



Grafik 1. Perbandingan Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Pempus dan Pemda TA 2023

Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tahun 2023 didominasi oleh Pendapatan Perpajakan, yaitu sebesar 79,9 persen dari total seluruh pendapatan, dan mengalami peningkatan sebesar Rp936.321.033.667 atau 4,2 persen dibanding Pendapatan Perpajakan tahun 2022. Pendapatan Bukan Pajak konsolidasian mengalami peningkatan sebesar Rp1.255.527.925.336 atau 28,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Pendapatan Hibah turun sebesar Rp542.335.224.489 atau minus 79,4 persen.

Belanja Konsolidasian tahun 2023 sebesar Rp60.136.239.958.176, merupakan konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat Rp50.564.386.446.674 dan Belanja Pemerintah Daerah Rp39.696.672.904.881 setelah dieliminasi akun resiprokal sebesar Rp30.124.819.393.379. Belanja Konsolidasian tahun 2023 meningkat sebesar Rp5.749.637.625.796 atau 10,6 persen jika dibandingkan dengan Belanja Konsolidasian tahun 2022.



Grafik 2. Komposisi Belanja Pempus dan Pemda TA 2023

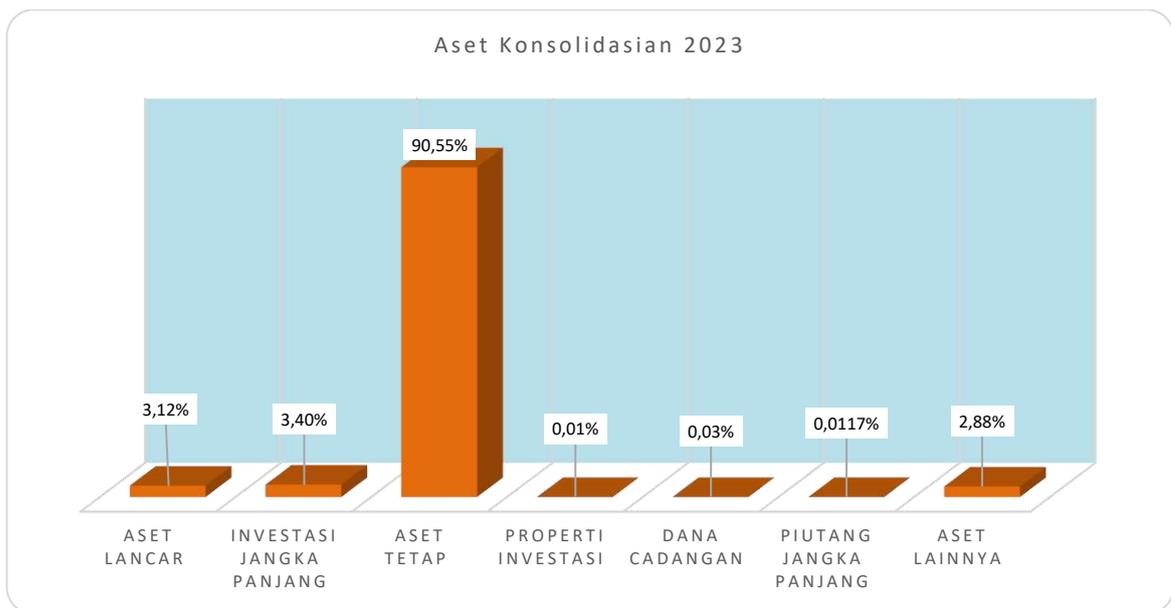
Belanja Pemerintah Konsolidasian tahun 2023 terdiri dari Belanja Pegawai Konsolidasian Rp17.433.827.632.855, Belanja Barang Konsolidasian Rp18.125.437.694.048, Belanja Modal Konsolidasian Rp14.664.572.068.286, Belanja Hibah Konsolidasian Rp1.637.671.392.172, Belanja Subsidi Konsolidasian Rp7.753.180.987, Bantuan Sosial Konsolidasian Rp60.726.782.000, Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian Rp54.788.194.668, Belanja Lain-Lain sebesar Rp5.924.002.538 dan Belanja Transfer sebesar Rp8.137.372.181.895.

Pada tahun 2023, terdapat Defisit Konsolidasian sebesar minus Rp30.966.510.142.238, meningkat 15,3 persen jika dibandingkan dengan Defisit Konsolidasian pada tahun 2022 yang sebesar minus Rp26.866.386.250.957. Sumber pembiayaan untuk menutup Defisit berasal dari Pembiayaan Konsolidasian tahun 2023 sebesar Rp2.464.725.160.533 yang merupakan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp3.324.679.762.835 setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp744.811.809.841 Penyertaan Modal Negara sebesar Rp115.142.792.461. Terdapat SiKPA Konsolidasian tahun 2023 sebesar minus Rp28.501.784.981.706 yang terdiri dari SiKPA Pemerintah Pusat sebesar minus Rp30.287.651.873.269 dan SiLPA Pemerintah Daerah sebesar Rp1.785.866.891.563.

Konsolidasian Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dilakukan per kabupaten/kota dengan mengkonsolidasikan data belanja per wilayah Sistem Akuntansi Umum/Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAU/SAKUN) untuk Pemerintah Pusat tingkat kabupaten/kota dan data belanja pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemaparan belanja konsolidasian per wilayah dilengkapi dengan indikator sosial ekonomi tingkat wilayah.

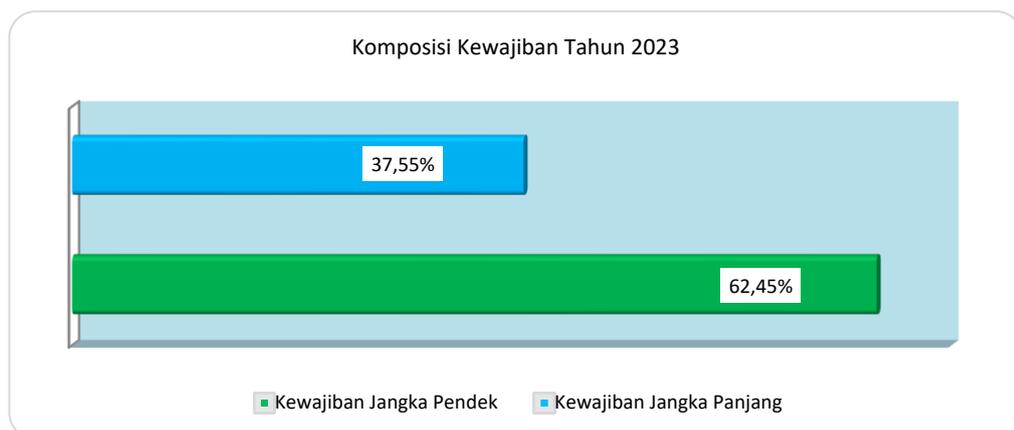
3. Neraca Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Total Aset Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp326.285.824.291.482 terdiri dari Aset Lancar Konsolidasian sebesar Rp10.176.807.078.412, Investasi Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp11.091.547.676.045, Aset tetap Konsolidasian sebesar Rp295.450.645.050.715, Properti Investasi sebesar Rp16.581.036.000, Dana Cadangan sebesar Rp100.011.660.275, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp38.281.229.097 dan Aset Lainnya Konsolidasian sebesar Rp9.411.950.560.938. Aset Konsolidasian didominasi oleh Aset Tetap, yaitu sebesar 90,55 persen dari Total Aset. Aset Konsolidasian per 31 Desember 2023 terdiri dari total Aset Pemerintah Pusat sebesar Rp206.871.467.507.500,00 dan Aset Pemerintah Daerah per sebesar Rp119.414.356.783.982,00.



Grafik 3. Aset Konsolidasian Tahun 2023

Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.985.719.434.778 terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian sebesar Rp3.113.501.886.335 atau sebesar 62,45 persen dan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp1.872.217.548.443 atau 37,55 persen. Sedangkan Ekuitas Konsolidasian tahun per 31 Desember 2023 sebesar Rp321.300.104.856.704.

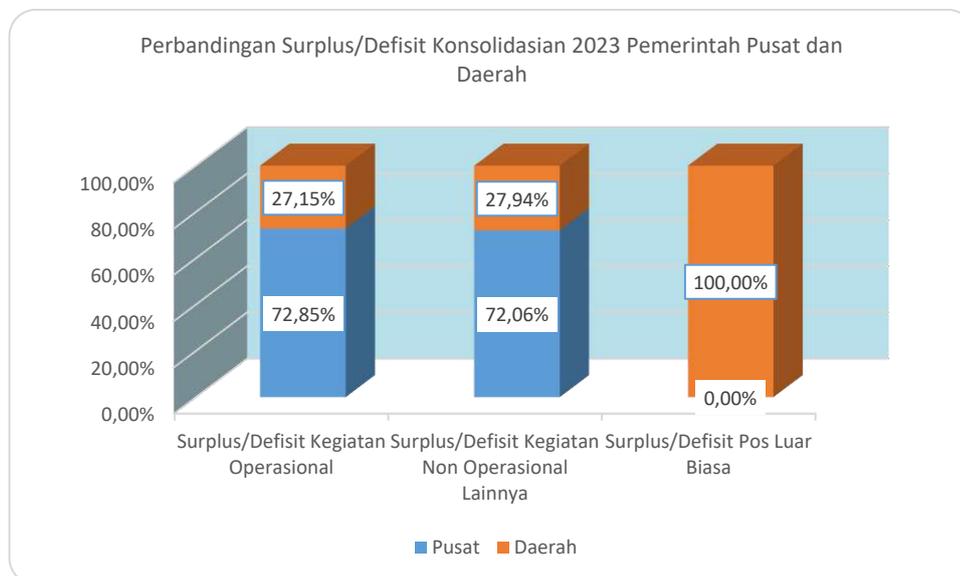


Grafik 4. Komposisi Kewajiban Tahun 2023

4. Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tahun 2023

Laporan Operasional merupakan salah satu komponen pada Laporan Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan. Laporan Operasional menyajikan Surplus/Defisit dari kegiatan operasi suatu entitas. Laporan Operasional (LO) Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi pendapatan, beban, serta surplus/defisit dari kegiatan operasi, baik untuk Laporan Operasional Pemerintah Pusat maupun Laporan Operasional Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2023, terdapat Surplus-LO Konsolidasian sebesar Rp5.773.910.195.014, yang merupakan konsolidasi dari Surplus-LO Pemerintah Pusat sebesar Rp4.207.000.953.035 dan surplus-LO Pemerintah Daerah sebesar Rp1.566.909.241.979. Surplus/Defisit Konsolidasian tersebut terdiri dari Surplus dari Kegiatan Operasional Rp5.872.937.989.977, Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar minus Rp98.925.436.963 dan Defisit dari Kegiatan Luar Biasa sebesar minus Rp102.358.000. Nilai Surplus Konsolidasian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar minus Rp6.852.777.919.998 dibandingkan periode tahun 2022.



Grafik 5. Perbandingan Surplus/Defisit Konsolidasian Tahun 2023

Surplus dari Kegiatan Operasional Konsolidasian Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Operasional Konsolidasian sebesar Rp62.370.610.882.224 dikurangi Beban Operasional Konsolidasian sebesar Rp56.497.672.892.247 setelah dilakukan eliminasi konsolidasian sebesar Rp27.845.033.257.797,70. Pendapatan Operasional Konsolidasian mengalami penurunan sebesar minus Rp20.900.415.357 atau 0,03 persen dibanding periode tahun 2022. Beban Operasional Konsolidasian mengalami peningkatan sebesar Rp3.000.633.761.199 atau sebesar 5,61 persen dibanding periode yang sama di tahun 2022. Pendapatan Operasional Konsolidasian terdiri dari Pendapatan Operasional Pemerintah Pusat sebesar Rp52.976.349.356.904,00 dan Pendapatan Operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp37.239.294.783.117 serta eliminasi sebesar Rp27.845.033.257.798. Beban



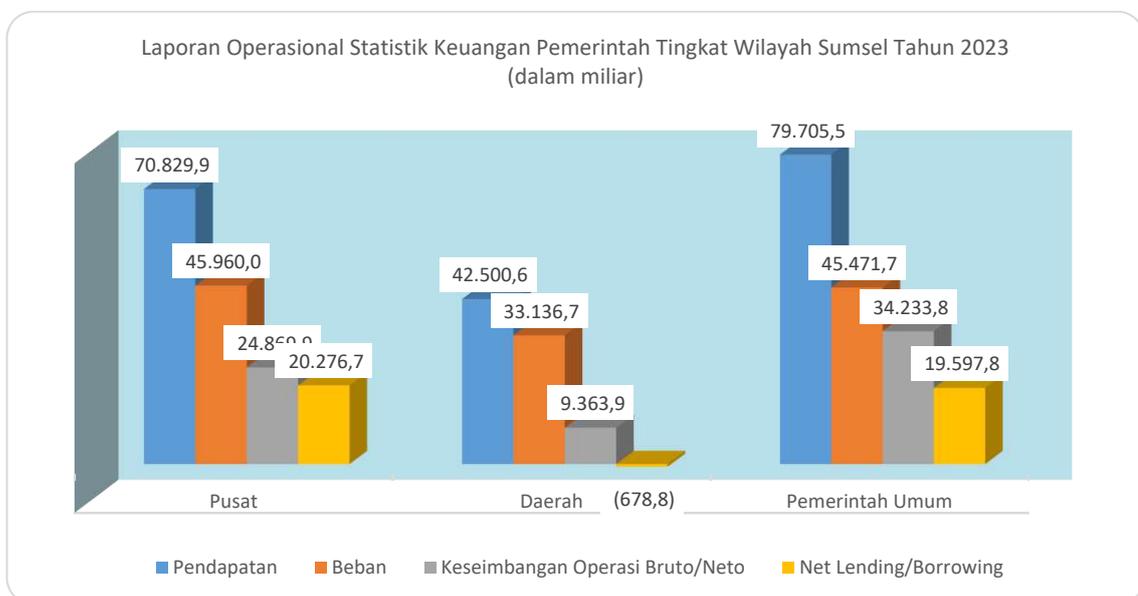
Operasional Konsolidasian terdiri dari Beban Operasional Pemerintah Pusat sebesar Rp48.698.062.099.633,00 dan Beban Operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp35.644.644.050.411 serta eliminasi sebesar Rp27.845.033.257.798.

Desisit dari Kegiatan Non Operasional Konsolidasian sebesar minus Rp98.925.436.963 terdiri dari Surplus Pempus Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp15.767.738, Defisit Pempus Pelepasan Aset Non Lancar sebesar minus Rp61.663.973.215, Defisit Penpus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar minus Rp9.638.098.759, Defisit Pemda Penjualan Aset Non Lancar sebesar minus Rp17.364.168.634. Selanjutnya, Defisit dari Pos Luar Biasa Pemda sebesar Rp102.358.000.

5. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah disusun berdasarkan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (*high level mapping*) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Operasional yang di-*mapping* menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian, Neraca Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan *high level mapping* serta Laporan Sumber Dana Penggunaan Kas. Laporan Operasional Statistik keuangan pemerintah umum tingkat wilayah mencatat semua transaksi mulai dari 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 meliputi pendapatan, beban, perolehan aset non keuangan neto, perolehan aset keuangan neto, keterjadian kewajiban neto sehingga menghasilkan perubahan pada nilai kekayaan neto (Neraca). Sedangkan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah menyajikan aliran kas masuk dan keluar pemerintah.

Berdasarkan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) Konsolidasian, Keseimbangan Operasi Bruto/Neto sebesar Rp34.233.815.576.813, meningkat Rp1.707.773.559.115 atau 5,25 persen dibanding tahun 2022.

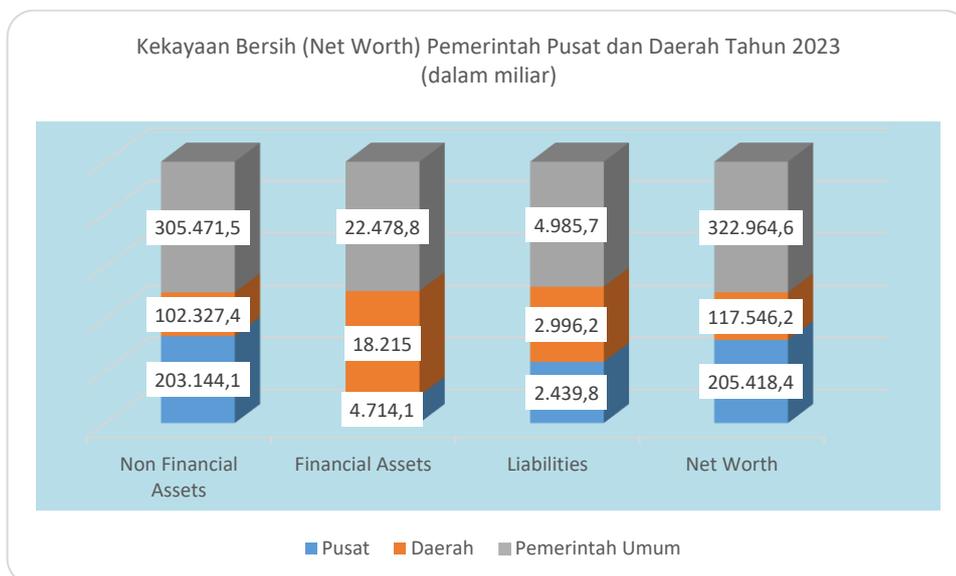


Grafik 6. Perbandingan LO Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Keseimbangan Operasi Bruto/Neto Konsolidasian merupakan selisih antara pendapatan sebesar Rp79.705.483.466.703 dan beban operasional sebesar Rp45.471.667.889.889 setelah eliminasi akun resiprok al sebesar Rp33.625.123.929.431, yang pada akhirnya mempengaruhi kekayaan neto yang berasal dari transaksi. Indikator ini merupakan ukuran kesinambungan operasional (*operational sustainability*).

Kondisi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian menunjukkan surplus (*Net Lending*) sebesar Rp19.597.876.304.436. *Net Lending/Borrowing*, yang umumnya disebut surplus/defisit, dihitung sebesar keseimbangan operasi neto Rp34.233.815.576.813 dikurangi investasi neto Rp14.635.939.272.378 dalam aset non keuangan. Semua transaksi akuisisi atau penghentian aset keuangan dan kewajiban diperlakukan sebagai transaksi pembiayaan. Nilai surplus (*Net Lending*) naik Rp34.431.740.769 atau 0,18 persen dibandingkan tahun 2023. Kenaikan tersebut disebabkan pada tahun 2023 pendapatan (*revenue*) lebih tinggi dari beban (*expense*). Pendapatan tahun 2023 meningkat sebesar Rp5.779.356.925.883 atau 7,82 persen dan beban juga meningkat sebesar Rp4.071.583.366.767 atau 9,83 persen dibanding tahun 2023.

Berdasarkan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Sumatera Selatan, Kekayaan Bersih (*Net Worth*) menunjukkan hasil yang positif, dimana jumlah aset jauh lebih besar dibanding jumlah kewajiban yang artinya posisi kewajiban atau utang masih dalam batas yang aman.



Grafik 7. Kekayaan Bersih (*Net Worth*) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Kekayaan Bersih pada (*Net Worth*) Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp322.964.618.476.097, meningkat sebesar Rp5.904.793.287.011 atau 1,86 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan yang kurang signifikan ini dikarenakan meskipun terdapat kenaikan Aset Nonkeuangan dan Aset Keuangan, namun disisi lain terdapat kenaikan pada Kewajiban yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, Aset Nonkeuangan naik sebesar Rp6.021.028.294.651 atau 2,01 persen dan Aset Keuangan naik sebesar Rp863.784.890.282 atau 4 persen (YoY). Persentase kenaikan yang lebih besar terjadi pada pos Kewajiban, yaitu sebesar 24,47 persen (YoY) atau Rp980.019.897.923. Kenaikan tertinggi pada pos



Kewajiban diakibatkan oleh peningkatan Utang Lainnya (*Other Accounts Payable*) sebesar Rp1.523.218.670.778 atau 55,7 persen (YoY).

Aset Pemerintah Umum didominasi oleh Aset Nonkeuangan yang terdiri dari aset tetap, persediaan, dan aset nonproduksi. Hal ini menunjukkan keselarasan program yang telah dilakukan dengan fungsi Pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana publik untuk pelayanan masyarakat dan penunjang kegiatan ekonomi

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023, secara umum Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mencapai Rp65.107.811.184.452 yang diperoleh dari Arus Kas Masuk sebesar Rp48.007.084.693.623 dikurangi Arus Kas Keluar sebesar Rp22.964.380.466.699. Arus Kas Bersih dari Investasi Non Keuangan mencapai Rp16.054.897.912.635 yang diperoleh dari Pembelian Aset Non Keuangan sebesar Rp16.035.190.061.328 dan Penjualan Aset non Keuangan sebesar Rp28.632.795.909. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan mencapai minus Rp565.741.267.380 yang berasal dari Akuisisi Aset Keuangan Neto selain Kas sebesar Rp115.142.792.461 dan Keterjadian Kewajiban Neto sebesar minus Rp680.884.059.841. Penjumlahan seluruh aktivitas Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah menghasilkan Perubahan Bersih dalam Persediaan Uang Tunai sebesar Rp80.596.967.829.707.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FACE LAPORAN KONSOLIDASIAN

LKPK & LSKP TAHUN 2023 *UNAUDITED*
Kanwil DJPb Sumsel





LAPORAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	Pendapatan Negara dan Hibah	29.169.729.815.937	27.520.216.081.423	6,0%
A.1	Pendapatan Perpajakan	23.309.222.171.057	22.372.901.137.390	4,2%
1	Pajak Dalam Negeri	23.012.226.694.725	21.776.105.118.611	5,7%
2	Pajak Perdagangan Internasional	296.995.476.332	596.796.018.779	-50,2%
A.2	Pendapatan Bukan Pajak	5.719.843.112.303	4.464.315.186.967	28,1%
1	Pendapatan Sumber Daya Alam			
2	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	452.312.073.909	312.955.036.724	44,5%
3	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya	2.345.322.203.217	1.307.403.743.048	79,4%
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA			
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA			
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA			
7	Bantuan Keuangan - LRA		149.099.516.458	-100,0%
8	Pendapatan BLU	2.922.208.835.178	2.694.856.890.736	8,4%
A.3	Pendapatan Hibah	140.664.532.577	682.999.757.066	-79,4%
1	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	140.664.532.577	682.999.757.066	-79,4%
2	Pendapatan Hibah Luar Negeri			
B	Belanja Pemerintah	60.136.239.958.176	54.386.602.332.380	10,6%
1	Belanja Pegawai	17.433.827.632.855	17.449.425.513.735	-0,1%
2	Belanja Barang Dan Jasa	18.125.437.694.048	16.344.307.891.455	10,9%
3	Belanja Modal	14.664.572.068.286	12.986.517.809.257	12,9%
4	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	54.788.194.668	75.241.908.379	-27,2%
5	Subsidi	15.920.009.714	7.753.180.987	105,3%
6	Hibah	1.637.671.392.172	903.977.271.542	81,2%
7	Belanja Bantuan Sosial	60.726.782.000	62.382.800.683	-2,7%
8	Belanja Lain-lain	5.924.002.538	35.639.610.692	
9	Belanja Tak Terduga			
10	Transfer	8.137.372.181.895	6.521.356.345.649	24,8%
C	Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(30.966.510.142.238)	(26.866.386.250.957)	15,3%
D	Pembiayaan	2.464.725.160.533	2.346.982.374.173	5,0%
	Penerimaan Pembiayaan	3.324.679.762.835	3.062.429.972.050	8,6%
	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	3.324.679.762.835	3.062.429.972.050	8,6%



NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	33.927.750.000	190.040.104.713	-82,1%
2	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan		188.825.236.249,6	-100,0%
3	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat		72.180.084.070	-100,0%
4	Penerimaan Pembiayaan - Pemda	3.290.752.012.835	2.611.384.547.018,08	26,0%
	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri			
	Pengeluaran Pembiayaan	859.954.602.302	715.447.597.877	20,2%
	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	744.811.809.841	610.457.282.679	22,0%
1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	97.863.655.410	5.000.000.000	1857,3%
2	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan	616.948.154.431	529.178.766.549	16,6%
3	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		6.278.516.130	-100,0%
4	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	70.000.000.000	-57,1%
	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri			
	Penyertaan Modal Negara	115.142.792.461	104.990.315.198	9,7%
E	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-(D+C)	(28.501.784.981.706)	(24.519.403.876.783)	16,2%



**NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	ASET	326.285.824.291.482	319.469.620.604.697	2,13%
A.1	Aset Lancar	10.176.807.078.412	9.856.993.911.345	3,24%
1	Kas dan setara kas	3.914.020.661.669	5.049.534.883.039	-22,49%
2	Uang muka rekening BUN-khusus pusat			
3	Investasi jangka pendek	388.548.923.943	109.648.923.943	254,36%
4	Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja	46.261.230.405	64.156.313.209	-27,89%
5	Piutang	2.642.926.994.894	1.558.958.634.446	69,53%
	Piutang Perpajakan	1.532.513.262.642	1.341.777.970.202	14,22%
	Piutang Bukan Pajak	2.653.378.045.322	1.717.843.963.774	54,46%
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	3.317.598.034	3.578.960.619	-7,30%
	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	163.438.057	181.149.595	-9,78%
	Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman			
	Piutang lain-lain	117.901.203.636	91.313.414.463	29,12%
	Penyisihan piutang tak tertagih	(1.664.346.552.797)	(1.595.736.824.207)	4,30%
6	Persediaan	3.185.049.267.501	3.074.695.156.709	3,59%
7	Piutang PFK			
A.2	Investasi jangka panjang	11.091.547.676.045	10.997.964.272.984	0,85%
1	Investasi jangka panjang non permanen	37.373.807.338	37.373.807.338	0,00%
2	Investasi jangka panjang permanen	11.054.173.868.707	10.960.590.465.646	0,85%
3	Dana Bergulir Diragukan Tertagih			
A.3	Aset Tetap	295.450.645.050.715	289.953.748.233.296	1,90%
1	Tanah	158.966.583.537.975	158.187.573.516.999	0,49%
2	Peralatan dan Mesin	31.944.876.918.410	29.317.335.567.276	8,96%
3	Gedung dan Bangunan	41.531.771.212.717	38.844.686.009.291	6,92%
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	154.536.405.562.291	145.965.338.835.314	5,87%
5	Aset tetap lainnya	3.137.797.970.195	2.948.581.391.219	6,42%
6	Konstruksi dalam pengerjaan	7.405.299.526.561	5.970.599.520.658	24,03%
7	Konsesi Jasa	4.423.874.645.407	3.984.035.519.818	11,04%
8	Akumulasi penyusutan	(106.495.964.322.841)	(95.264.402.127.278)	11,79%
9	Aset Tetap Yang Belum Diregister			
A.4	Properti Investasi	16.581.036.000	16.581.036.000	0,00%
A.5	Dana Cadangan	100.011.660.275	70.011.660.275	42,85%
1	Dana Cadangan	100.011.660.275	70.011.660.275	42,85%
A.6	Piutang Jangka Panjang	38.281.229.097	43.348.382.724	-11,69%



NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
1	Tagihan piutang penjualan angsuran	820.127.783	997.238.301	-17,76%
2	Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	30.346.860.359	35.147.133.909	-13,66%
3	Piutang jangka panjang kredit pemerintah			
4	Piutang jangka panjang lainnya	7.281.307.551	7.371.307.551	-1,22%
5	Penyisihan piutang jangka panjang	(167.066.596)	(167.297.038)	-0,14%
A.7	Aset Lainnya	9.411.950.560.938	8.530.973.108.073	10,33%
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	2.136.324.332.073	2.120.586.484.884	0,74%
2	Aset tidak berwujud	771.502.426.292	782.688.305.304	-1,43%
3	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	456.382.892.008	4.920.652.772	9174,84%
4	Dana Penjaminan			
5	Dana Kelolaan BLU			
6	Aset lain-lain	6.879.536.916.496	6.610.183.027.270	4,07%
7	Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya			
8	Aset Lainnya Penerusan Pinjaman			
9	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(831.796.005.930)	(987.405.362.157)	-15,76%
B	KEWAJIBAN/UTANG	4.985.719.434.778	4.005.699.536.855	24,47%
B.1	Kewajiban Jangka Pendek	3.113.501.886.335	2.565.611.389.505	21,36%
1	Utang perhitungan pihak ketiga	1.071.067.472	1.087.038.413	-1,47%
2	Utang kepada pihak ketiga	1.787.467.565.455	958.994.086.329	86,39%
3	Utang bunga	3.954.187.929	4.471.489.637	-11,57%
4	Utang subsidi			
5	Utang Transfer	1.242.737.152		100%
6	Bagian lancar utang jangka panjang	296.063.331.062	841.571.246.422	-64,82%
7	Utang surat perbendaharaan negara			
8	Utang Yang Belum Ditagihkan			
9	Utang jangka pendek lainnya	684.043.068.124	410.261.348.009	66,73%
10	Uang Muka	525.975.970	40.133.122	1210,58%
11	Utang Jangka Pendek Lainnya	339.133.953.171	349.186.047.573	-2,88%
B.2	Kewajiban Jangka Panjang	1.872.217.548.443	1.440.088.147.350	30,01%
1	Utang jangka panjang dalam negeri	432.534.954.446	430.225.811.942	0,54%
2	Utang jangka panjang luar negeri		-	!
3	Kewajiban Konsesi Jasa	1.439.682.593.997	1.009.862.335.408	42,56%
C	EKUITAS	321.300.104.856.704	315.463.921.067.841	1,85%



LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	KEGIATAN OPERASIONAL			
A.1	PENDAPATAN OPERASIONAL	62.370.610.882.224	62.391.511.297.581	4,66%
1	Pendapatan Perpajakan-LO	25.323.115.925.090	23.847.878.030.568	6,19%
2	Pendapatan Bukan Pajak-LO	3.133.541.391.630	2.549.598.315.818	22,90%
2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam			
2.2	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	450.740.867.279	355.631.571.510	26,74%
2.3	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.682.800.524.350	2.193.966.744.308	22,28%
3	Pendapatan Transfer- LO	290.324.963.447	562.701.214.040	-48,41%
3.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO			
3.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		562.701.214.040	-100,00%
3.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO			
3.4	Bantuan Keuangan - LO	290.324.963.447		100,00%
4	Pendapatan BLU -LO	1.823.886.395.073	1.510.555.588.735	20,74%
4.1	Pendapatan Jasa BLU - LO	1.699.722.684.271	1.353.370.749.030	25,59%
4.2	Pendapatan Hibah BLU - LO	9.627.476.508	8.642.497.799	11,40%
4.3	Pendapatan Lainnya BLU - LO	114.536.234.294	148.542.341.906	-22,89%
5	Pendapatan Hibah-LO	388.816.848.535	1.405.116.547.881	-72,33%
5.1	Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO	388.816.848.535	1.405.116.547.881	-72,33%
6	Pendapatan lainnya-LO	31.410.925.358.449	32.515.661.600.539	5,60%
6.1	Pendapatan Penyesuaian Akrual	100.832.982.491	3.330.088.254	2927,94%
6.2	Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	31.310.092.375.958	32.512.331.512.285	5,30%
A.2	BEBAN OPERASIONAL	56.497.672.892.247	53.497.039.131.048	11,08%
1	Beban Pegawai	18.001.385.520.108	17.970.454.684.091	0,17%
2	Beban Persediaan	982.479.894.141	701.218.277.163	40,11%
3	Beban Barang dan Jasa	17.716.114.541.429	15.736.758.656.835	12,58%
4	Beban Bunga	54.272.825.884	74.662.470.165	-27,31%
5	Beban Subsidi	15.920.009.714	7.753.180.987	105,34%
6	Beban Hibah	1.735.049.223.148	1.166.696.190.670	48,71%
7	Beban Bantuan Sosial	61.307.740.000	66.238.775.396	-7,44%
8	Beban Lain-lain	162.807.920	123.103.632.285	-99,87%
9	Beban Akrual Lainnya	11.591.298.900.155	11.902.670.001.859	-2,62%
10	Beban Transfer	6.339.681.429.748	5.747.483.261.597	61,20%
A.3	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	5.872.937.989.977	8.894.472.166.533	-33,97%
B	KEGIATAN NON OPERASIONAL			
B.1	Surplus (Defisist) Pempus Selisih Kurs Belum Terealisa	15.767.738	64.677.564	-75,62%



NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
B.1	Surplus/(Defisit) Penpus Pelepasan Aset Non Lancar	(61.663.973.215)	(68.309.875.497)	-9,73%
B.2	Surplus/(Defisit) Penpus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
B.3	Surplus/(Defisit) Penpus Kegiatan Non Operasional Lainnya	(9.638.098.759)	69.721.778.708	-113,82%
B.4	Surplus/(Defisit) Pemda Penjualan Aset Non Lancar	(17.364.168.634)	(72.191.968.243)	-75,95%
B.5	Surplus (Defisit) Pemda Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(73.189.844)	(1.950.494.984)	-96,25%
B.6	Surplus (Defisit) Pemda Kegiatan Non Operasional Lainnya	(10.201.774.249)	126.160.608.367	-108,09%
B.7	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	(98.925.436.963)	53.494.725.914	-284,93%
C	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		8.947.966.892.447	-100,00%
	POS LUAR BIASA	(102.358.000)	(15.181.377.926)	-99,33%
D	SURPLUS/(DEFISIT) LO	5.773.910.195.014	8.932.785.514.521	-35,36%

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	Ekuitas Awal	315.432.799.474.525	299.143.023.805.086	5,45%
1	Ekuitas Awal Pemerintah Pusat	202.181.167.672.268	193.383.683.314.438	4,55%
2	Ekuitas Awal Pemerintah Daerah	113.251.631.802.257	105.759.340.490.648	7,08%
A.1	Penyesuaian Ekuitas Awal			
B	EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	315.432.799.474.525	299.143.023.805.086	5,45%
C	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	5.867.305.373.178	16.320.897.262.756	100%
C.1	Surplus/Defisit LO	5.773.910.195.014	8.932.785.514.521	-35,36%
C.2	KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	1.323.200.341.351	1.480.404.337.267	-10,62%
1	Penyesuaian Nilai Aset			
2	Koreksi SILPA			
3	Koreksi Nilai Persediaan	(3.740.981.867)	(7.375.290.977)	-49,28%
4	Selisih Revaluasi Aset Tetap		30.234.426.107	-100,00%
5	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	863.782.597.133	97.349.766.725	787,30%
6	Koreksi atas Reklasifikasi Aset	23.654.902.927	(2.263.674.596)	-
7	Koreksi Lain-lain	439.503.823.158	1.362.459.110.008	-67,74%
C.3	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1.229.805.163.187)	5.907.707.410.967	-120,82%
C.4	REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE			
E	EKUITAS AKHIR	321.300.104.847.704	315.463.921.067.842	1,85%



LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	JUMLAH		
		31 DES 2023	31 DES 2022	%
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :				
A1	Pendapatan	79.705.483.466.703	73.926.126.540.820	7,82%
A11	Pajak	23.308.337.178.937	22.364.835.354.160	4,22%
A12	Kontribusi Sosial			
A13	Hibah	131.281.651.456	672.644.176.475	-80,48%
A14	Pendapatan Lainnya	56.265.864.636.310	50.888.647.010.184	10,57%
A2	Beban	45.471.667.889.889	41.400.084.523.122	9,83%
A21	Kompensasi Pegawai	17.973.707.710.840	17.960.246.223.538	0,07%
A22	Penggunaan Barang dan Jasa ¹⁾	16.473.359.050.047	15.061.991.046.759	9,37%
A23	Konsumsi Aset Tetap			
A24	Bunga	54.788.194.668	75.241.908.379	-27,18%
A25	Subsidi	15.920.009.714	7.753.180.987	105,34%
A26	Hibah	8.415.642.267.876	6.657.205.967.529	26,41%
A27	Manfaat Sosial	60.726.782.000	62.382.800.683	-2,65%
A28	Beban Lainnya	2.477.523.874.745	1.575.263.395.247	57,28%
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	34.233.815.576.813	32.526.042.017.698	5,25%
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	34.233.815.576.813	32.526.042.017.698	5,25%
Transaksi Aset Non Keuangan :				
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	14.635.939.272.378	12.962.597.454.029	12,91%
A311	Aset Tetap	14.587.598.625.163	12.843.251.113.666	13,58%
A312	Perubahan Persediaan			
A313	Barang Berharga			
A314	Aset Non Produksi	48.340.647.215	119.346.340.363	-59,50%
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	19.597.876.304.436	19.563.444.563.667	0,18%
Transaksi Aset Keuangan Dan Kewajiban (Pembiayaan) :				
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	18.916.992.244.595	19.474.032.706.021	-2,86%
A321	Dalam Negeri	18.916.992.244.595	19.474.032.706.021	-2,86%
A322	Luar Negeri			
A323	Monetary gold and SDRs			
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(680.884.059.841)	(89.411.857.646)	661,51%
A331	Dalam Negeri	(680.884.059.841)	(89.411.857.646)	661,51%
A332	Luar Negeri			



NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	31 DES 2023	31 DES 2022	%
6	KEKAYAAN BERSIH	322.964.618.476.097	317.059.825.189.086	1,86%
61	Aset Non Keuangan	305.471.518.691.073	299.450.490.396.422	2,01%
611	Aset Tetap	143.289.570.974.685	138.184.879.666.960	3,69%
6111	Gedung dan Bangunan	125.355.366.062.114	121.034.636.717.950	3,57%
6112	Peralatan dan Mesin	8.045.760.800.564	7.852.480.940.199	2,46%
6113	Aset Tetap Lainnya	9.886.201.566.442	9.297.762.008.810	6,33%
612	Persediaan	3.185.049.267.501	3.074.695.156.709	3,59%
614	Aset Nonproduksi	158.996.898.448.888	158.190.915.572.753	0,51%
6141	Tanah	158.966.583.537.975	158.187.573.516.999	0,49%
6144	Aset Tak Berwujud	30.314.910.913	3.342.055.754	807,07%
62	Aset Keuangan	22.478.819.219.802	21.615.034.329.520	4,00%
6202	Uang dan Deposito	4.553.064.137.895	4.863.516.120.029	-6,38%
6203	Surat Berharga Selain Saham	343.273.807.338	404.145.100.361	-15,06%
6204	Pinjaman		3.828.706.977	-100,00%
6205	Saham dan Ekuitas Lain	11.054.173.868.707	10.960.590.465.646	0,85%
6208	Piutang Lainnya	6.528.307.405.861	5.382.953.936.507	21,28%
621	Aset Keuangan Domestik	22.478.819.219.802	21.615.034.329.520	4,00%
6212	Uang dan Deposito	4.553.064.137.895	4.863.516.120.029	-6,38%
6213	Surat Berharga Selain Saham	343.273.807.338	404.145.100.361	-15,06%
6214	Pinjaman		3.828.706.977	-100,00%
6215	Saham dan Ekuitas Lain	11.054.173.868.707	10.960.590.465.646	0,85%
6218	Piutang Lainnya	6.528.307.405.861	5.382.953.936.507	21,28%
622	Aset Keuangan Luar Negeri			
6222	Uang dan Deposito			
6223	Surat Berharga Selain Saham			
6224	Pinjaman			
6225	Saham dan Ekuitas Lain			
6228	Piutang Lainnya			
63	Kewajiban	4.985.719.434.778	4.005.699.536.855	24,47%
6303	Surat Berharga Utang			
6304	Pinjaman	728.596.530.283	1.271.795.303.139	-42,71%
6308	Utang Lainnya	4.257.122.904.495	2.733.904.233.717	55,72%
631	Kewajiban Domestik	4.985.719.434.778	4.005.699.536.855	24,47%
6313	Surat berharga selain saham			
6314	Pinjaman	728.596.530.283	1.271.795.303.139	-42,71%



6318	Utang Lainnya	4.257.122.904.495	2.733.904.233.717	55,72%
632	Kewajiban Luar Negeri			
6323	Surat berharga selain saham			
6324	Pinjaman			
6328	Utang Lainnya			



LAPORAN SUMBER DANA PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	31 DES 2023
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
C1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	88.072.191.651.151
C11	Pajak	48.007.084.693.623
C12	Kontribusi Sosial	
C13	Hibah	128.985.274.054
C14	Penerimaan Lainnya	39.936.121.683.474
C2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	22.964.380.466.699
C21	Kompensasi Pegawai	17.973.707.710.840
C22	Pembelian Barang dan Jasa	
C23	Bunga	54.788.194.668
C24	Subsidi	15.920.009.714
C25	Hibah	2.381.713.894.732
C26	Manfaat Sosia	60.726.782.000
C27	Pembayaran Lainnya	2.477.523.874.745
C10	Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (C1-C2)	65.107.811.184.452
	ARUS KAS DARI INVESTASI NON KEUANGAN	
C31A	Pembelian Aset Non Keuangan	16.083.530.708.543
C311A	Aset Tetap	16.035.190.061.328
C312A	Persediaan untuk Tujuan Strategis	
C313A	Barang Berharga	
C314A	Aset Non Produksi	48.340.647.215
C31B	Penjualan Aset Non Keuangan	28.632.795.909
C311B	Aset Tetap	28.632.795.909
C311B	Persediaan untuk Tujuan Strategis	
C311B	Barang Berharga	
C311B	Aset Non Produksi	
C31	Arus Kas Neto dari Investasi Non Keuangan	16.054.897.912.635
CSD	Surplus/Defisit Kas	81.162.709.097.086
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	
C32X	Akuisisi Aset Keuangan Neto selain Kas	115.142.792.461
C321X	Domestik	115.142.792.461
C322X	Luar Negeri	
C33	Keterjadian Kewajiban Neto	(680.884.059.841)
C331	Domestik	(680.884.059.841)
C332	Luar Negeri	
NFB	Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-C32X+C33)	(565.741.267.380)



NCB	Perubahan Bersih Dalam Persediaan Uang Tunai (CSD-C32X+C33)	80.596.967.829.707
-----	--	--------------------



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

META DATA

LKPK & LSKP TAHUN 2023 *UNAUDITED*
Kanwil DJPb Sumsel





META DATA

A. Informasi Data

1. Nama Data : LKPK & LSKP Tingkat Wilayah Tahun 2023 *Unaudited*
2. Penyelenggara Statistik : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3. Alamat : Gedung Keuangan Negara Lantai 2
Jalan Kapten A.Rivai No. 2-4
4. Nomor Telepon : 0711- 351476, 356534
5. Nomor Faksimili : 0711– 310891
6. Email : kanwilpalembang@gmail.com

B. Definisi Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah merupakan Laporan Statistik Keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (System of National Accounts-SNA), Manual Neraca Pembayaran (The Balance of Payments Manual), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (The Monetary and Financial Statistics Manual)

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah-Tingkat Wilayah (LSKP-TW) ini merupakan konsolidasi dari kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah-Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW). Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan ini adalah entitas Pemerintah Pusat tingkat wilayah dan seluruh Pemerintah Daerah. LSKP-TW disusun terdiri dari:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintahan
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintahan
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah
4. Metadata.

C. Cakupan Data

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah meliputi:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan akun skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Operasional Statistik Keuangan

Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasian Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

D. Periode Publikasi

Triwulanan, Semesteran, Tahunan

E. Waktu Publikasi

1. Data triwulanan dan semester diterbitkan satu bulan setelah berakhirnya periode data
2. Data tahunan *unaudited* diterbitkan tanggal 20 April tahun berikutnya
3. Data tahunan final (*audited*) diterbitkan tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.

F. Status Data

1. Status Angka Sangat Sementara dengan tanda dua bintang (**) diberikan apabila LSKP-TW Triwulanan dan Semesteran pada tahun berjalan yang disusun menggunakan angka estimasi
2. Status Angka Sangat Sementara dengan tanda satu bintang (*) diberikan apabila:
 - a. LSKP-TW Triwulanan dan Semesteran pada tahun berjalan yang telah dilakukan updating
 - b. LSKP-TW Tahunan dengan data *audited*
 - c. LSKP-TW Tahunan yang belum seluruhnya disusun dengan data *audited*
3. LSKP-TW Tahunan berstatus angka tetap (tanpa tanda bintang) apabila telah seluruhnya disusun menggunakan data laporan keuangan yang telah diaudit.

G. Sumber Data

1. Kertas kerja LSKPP-TW dan kertas kerja LSKPDK-TW yang di download dari Aplikasi SIKRI MP dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyusunan LO LSKP dan Laporan Sumber Penggunaan Kas menggunakan data Table GFS 1 (Revenue), Table GFS 2 (Expense), dan Tabel GFS 3 (Transactions in Assets in Liabilities)
 - b. Penyusunan Neraca LSKP menggunakan Table GFS 6 (Balance Sheet)
2. Kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPKDK-TW yang di download dari Aplikasi SIKRI MP dengan melakukan penyesuaian pada Table 3 GFS dilakukan eliminasi secara otomatis oleh sistem SIKRI MP pada pos Net Transaction in Assets and Liabilities – Currency and Deposits (3212) sebesar nilai eliminasi atas transaksi resiprokal antara pempus dengan pemda dan transaksi resiprokal antara pemrov dengan pemkab/pemkot. Seharusnya, eliminasi tersebut dilakukan pada pos pendapatan dan beban. Oleh karena itu, dilakukan jurnal penyesuaian GFS untuk menghilangkan eliminasi tersebut.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diperoleh dari Aplikasi LKPP Terintegrasi (gabungan data dari GLSPAN dan Aplikasi MONSAKTI) dan dilakukan split data ke Kanwil melalui Aplikasi SIKRI MP.

4. Data keuangan/LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 merupakan data keuangan/LKPD periode tahun 2023 *unaudited* yang didapat dari Pemerintah Prov/Kab/Kota.

H. Metodologi

LSKP-TW disusun dengan mengonsolidasikan kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW. LSKPPTW dan LSKPDK-TW disusun dengan melakukan mapping BAS detil kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW menggunakan Aplikasi SIKRI MP dimana Data keuangan pemerintah pusat dilakukan split oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sehingga secara otomatis akan tersedia pada SIKRI MP dan Data keuangan pemerintah daerah diproses melalui unggah WebADI ke dalam SIKRI Modul Pelaporan (sebelum penerapan otomatisasi penuh). Eliminasi atas transaksi resiprokal melalui jurnal manual yang diunggah melalui WebADI pada SIKRI MP. Aplikasi SIKRI MP akan secara otomatis melakukan penyusunan LSKP-TW dengan mengonsolidasikan kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW kedalam GFS Table sesuai dengan kerangka mapping masing-masing akun BAS detil ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

LSKP-TW disusun melalui tiga tahapan, yaitu (1) Penyusunan kertas kerja LSKPP-TW melalui mapping BAS detail data LKPP-TW, (2) Penyusunan kertas kerja LSKPDK-TW, melalui mapping BAS detil data LKPDK-TW, (3) Konsolidasian kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW menjadi LSKP-TW.

I. Integritas Data

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Tahun 2023 *unaudited* diperoleh dari Aplikasi LKPP Terintegrasi (gabungan data dari GLSPAN dan Aplikasi E-rekon&LK) dan dilakukan split data ke Kanwil melalui Aplikasi SIKRI MP. Data Laporan Keuangan tersebut telah dilakukan rekonsiliasi yang terdiri dari 533 UAKPA yang berada pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 *unaudited* berupa data realisasi anggaran (LRA) didapat langsung dari 16 kab/kota lingkup DJPb Sumsel dan 2 Kab/Kota mebggunakan data realisasi anggaran tahun 2023 *preliminary*. Data keuangan Neraca dan LO didapat langsung dari 5 kab/kota lingkup DJPb Sumsel sedangkan data neraca dan LO sebanyak 13 kab/kota merupakan data estimasi yang didapat dari proses *mapping* data realisasi anggaran dengan menggunakan kertas kerja *excel* estimasi neraca-LO. Atas data-data tersebut dilakukan proses konsolidasi dan diunggah ke SIKRI..
3. Pemutakhiran data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

J. Akses Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Kapten A Rivai Nomor 2-4 Palembang. Sedangkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LKPK & LSKP TAHUN 2023 *UNAUDITED*
Kanwil DJPb Sumsel



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
6. Peraturan Daerah yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Lampiran I dan II)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian (Lampiran I PP 71 tahun 2010) menyatakan laporan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu laporan tunggal. Pernyataan ini selanjutnya akan menjadi dasar proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

Sesuai dengan PSAP Nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah kementerian negara/lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP disebutkan bahwa sejak pemerintah menerapkan akuntansi berbasis akrual maka laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian mengingat ada beberapa pilihan kebijakan akuntansi dimana entitas akuntansi terpisah BUN/BUD dengan KL/SKPD maka konsolidasi hanya diterapkan pada beberapa laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Laporan Operasional Konsolidasian dan Neraca Konsolidasian. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian disusun melalui konsolidasi tiga tahap, yaitu::

1. **Konsolidasi Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) dan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil)**

LKPP tingkat wilayah tahun 2023 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat di wilayah, yang terdiri dari Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga, beserta jenjang struktural di bawahnya seperti satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. LKPP tingkat wilayah tidak mencakup entitas Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). LKPP tingkat wilayah mencakup transaksi-transaksi keuangan di tingkat wilayah yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan maupun dana Urusan Bersama.



LKPP tingkat wilayah disusun untuk tujuan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat Wilayah, serta Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah. LKPP tingkat wilayah tidak disusun untuk tujuan pertanggungjawaban.

Untuk LKPP Tingkat Wilayah Tahun 2023, entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga (K/L) dan entitas akuntansi tingkat satuan kerja (satker) di bawahnya yang tercakup dalam wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

Tabel 1. Daftar Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Wilayah Sumsel

No.	Bagian Anggaran	Wilayah	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker di Wilayah	
				2023	2022
1	BA 004	1100	Badan Pemeriksaan Keuangan	1	1
2	BA 005	1100	Mahkamah Agung	54	52
3	BA 006	1100	Kejaksaan Tinggi	16	16
4	BA 010	1100	Kementerian Dalam Negeri	4	4
5	BA 012	1100	Kudam II Sriwijaya	15	13
6	BA 013	1100	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	37	37
7	BA 015	1100	Kementerian Keuangan	19	24
8	BA 018	1100	Kementerian Pertanian	16	16
9	BA 019	1100	Kementerian Perindustrian	2	2
10	BA 022	1100	Kementerian Perhubungan	9	9
11	BA 023	1100	Kementerian Pendidikan Nasional	7	7
12	BA 024	1100	Kementerian Kesehatan	8	14
13	BA 025	1100	Kementerian Agama	142	163
14	BA 026	1100	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	4
15	BA 027	1100	Kementerian Sosial	1	2
16	BA 029	1100	Kementerian Kehutanan	8	9
17	BA 032	1100	Kementerian Kelautan dan Perikanan	8	8
18	BA 033	1100	Kementerian Pekerjaan Umum	19	19
19	BA 040	1100	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2	2
20	BA 044	1100	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	1	1
23	BA 054	1100	Badan Pusat Statistik	16	16
24	BA 055	1100	Kementerian Negara PPN/BAPPENAS	1	1
25	BA 056	1100	Badan Pertanahan Nasional	16	17
26	BA 057	1100	Perpustakaan Nasional Republik	1	1
27	BA 059	1100	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	1
28	BA 060	1100	Kepolisian RI	43	43
29	BA 063	1100	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	2	2
30	BA 065	1100	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	1
31	BA 066	1100	Badan Narkotika Nasional	10	10
32	BA 067	1100	Kementerian Negara Pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi	4	3
33	BA 068	1100	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	1	1
34	BA 075	1100	Badan Meteorologi dan Geofisika	2	2
35	BA 076	1100	Komisi Pemilihan Umum	15	18
36	BA 088	1100	Badan Kepegawaian Negara	1	1
37	BA 089	1100	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	1



No.	Bagian Anggaran	Wilayah	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker di Wilayah	
				2023	2022
38	BA 090	1100	Kementerian Perdagangan	3	6
39	BA 092	1100	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	1	1
40	BA 104	1100	Badan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Nasional	1	1
41	BA 107	1100	Badan SAR Nasional	1	1
42	BA 115	1100	Bawaslu	3	4
43	BA 116	1100	Lembaga Penyiaran Publik RRI		1
44	BA 117	1100	Lembaga Penyiaran Publik TVRI	1	1
45	BA 125	1100	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan	1	
46	BA 999	1100	Bendahara Umum Negara	15	5
Total				533	541

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh kementerian negara/lembaga secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan neraca.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi (SA-BS), Sistem Akuntansi Belanja Lain-lain (SA-BL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SiAP terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI.

SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP, namun saat ini belum mengakomodasikan LKPP Tingkat Wilayah. LKPP tingkat wilayah disusun melalui konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Tingkat Kanwil dengan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

LKPP tingkat wilayah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat tingkat wilayah



Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat tingkat wilayah disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tingkat UAPPA-W dan Laporan Arus Kas Kuasa BUN tingkat wilayah. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah terdiri dari:

- a. Angka realisasi Pendapatan dan Hibah tingkat wilayah yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Kuasa BUN di wilayah sebagai pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara di wilayah (data SAKUN). Sedangkan data realisasi Pendapatan dan Hibah yang dilaporkan UAPPA-W berfungsi sebagai penguji (kontrol) data Kuasa BUN.
- b. Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah berdasarkan kompilasi realisasi belanja yang dilaporkan oleh UAPPA-W, di mana kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Apabila, proses rekonsiliasi antara KPPN dan satker, serta rekonsiliasi antara UAPPA-W dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan dengan baik, angka yang dilaporkan oleh UAPPA-W akan sama dengan angka yang dilaporkan oleh Kanwil sebagai kuasa BUN. Apabila masih terdapat angka suspen, yaitu selisih antara angka UAPPA-W dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, maka angka realisasi Belanja Wilayah dapat menggunakan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh Kuasa BUN (data SAU/SAKUN). Angka tersebut berfungsi sebagai penguji (kontrol) data belanja UAPPA-W. Hal ini dimungkinkan karena LKPP wilayah disusun dalam rangka penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah, bukan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pemilihan penggunaan data SAU/SAKUN untuk belanja dilakukan dengan pertimbangan angka suspen yang terkecil.
- c. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tingkat wilayah tidak menyajikan angka realisasi Pembiayaan karena transaksi pembiayaan tidak dilakukan di wilayah, melainkan hanya dilakukan oleh BUN pusat.

2. Neraca Pemerintah Pusat tingkat Wilayah

Neraca Pemerintah Pusat tingkat wilayah disusun berdasarkan konsolidasi Neraca tingkat UAPPA-W dan Neraca tingkat Kuasa BUN. Perlakuan konsolidasi atas Neraca tingkat UAPPA-W dan Neraca Tingkat Kuasa BUN adalah sebagai berikut:

- a. Kas dan Setara meliputi Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas pada BLU.
- b. Angka Kas di KPPN diambil dari Neraca Tingkat Kuasa BUN. Angka Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas pada BLU diambil dari Neraca Tingkat UAPPA-W. Rekening Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Kas Lainnya yang telah disahkan ke KPPN dan Kas pada BLU yang telah disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan berupa SAL/SILPA.



- c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diambil dari Neraca Tingkat Kuasa BUN, disajikan dengan akun pasangan berupa SAL/SILPA.
 - d. Utang kepada Pihak Ketiga, diambil dari Neraca UAPPA-W, disajikan dengan akun pasangan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.
 - e. Kas pada Bendahara Penerimaan disajikan dengan akun pasangan Pendapatan yang Ditangguhkan.
 - f. Kas dan Kas Lainnya berupa hibah langsung berbentuk kas yang belum disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan Pendapatan yang Ditangguhkan.
 - g. Kas pada BLU yang belum disahkan ke KPPN disajikan dengan akun pasangan Dana Lancar BLU.
 - h. Piutang, Investasi Jangka Pendek, Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya, serta akun pasangan masing-masing sebagaimana yang diatur dalam jurnal standar, didasarkan pada Neraca UAPPA-W.
3. Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
- Laporan Operasional (LO) kertas kerja LKPP-TW disusun berdasarkan konsolidasi LO UAKPA Konsolidasian Tingkat Kanwil. Kebijakan penyusunan LO LKPP-TW adalah sebagai berikut:
- a. LO Kertas Kerja LKPP-TW hanya disusun dari data LK UAKPA Konsolidasian Tingkat Kanwil karena LK UAKKBUN Kanwil tidak memiliki LO.
 - b. Penyusunan LO Kertas Kerja LKPP-TW dilakukan dengan mengkonsolidasi seluruh Pendapatan-LO dan Beban, dan menambahkan hasil reklasifikasi Utang Pajak yang Belum Disetor Bendahara Pengeluaran ke Pendapatan Perpajakan-LO.
 - c. Walaupun pembayaran Transfer dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dilakukan secara terpusat, namun dataset yang diambil dari OMSPAN dan/atau erekon&LK untuk keperluan penyusunan LO-LKPP-TW juga berisi realisasi Transfer dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dalam wilayah kerja Kanwil. Atas realisasi transfer tersebut diakui belanja transfer maupun pendapatannya sehingga tidak mengakibatkan defisit.
4. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) kertas kerja LKPP-TW disusun dengan mengkonsolidasikan LPE UAKPA Konsolidasian Tingkat Kanwil dengan penyesuaian dari beberapa akun Neraca UAKKBUN Kanwil. Kebijakan penyusunan LPE LKPP-TW adalah sebagai berikut:
- a. Angka Ekuitas Awal pada LPE kertas kerja LKPP-TW merupakan Ekuitas akhir pada Neraca kertas kerja LKPP-TW pada periode pelaporan sebelumnya.
 - b. Surplus/Defisit LO pada LPE kertas kerja LKPP-TW merupakan Surplus/Defisit LO kertas kerja LKPP-TW.
 - c. Koreksi yang Menambah/Mengurangi merupakan pos untuk menampung selisih catatan kas antara UAKPA Konsolidasian dengan UAKBUN Daerah Tingkat Kanwil, Koreksi Kas Dalam Transito, serta koreksi lainnya.

- d. Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas merupakan pos untuk menampung reklasifikasi akun Uang Muka dari KPPN pada Neraca UAKPA Konsolidasian.
 - e. Transaksi Antar Entitas, seperti Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL), Transfer Masuk, Transfer Keluar, dan Pengesahan Hibah menggunakan angka dari LPE UAKPA Konsolidasian Tingkat Kanwil.
 - f. Ekuitas Akhir pada LPE kertas kerja LKPP-TW merupakan Ekuitas Akhir pada Neraca kertas kerja LKPP-TW.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
- Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2. Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

LKPD merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Lingkup penyajian laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah ini mencakup Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Neraca Konsolidasian dan Catatan atas LKPD Konsolidasian. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023, proses konsolidasi dilakukan terhadap 18 LKPD *unaudited*.

Dengan penyajian dimaksud, laporan konsolidasi menunjukkan aliran dana tunai yang masuk ke sektor pemerintahan baik yang berasal dari transfer pemerintah pusat maupun yang dihasilkan sendiri oleh pemerintah daerah di wilayah yang bersangkutan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laporan konsolidasi juga menunjukkan dana tunai yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Sumber data dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah tersebut adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam hal ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

Tabel 2. Data Pemerintah Daerah dalam Penyusunan LKPD Konsolidasian Tahun 2023 *Unaudited*

No	Pemerintah Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	Neraca	Laporan Operasional
1.	Provinsi Sumatera Selatan	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>		
2.	Kab. Musi Banyuasin	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>		
3.	Kab. Ogan Komering Ulu	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>		
4.	Kab. Muara Enim	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>		



5.	Kab. Lahat	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>
6.	Kab. Musi Rawas	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>
7.	Kab. Ogan Komering Ilir	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>
8.	Kab. Banyu Asin	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>
9.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>
10.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>
11.	Kab. Ogan Ilir	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>
12.	Kab. Empat Lawang	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>
13.	Kab. Pali	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>
14.	Kab. Musi Rawas Utara	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>
15.	Kota Palembang	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>
16.	Kota Prabumulih	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>
17.	Kota Pagar Alam	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>
18.	Kota Lubuk Linggau	LKPD Tahun 2023 <i>Unaudited</i>

Proses konsolidasi dilakukan sebagai berikut :

Berdasarkan data yang dihimpun, LKPD telah disajikan dalam format sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Nomor 050-5889 Tahun 2021. Proses konsolidasian disajikan dengan menjumlahkan LKPD dari 18 Pemerintah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum dilakukan konsolidasi dengan LKPP, diidentifikasi akun timbal-balik antar Pemerintah Daerah pada LKPD Konsolidasian, misalnya akun Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan akun Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Selanjutnya dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik tersebut

Proses konsolidasi tingkat nasional dilakukan dengan menjumlahkan transaksi-transaksi yang dianggap sama dan melakukan eliminasi untuk transaksi yang dianggap bersifat resiprokal antar Pemerintah Daerah. Eliminasi dilakukan dengan menggunakan angka yang dianggap lebih valid dalam pencatatannya, sebagai contoh untuk transaksi utang piutang antar Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan angka Pemerintah Daerah pemberi utang. Setelah tersusun LKPD Konsolidasian yang telah dapat teridentifikasi transaksi resiprokal antar Pemerintah Daerah, langkah berikutnya adalah menyusun LKPD Konsolidasian dengan menggunakan angka Pemerintah Pusat sebagai penyesuaian angka konsolidasian pos-pos transaksi yang memiliki sifat resiprokal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, angka penerimaan dana perimbangan pada LKPD Konsolidasian disesuaikan dengan menggunakan angka penyaluran dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.



a. **Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Wilayah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Penyusunan Laporan Keuangan konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Wilayah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan inisiasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Tujuan utama dalam penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian adalah dalam rangka memenuhi kewajiban transparansi fiskal oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Sesuai lingkup yang disebutkan di atas, maka melalui Laporan Keuangan Konsolidasian ini dapat dilihat peran pemerintah pusat dan daerah terhadap perekonomian wilayah yang bersangkutan. Guna mencapai tujuan tersebut, pendekatan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian ini dibuat dengan menyajikan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas per wilayah yang merupakan komponen utama yang mencerminkan kondisi fiskal daerah dari sektor pemerintahan.

Kebutuhan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dilakukan dalam rangka penerapan Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal, analisis kegiatan pemerintahan dan perbandingan antara negara (*cross country studies*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara butir 1.5 (Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran). Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah dalam rangka penyajian laporan statistik keuangan pemerintah dalam jangka panjang juga ditegaskan dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007. Dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional tersebut, Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur mengenai perlu diterbitkannya pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan bagi sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah juga dilakukan dalam rangka menjawab laporan hasil reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2010, yang mengungkapkan adanya kebutuhan untuk melakukan konsolidasi LKPP dengan LKPD dalam rangka kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah dan ketersediaan informasi bagi publik. Menurut hasil reviu tersebut, secara umum, pemerintah telah melakukan upaya untuk berkomitmen dalam menyediakan informasi fiskal kepada publik. Namun demikian, pemerintah belum sepenuhnya dapat menyajikan informasi fiskal mengenai, antara lain, integrasi posisi fiskal nasional (integrasi LKPP dengan LKPD) sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan belum terlihat.

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari entitas-entitas pelaporan yang independen satu terhadap yang lainnya. Kondisi independen tersebut berlaku dalam hubungan antara LKPP dan LKPD, walaupun dalam hubungan keuangan melalui mekanisme desentralisasi fiskal, peran Pemerintah Pusat masih sangat dominan atas pendapatan daerah



dalam bentuk transfer. Kondisi independen dalam pertanggungjawaban tersebut telah sesuai dengan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 3 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 menyatakan “Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara menyerahkan kepada gubernur/bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah”.

Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah tidak dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi lebih pada tujuan transparansi fiskal. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan. Sesuai dengan PSAP nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2023 mencakup:

a. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Angka yang dikonsolidasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian ini adalah angka realisasi anggaran baik untuk LRA Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian ini tidak mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyusunan laporan konsolidasi ini, realisasi per jenis belanja Pemerintah Pusat disajikan berdasarkan data BUN (SAU/SAKUN) sehingga tidak disajikan angka suspen belanja.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan
Pendapatan dan belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah merupakan transaksi yang sejenis sehingga akun pendapatan Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun pendapatan pemerintah daerah, dan akun belanja Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun belanja pemerintah daerah. Walaupun masih terdapat perbedaan dalam klasifikasi antara pendapatan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, namun perbedaan tersebut dapat diatasi melalui konversi dan *mapping* antara akun di Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Tidak dilakukan konsolidasi atas akun pembiayaan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah karena tidak ada transaksi pembiayaan Pemerintah Pusat di daerah.
- Melakukan identifikasi akun timbal balik untuk dieliminasi
Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, yang merupakan akun yang terjadi akibat transaksi antar Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

b. Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah



Konsolidasi Neraca Pemerintah dilakukan dengan menggabungkan neraca pemerintah pusat dengan neraca pada 18 pemerintah daerah yang ada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan Neraca Konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan
Secara umum, aset dan kewajiban Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah merupakan transaksi yang sejenis sehingga akun aset Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun aset pemerintah daerah, dan akun kewajiban Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun kewajiban pemerintah daerah kecuali untuk akun aset dan kewajiban yang terjadi karena transaksi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang harus dieliminasi.
- Melakukan identifikasi akun timbal balik untuk dieliminasi
Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Neraca Konsolidasian, yang berupa akun aset dan kewajiban yang terjadi karena transaksi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, yaitu akun utang-piutang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

c. Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Laporan Operasional konsolidasian disusun antara Laporan Operasional pemerintah pusat dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah. Penyusunan Laporan Operasional dilakukan dengan :

- Melakukan identifikasi transaksi dan akun sejenis untuk dijumlahkan
Pendapatan LO dan Beban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan akun sejenis dapat dijumlahkan. Walaupun masih terdapat perbedaan BAS Pendapatan LO dan Beban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perbedaan tersebut diatasi melalui konversi dan mapping.
- Melakukan identifikasi Akun resiprokal untuk dieliminasi
Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Laporan Operasional Konsolidasian Tingkat Wilayah yang merupakan akun yang terjadi akibat transaksi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

d. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Secara umum pos-pos yang disajikan pada LPE Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sejenis sehingga proses konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan akun pada laporan tersebut yaitu Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Koreksi yang menambah/mengurangi, Transaksi antar entitas, Keuntungan/Kerugian yang belum terealisasi, Koreksi karena *double* pencatatan, reklasifikasi Kewajiban ke ekuitas dan ekuitas akhir.

e. Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Analisis dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian dilakukan dengan pendekatan:



- Analisis per jenis belanja per kabupaten dilengkapi dengan indikator ekonomi makro per wilayah.
- Analisis belanja per fungsi yang dilakukan dengan:
 - Merinci belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah per fungsi. Data belanja per fungsi Pemerintah Pusat diambil dari sistem akuntansi pemerintah pusat.
 - Realisasi belanja per fungsi untuk pemerintah daerah dapat diambil dari LKPD.
 - Analisis dilakukan terhadap komposisi belanja per fungsi.
- Analisis per jenis pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas serta akun Laporan Arus Kas per tahun dan antar tahun.

Tabel 3. Mapping Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tahun 2022

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Konsolidasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	A. Pendapatan Asli Daerah	Dijumlahkan
I. Pendapatan Perpajakan		
1. Pajak Dalam Negeri	1. Pendapatan Pajak Daerah	
2. Pajak Perdagangan Internasional		
II. Pendapatan Negara Bukan Pajak		
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3. Pendapatan Retribusi Daerah	Dieliminasi dan dijumlahkan
	4. Lain-lain PAD yang Sah	
III. Pendapatan Hibah	B. Lain-lain Pendapatan yang Sah	
	1. Pendapatan Hibah	
	C. Pendapatan Transfer	Dieliminasi
	1. Dana Perimbangan	
	a. Dana Bagi Hasil	
	b. Dana Alokasi Umum	
	c. Dana Alokasi Khusus	
	2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	
	a. Dana Otonomi Khusus	
	b. Dana Insentif Daerah	
	c. Dana Keistimewaan DIY	
	3. Dana Desa	
B. Belanja Negara		
I. Belanja Pemerintah Pusat	Belanja Pemerintah Daerah	
1. Belanja Pegawai	1. Belanja Pegawai	Dijumlahkan
2. Belanja Barang	2. Belanja Barang	
3. Belanja Modal	3. Belanja Modal	
4. Pembayaran Bunga Utang	4. Pembayaran Bunga Utang	Dijumlahkan dan Dieliminasi
5. Subsidi	5. Subsidi	Dijumlahkan
6. Bantuan Sosial	6. Bantuan Sosial	
7. Belanja Lain-lain	7. Belanja Lain-lain	
8. Hibah	8. Hibah	Dijumlahkan dan Dieliminasi



Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Konsolidasi
II. Transfer ke Daerah		Dieliminasi
1. Dana Perimbangan		
a. Dana Bagi Hasil		
b. Dana Alokasi Umum		
c. Dana Alokasi Khusus		
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian		
a. Dana Otonomi Khusus		
b. Dana Insentif Daerah		
c. Dana Keistimewaan DIY		
3. Dana Desa		
Pembiayaan Dalam Negeri		Dijumlahkan
1. Rekening Pemerintah	1. SILPA TA Sebelumnya	
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Dieliminasi dan dijumlahkan
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	3. Hasil Penjualan Kekayaan Negara yang Dipisahkan	Dijumlahkan
4. Surat Berharga Negara (Neto)		
5. Pinjaman Dalam Negeri	4. Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Dieliminasi dan dijumlahkan
6. Penyertaan Modal Negara dan Daerah/Dana Investasi Pemerintah	5. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Dijumlahkan
7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	6. Dana Cadangan	
	7. Pembayaran pokok Utang	Dieliminasi dan dijumlahkan
	8. Pemberian Pinjaman	Dijumlahkan
Pembiayaan Luar Negeri (Neto)		
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)		
a. Penarikan Pinjaman Program		
b. Penarikan Pinjaman Proyek		
2. Penerusan Pinjaman		Dieliminasi dan dijumlahkan
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri		

A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN ELIMINASI AKUN TIMBAL BALIK

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara/Daerah (KUN/D) atau dikeluarkan dari KUN/D. Sedangkan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN/D.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tingkat Wilayah Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (lampiran I). Penyusunan dan penyajian LKPD Konsolidasian Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (lampiran I) melalui Buletin Teknis Nomor 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai dengan SAP dengan Konversi. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP Tingkat Wilayah dan LKPD telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP dan LKPD adalah:

- **Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN/D yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN/D. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

- **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran KUN/D yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN/D. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada pemerintah pusat, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja disajikan pada tampilan muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja disajikan menurut fungsi.

- **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN/D serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN/D atau terjadinya pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan oleh BUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)

- **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

- **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- **Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

- **Bagan Akun Standar**

Pos-pos yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN Tahun 2022 adalah berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 dan peraturan perubahannya. Pos-pos yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2022 adalah berdasarkan bagan akun standar (kode akun) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perubahannya.

Kebijakan eliminasi akun timbal balik yang diterapkan dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah:

- a. Eliminasi akun timbal balik

Akun timbal balik adalah akun yang terjadi akibat transaksi antar entitas pelaporan, dalam hal ini antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Eliminasi akun timbal balik dilakukan dengan jumlah yang sama pada Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian dan Neraca Konsolidasian.

- b. Eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya

Akun timbal balik dengan jumlah yang tidak sama dapat disebabkan oleh banyak hal seperti perbedaan waktu pencatatan dan kesalahan pencatatan. Mengingat prosedur rekonsiliasi dan verifikasi akun timbal balik yang belum tersedia, eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya dilakukan dengan mengeliminasi akun timbal balik berdasarkan jumlah masing-masing. Contoh eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya adalah akun Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Daerah dengan Belanja Transfer Dana Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat.

- c. Eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya



Pada konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah terdapat beberapa akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal seperti perbedaan angka akun timbal balik, tidak ada laporan keuangan desa yang dikonsolidasikan, dan tidak ditemukan akun timbal balik dari akun yang seharusnya dieliminasi. Mengingat prosedur rekonsiliasi dan verifikasi akun timbal balik yang belum tersedia dan mempertimbangkan manfaat penyajian akun tersebut pada laporan keuangan konsolidasi, maka eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya dilakukan dengan mengeliminasi akun tersebut sebesar jumlahnya. Contoh akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya yaitu Bagian Lancar Utang ke Pemda Lainnya dan Utang Dalam Negeri-Pemda Lainnya pada Neraca Konsolidasian pemerintah daerah.

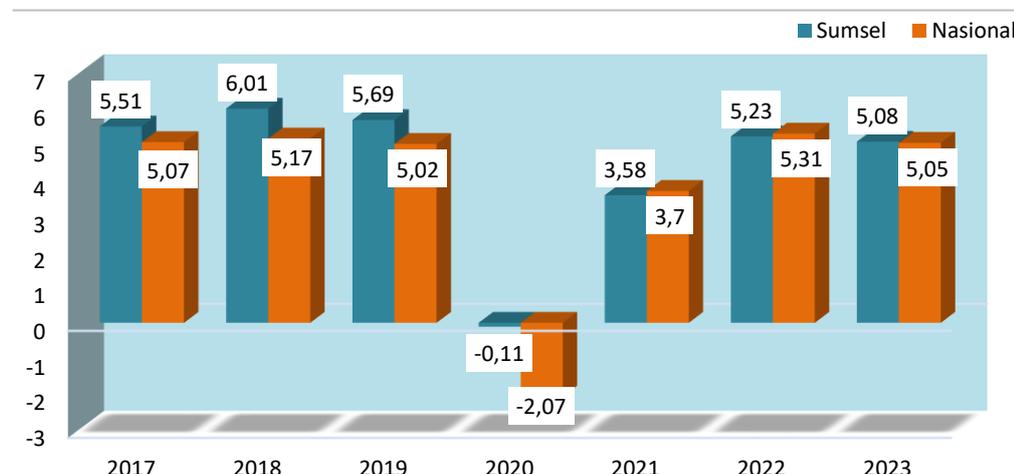
A.4. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO TINGKAT WILAYAH TAHUN 2023

A.4.1. PRODUK DOMESTIK BRUTO

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2023 tumbuh sebesar 5,08 persen (CtC), mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun 2022 yang sebesar 5,23 persen (CtC).

Grafik 8 Pertumbuhan Ekonomi Sumsel (1%)



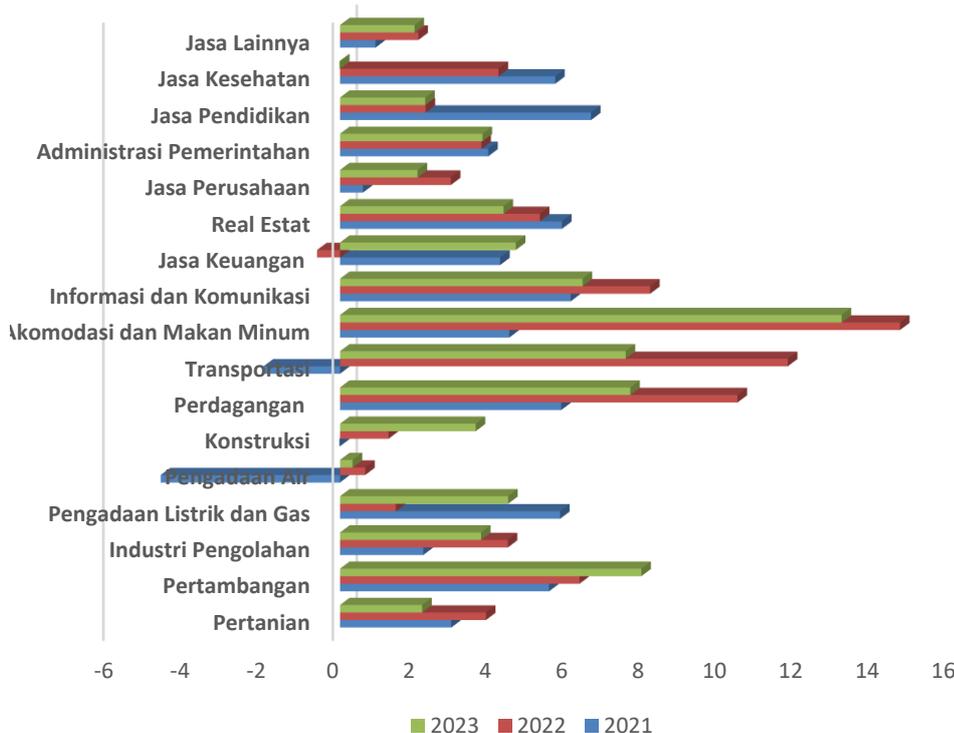
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tahun 2023 sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05 persen (CTC) dan tertinggi kedua di regional Sumatera setelah Kepulauan Riau yang tumbuh sebesar 5,20 persen (CtC)

b. Nominal PDRB

1) PDRB Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif kecuali sektor jasa kesehatan yang tumbuh negatif sebesar 0,02 persen (CtC). Kondisi yang baik tersebut mengindikasikan bahwa roda perekonomian di berbagai sektor ekonomi Sumsel sudah semakin pulih setelah dipengaruhi kondisi pandemi.

Grafik 9 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha



PDRB sisi Lapangan Usaha ini terdiri dari beberapa sektor, dan sektor Pertambangan menjadi kontributor terbesar PDRB Sumsel 2023 yang tumbuh mencapai 7,89 persen (CtC), lebih tinggi dari tahun 2022 yang tumbuh sebesar 6,28 persen (CtC). Kinerja sektor pertambangan Sumsel tahun 2023 dipengaruhi oleh kinerja subsektor pertambangan batubara dan lignit yang tumbuh 19,30 persen karena tingginya harga dan permintaan atas komoditas tersebut. Pertumbuhan sektor pertambangan ini juga mendorong pertumbuhan industri pengolahan batubara yang pada tahun 2023 tumbuh sebesar 3,61% (CtC).

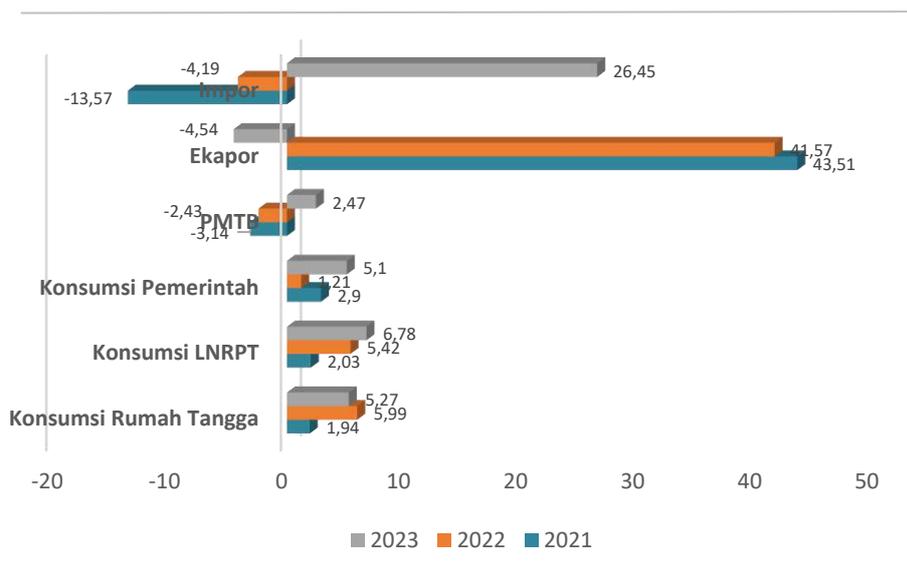
Mobilitas penduduk yang meningkat di tahun 2023 setelah mengalami pandemi sampai dengan pertengahan tahun 2022 menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan di beberapa sektor lapangan usaha seperti sektor perdagangan, transportasi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-masing tumbuh sebesar 7,60% (CtC), 7,48% (CtC) dan 13,14% (CtC). Peningkatan pada sektor tersebut juga mendorong pertumbuhan pada industri pengolahan makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 5,89% (CtC).

Sektor pertanian yang menjadi sektor penyerap terbesar tenaga kerja Sumsel tumbuh sebesar 2,15% (CtC). Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh subsektor tanaman perkebunan yang tercatat tumbuh sebesar 5,04% (CtC).

2) PDRB Sisi Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi pendorong utama perekonomian Sumsel, tercatat tumbuh sebesar 5,27% (CtC) di tahun 2023. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), laju inflasi yang terkendali, dan meningkatnya mobilitas masyarakat merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsumsi rumah tangga tersebut. Selain itu, baiknya perkembangan konsumsi rumah tangga Sumsel tidak terlepas dari peran pemerintah yang terus menjaga daya beli masyarakat melalui APBN seperti kebijakan pemberian bantuan sosial berupa bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino untuk merespon kenaikan harga beras yang terjadi akibat dampak El Nino.

Grafik A10 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha



Konsumsi pemerintah Sumsel tahun 2023 tumbuh positif sebesar 5,1% (CtC). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 1,21% (CtC). Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong utama tumbuhnya konsumsi pemerintah di Sumsel tersebut adalah adanya peningkatan alokasi belanja pemerintah pusat dan daerah yang digunakan untuk peningkatan pelayanan publik dan persiapan pemilihan umum.

Pada tahun 2023 Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPRT) tumbuh positif sebesar 6,78% (CtC). Peningkatan aktivitas partai politik di tahun pemilihan umum menjadi faktor utama yang mempengaruhi Konsumsi LNPRT tersebut.

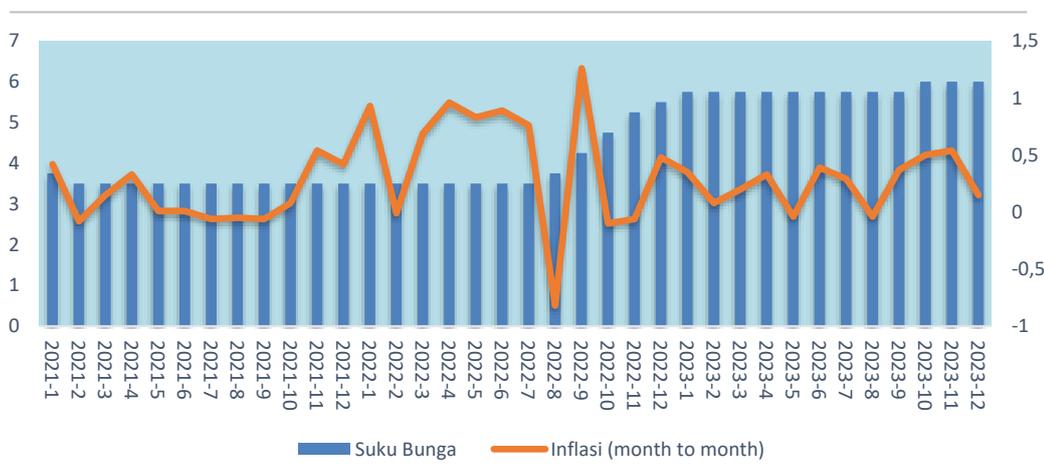
Setelah mengalami kontraksi di tahun 2022, kinerja investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Sumsel tahun 2023 berhasil mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,47% (CtC). Pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional, seperti pembangunan bendungan Tiga dihaji, jalan tol Betung - Bayung Lencir, jaringan irigasi Lematang, dan Lempuing, menjadi faktor pendorong tumbuhnya kegiatan investasi di Sumsel.

A.4.2. SUKU BUNGA

Suku bunga merupakan faktor penting dalam perekonomian suatu negara karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan suatu perekonomian. Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016 menggantikan BI Rate. Pergerakan BI7DRR mengalami tren meningkat sepanjang tahun 2023. Pada tahun 2022, tingkat suku bunga mencapai 5,5 persen dan terus bergerak naik menjadi 6 persen pada akhir tahun 2023. Keputusan kenaikan suku bunga acuan ini sejalan dengan perlunya menjaga tingkat inflasi guna mengatur stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

Di tengah naiknya suku bunga acuan, tingkat inflasi Sumatera Selatan (*month to month*) masih menunjukkan perubahan yang cukup fluktuatif pada tahun 2023, peran pemerintah diperlukan dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan melakukan operasi pasar, menjaga kecukupan pasokan dan ketersediaan barang sehingga dapat menekan laju inflasi.

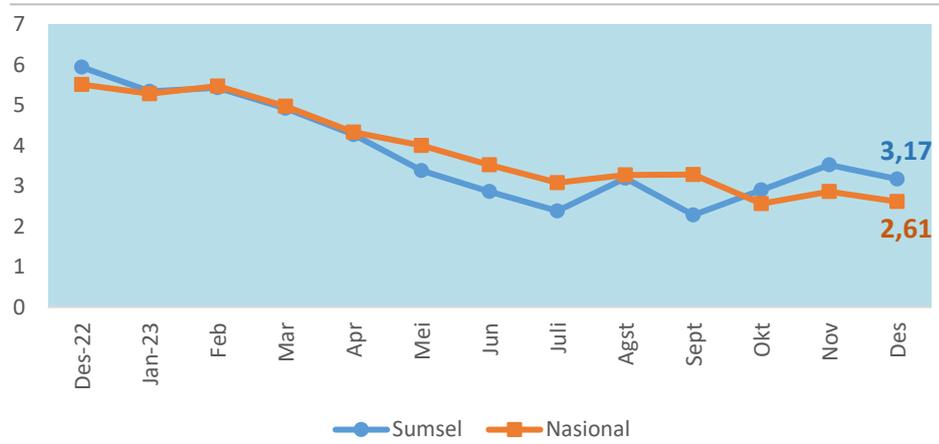
Grafik 11
Perbandingan BI7DRR dan Tingkat Inflasi Sumsel



A.4.3. INFLASI

Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus atau suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum. Menurut Sukirno (2000), inflasi sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian karena tingkat inflasi mempengaruhi produksi dalam negeri dan produksi barang ekspor. Pada tahun 2023, Inflasi Sumsel tercatat sebesar 3.17 persen (yoy), masih terkendali namun lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,94 persen (yoy) dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional tahun 2023 yang sebesar 2,61 persen (yoy).

Grafik 12 Laju Inflasi tahun 2023 (% yoy)



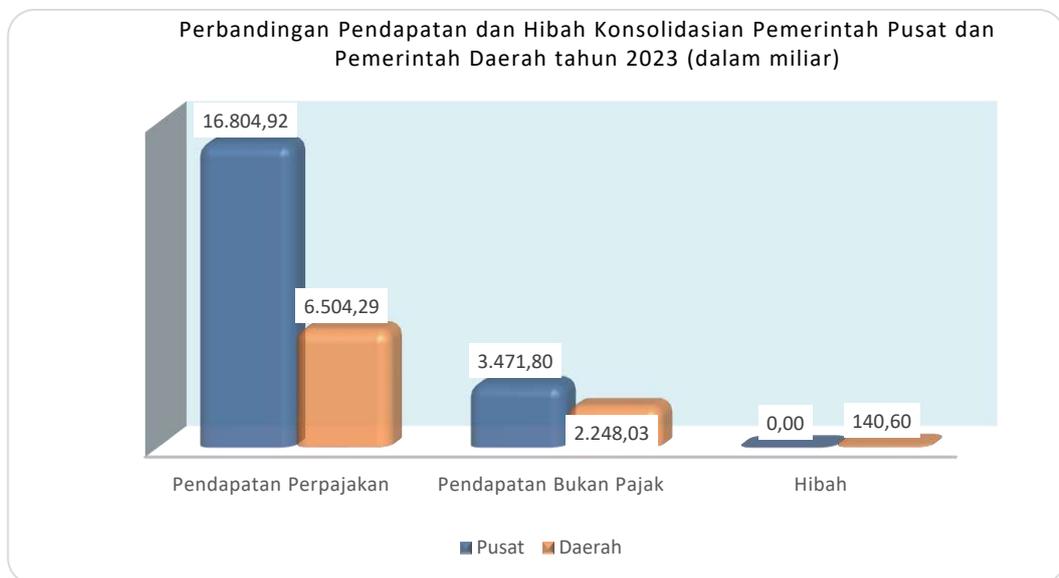
Banyak faktor yang mempengaruhi laju Inflasi Sumsel sepanjang 2023, yang paling dominan dipengaruhi oleh kenaikan harga pada beberapa komoditas volatile food, seperti beras, cabai merah, dan bawang putih, yang mengalami gangguan pasokan akibat adanya fenomena El Nino. Sementara itu, pada komponen *administered price*, peningkatan tarif air minum PDAM dan kenaikan harga rokok kretek filter menjadi pendorong utama dari laju inflasi. Di sisi lain, pergerakan inflasi pada komponen inti cenderung stabil, dengan kenaikan harga emas sebagai komoditas pendorong inflasi.

B. CATATAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH TAHUN ANGGARAN 2023

B.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN TAHUN ANGGARAN 2023

1. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2023, Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Tingkat Wilayah mencapai Rp29.169.729.815.937 yang merupakan Pendapatan dan Hibah Pemerintah Pusat Rp20.276.734.573.405,00 dan Pendapatan dan Hibah Pemerintah Daerah Konsolidasian Rp39.017.814.635.911,20 setelah eliminasi akun resiprokal sebesar Rp30.124.819.393.378,90. Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tersebut berasal dari konsolidasi Pendapatan Perpajakan, konsolidasi Pendapatan Bukan Pajak, dan konsolidasi Pendapatan Hibah, sedangkan pendapatan transfer pemerintah daerah dieliminasi dengan belanja transfer pemerintah pusat yaitu sebesar Rp30.124.819.393.378,90. Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.649.513.734.514 atau 6,0 persen jika dibanding dengan tahun 2022.



Grafik 13. Perbandingan Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda TA 2023

Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.309.222.171.057 terdiri dari Pajak Dalam Negeri konsolidasian sebesar Rp23.012.226.694.725 dan Pajak Perdagangan Internasional konsolidasian sebesar Rp296.995.476.332. Pendapatan Perpajakan Konsolidasian terdiri Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat sebesar Rp16.804.928.797.437,00 dan Pajak Daerah sebesar Rp6.504.293.373.619,96. Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun Anggaran 2023 meningkat Rp936.321.033.667 atau 4,2 persen dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun Anggaran 2022.



Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian sebesar Rp5.719.843.112.303, yang terdiri dari Bagian Pemerintah atas laba BUMN/D sebesar Rp452.312.073.909, Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp2.345.322.203.217 dan Pendapatan BLU sebesar Rp2.922.208.835.178.

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Konsolidasian merupakan Bagian Pemerintah atas Laba BUMD yang merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meningkat sebesar Rp139.357.037.185 atau 44,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya Konsolidasian terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan sebesar Rp65.648.814.635,19, Pendapatan Jasa sebesar Rp655.515.565.733,85, Pendapatan Bunga sebesar Rp42.602.146.288,67, Pendapatan Pendidikan sebesar Rp43.327.846.775,00, Pendapatan luran dan Denda sebesar Rp142.240.004.046,20 dan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp1.395.987.825.738,25. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Konsolidasian Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar minus Rp1.037.918.460.169 atau 79,4 persen dibandingkan dengan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Konsolidasian Tahun Anggaran 2022.

Tabel 4 Perbandingan Pendapatan PNPB Lainnya tahun 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	65.648.814.635,19	58.206.758.557	12,79%
Pendapatan Jasa	655.515.565.733,85	644.032.074.440	1,78%
Pendapatan Bunga	42.602.146.288,67	12.377.582.310	244,19%
Pendapatan Pendidikan	43.327.846.775,00	122.124.606.851	-64,52%
Pendapatan luran dan Denda	142.240.004.046,20	168.906.400.492	-15,79%
Pendapatan Lain-lain	1.395.987.825.738,25	301.756.320.399	362,62%
Jumlah	2.345.322.203.217,16	1.307.403.743.048	79,39%

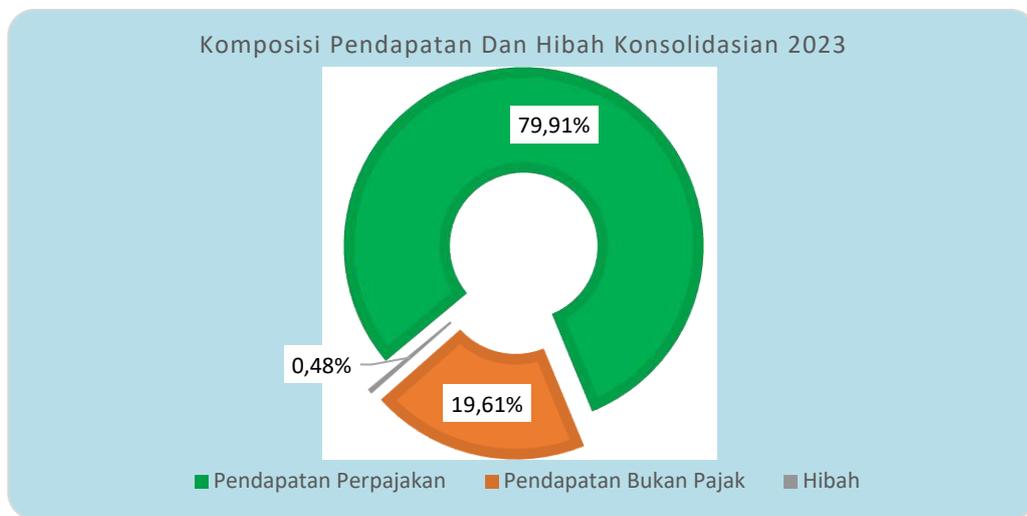
Pendapatan BLU Konsolidasian Tahun 2023 sebesar Rp2.922.208.835.178 merupakan Pendapatan Jasa Layanan Umum Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.784.919.062.559,00 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp1.137.289.772.618,61. Pendapatan BLU Konsolidasian terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU Pemerintah sebesar Rp2.808.911.851.031,61, Pendapatan Hibah BLU sebesar Rp2.296.377.402,00, Pendapatan Hasil Kerjasama BLU sebesar Rp33.433.420.979,00, Pendapatan dari Alokasi APBN sebesar Rp34.888.165.608,00 dan Pendapatan BLU Lainnya sebesar Rp42.679.020.157,00. Pendapatan BLU Konsolidasian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp227.351.944.442 atau 8,4% persen dibanding dengan tahun 2022.

Tabel 5 Perbandingan Pendapatan BLU tahun 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	2.808.911.851.031,61	2.510.488.982.558	11,89%
Pendapatan Hibah BLU	2.296.377.402,00	3.000.000	76445,91%
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	33.433.420.979,00	31.784.140.818	5,19%
Pendapatan dari Alokasi APBN	34.888.165.608,00	120.841.811.694	-71,13%
Pendapatan BLU lainnya	42.679.020.157,00	31.738.955.666	34,47%

Uraian	TA 2023	TA 2022	%
Jumlah	2.922.208.835.177,61	2.694.856.890.736	8,44%

Pendapatan Hibah Konsolidasian Tahun 2023 senilai Rp140.664.532.577 merupakan Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah. Pendapatan Hibah Konsolidasian Tahun 2023 turun sebesar minus Rp542.335.224.489 atau 79,4 persen dibanding dengan Pendapatan Hibah Konsolidasian Tahun Anggaran 2022



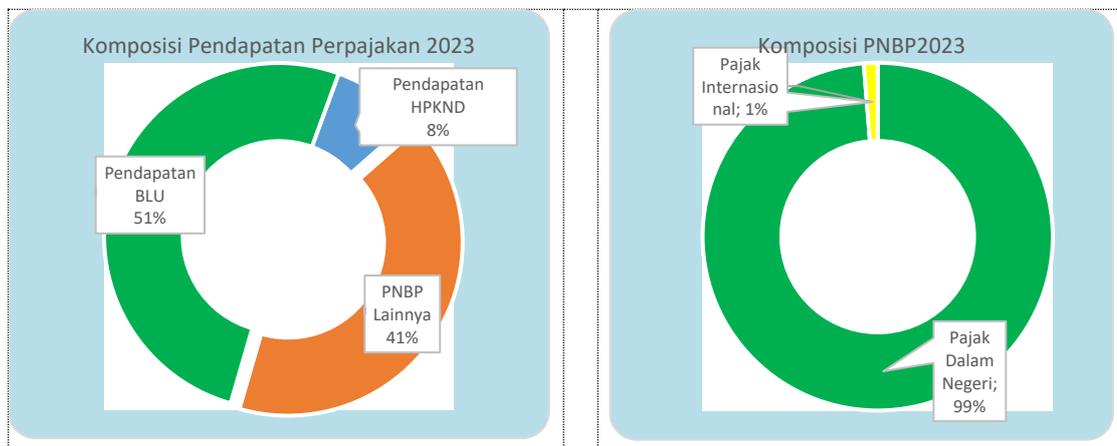
Grafik 14. Komposisi Pendapatan Konsolidasian TA 2023

Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tahun 2023 didominasi oleh Pendapatan Perpajakan, yaitu sebesar 79,91 persen dari seluruh Pendapatan dan Hibah Konsolidasian, diikuti oleh Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian sebesar 19,61 persen dan Pendapatan Hibah sebesar 0,48 persen. Struktur Pendapatan dan Hibah Konsolidasian ini hampir serupa jika dibandingkan dengan struktur Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tahun 2022. Pendapatan dan Hibah Konsolidasian tahun 2022 didominasi oleh Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar 81,30 persen, yang diikuti dengan Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian sebesar 16,22 persen dan Pendapatan Hibah 2,48 persen.

Pendapatan Pajak tahun 2023 merupakan pendapatan yang sangat dominan dalam struktur Pendapatan dan Hibah. Hal ini didorong oleh berbagai kebijakan dan langkah-langkah reformasi di bidang perpajakan dan juga pandemi COVID-19 yang sudah pulih sehingga geliat dunia usaha sudah dapat kembali berjalan dengan normal. Walaupun pemerintah juga mengupayakan peningkatan Pendapatan Bukan Pajak, pemerintah juga terus menjaga kesinambungan Pendapatan Perpajakan dalam struktur pendapatan negara.

Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian tahun 2023 sebesar 19,61 persen dari total Pendapatan dan Hibah Konsolidasian. Komposisi Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian didominasi Pendapatan BLU sebesar 51,09 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 41,00 persen dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan sebesar 7,91 persen.

Pendapatan Hibah Konsolidasian tahun 2023 sebesar Rp140.664.532.577 atau 0,48 persen dari total Pendapatan dan Hibah Konsolidasian. Pendapatan Hibah Konsolidasian tahun 2023 turun sebesar minus Rp542.335.224.489 atau 79,4 persen dibandingkan dengan Pendapatan Hibah Konsolidasian Tahun Anggaran 2022.



Grafik 15. Perbandingan Komposisi Pendapatan Perpajakan Konsolidasian dan Komposisi Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian TA 2023

Transfer dari Pemerintah Pusat pada TA 2023 menyumbang Rp27.185.779.737.707,00 dari seluruh pendapatan daerah sebesar Rp39.017.814.635.911,20. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan transfer dari Pemerintah Pusat TA 2022 sebesar Rp330.420.153.763. Jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat tersebut dieliminasi dengan belanja transfer ke daerah sehingga pada pendapatan konsolidasian pos akun pendapatan transfer dari pemerintah pusat bersaldo nihil

Tabel 6. Pendapatan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan 2022

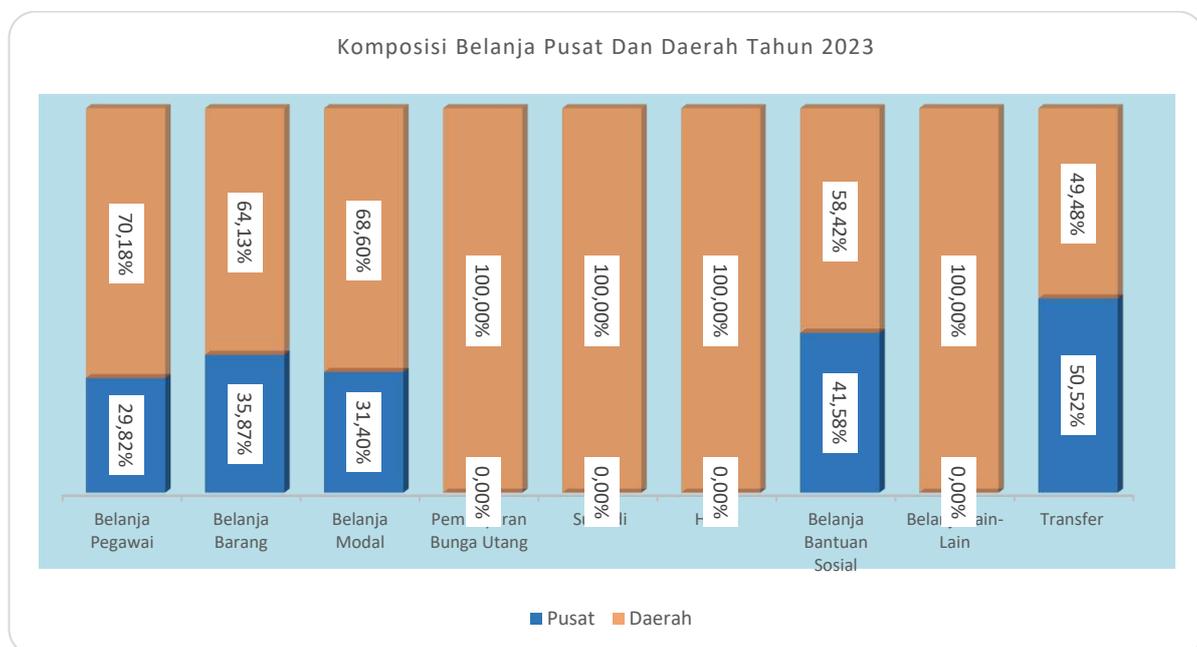
URAIAN	Konsolidasi			
	2023 (Dalam Rupiah)	%	2022 (Dalam Rupiah)	%
A. Pendapatan dan Hibah				
I. Pendapatan Perpajakan	23.309.222.171.057	79,91%	22.372.901.137.390	81,30%
1. Pajak Dalam Negeri	23.012.226.694.725	78,89%	21.776.105.118.611	79,13%
2. Pajak Perdagangan Internasional	296.995.476.332	1,02%	596.796.018.779	2,17%
II. Pendapatan Bukan Pajak	5.719.843.112.303	19,61%	4.464.315.186.967	16,22%
1. Pendapatan Sumber Daya Alam			-	
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN/D	452.312.073.909	1,55%	312.955.036.724	1,14%
3. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya	2.345.322.203.217	8,04%	1.307.403.743.048	4,75%
b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya				
d. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA				



7. Bantuan Keuangan			149.099.516.458	0,54%
8. Pendapatan BLU	2.922.208.835.178	10,02%	2.694.856.890.736	9,79%
III. Hibah	140.664.532.577	0,48%	682.999.757.066	2,48%
1. Pendapatan Hibah Dalam Negeri			682.999.757.066	2,48%
2. Pendapatan Hibah Luar Negeri	140.664.532.577	0,48%	-	
Jumlah Pendapatan dan Hibah	29.169.729.815.937		27.520.216.081.423	

2. BELANJA DAN TRANSFER KONSOLIDASIAN

Belanja dan Transfer Konsolidasian tahun 2023 sebesar Rp60.136.239.958.176 yang terdiri dari Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 50.564.386.446.674,00 dan Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp 39.696.672.904.880,50 setelah dikurangi dengan eliminasi sebesar Rp30.124.819.393.378,90. Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat berkontribusi sebesar 33,99 persen dari total Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian, sedangkan sisanya 66,01 persen merupakan Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah.

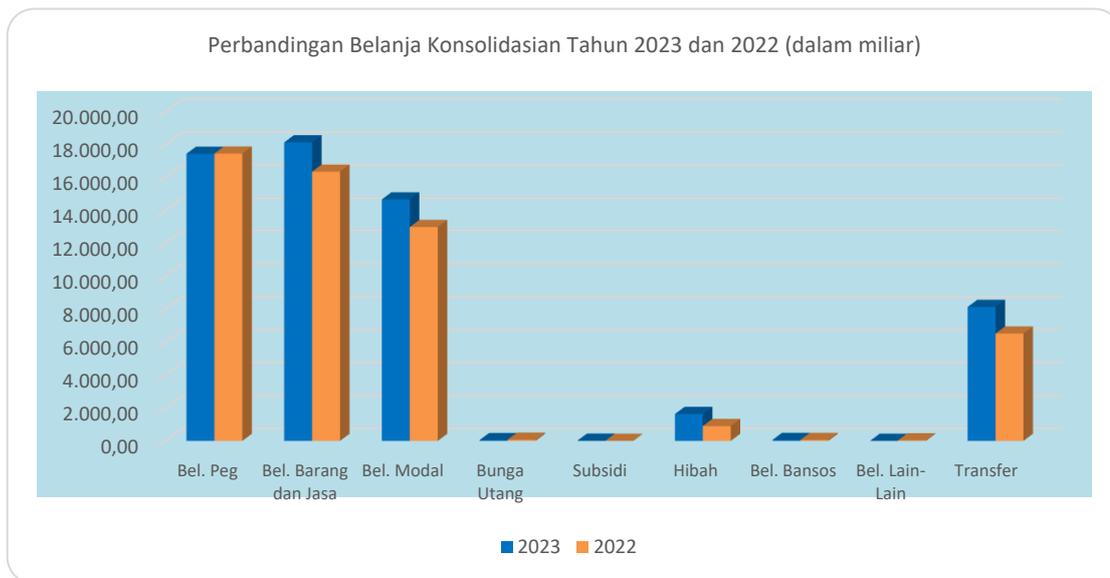


Grifik 16. Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Jenis Belanja TA 2023

Belanja dan Transfer Konsolidasian tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.749.637.625.796 atau 10,6 persen jika dibandingkan dengan Belanja dan Transfer Konsolidasian tahun 2022 yang sebesar Rp54.386.602.332.380. Belanja Pemerintah dan Transfer Konsolidasian tahun 2023 terdiri dari Belanja Pegawai Konsolidasian sebesar Rp17.433.827.632.855, Belanja Barang dan Jasa Konsolidasian sebesar Rp18.125.437.694.048, Belanja Modal Konsolidasian sebesar Rp14.664.572.068.286, Belanja Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian sebesar Rp54.788.194.668, Belanja Subsidi Konsolidasian sebesar Rp15.920.009.714, Belanja Hibah Konsolidasian sebesar Rp1.637.671.392.172, Belanja Bantuan



Sosial Konsolidasian Rp60.726.782.000, Belanja Lain-lain Konsolidasian sebesar Rp5.924.002.538, dan Belanja Transfer Konsolidasian sebesar Rp8.137.372.181.895.



Grafik 17. Perbandingan Belanja Pemerintah Konsolidasian berdasarkan Jenis Belanja TA 2023 dan TA 2022

Belanja Pegawai Konsolidasian tahun 2023 sebesar Rp17.433.827.632.855 mengalami penurunan sebesar minus Rp15.597.880.880 atau 0,09 persen jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai Konsolidasian tahun 2022 yang sebesar Rp17.449.425.513.735. Belanja Barang Konsolidasian tahun 2023 sebesar Rp18.125.437.694.048 mengalami kenaikan sebesar Rp1.781.129.802.593 atau sebesar 10,90 persen jika dibandingkan dengan Belanja Barang Konsolidasian tahun 2022 yang sebesar Rp16.344.307.891.455. Belanja Modal Konsolidasian tahun 2023 sebesar Rp14.664.572.068.286 mengalami kenaikan sebesar Rp1.678.054.259.029 atau 12,2 persen jika dibandingkan dengan Belanja Modal Konsolidasian tahun 2022 sebesar Rp12.986.517.809.257.

Sedangkan alokasi kewajiban Pembayaran Bunga Utang dilakukan Pemerintah dalam memenuhi kewajiban Pembayaran Bunga Utang secara tepat waktu seperti pemanfaatan dan pengelolaan utang akan dilakukan secara bijaksana, agar beban pembayaran bunga cicilan pokok utang di masa-masa mendatang tetap dalam batas kemampuan ekonomi. Belanja Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian tahun 2023 senilai Rp54.788.194.668 atau turun 27,18 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp75.241.908.379. APBN sebagai piranti kebijakan Pemerintah yakni memiliki fungsi stabilisasi antara lain digunakan untuk penyediaan berbagai jenis subsidi baik berupa subsidi harga barang-barang kebutuhan pokok (*price subsidies*), maupun subsidi ke objek sasaran (*targeted subsidies*). Belanja Subsidi Konsolidasian tahun 2023 mencapai Rp15.920.009.714 mengalami kenaikan sebesar Rp8.166.828.727 atau 105,34 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp7.753.180.987. Belanja Hibah Konsolidasian pada tahun 2023 sebesar Rp1.637.671.392.172 meningkat sebesar Rp733.694.120.630 atau 81,16 persen jika dibandingkan dengan Belanja Hibah Konsolidasian pada tahun 2022. Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian di tahun 2023 sebesar Rp60.726.782.000 menurun sebesar minus



Rp1.656.018.683 atau 2,65 persen jika dibandingkan dengan Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian pada tahun 2022 sebesar Rp62.382.800.683. Belanja Lain-Lain Konsolidasian pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp5.924.002.538, turun sebesar minus Rp29.715.608.154 atau 83,38 persen dibanding dengan 2022. Selanjutnya, Belanja Transfer Konsolidasian tahun 2023 sebesar Rp8.137.372.181.895, naik sebesar Rp1.616.015.836.246 atau 24,78 persen dibanding tahun 2022. Belanja Transfer tersebut merupakan Belanja Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah dan Dana Desa yang tidak habis tereliminasi dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp4.110.709.092.579 dan Belanja Transfer Pemerintah Daerah Rp4.026.663.089.316. Rincian secara detil komponen terbesar Belanja Pemerintah Konsolidasian dielaborasi di Boks 1.

Tabel 7. Belanja Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023 dan 2022 (Dalam Rupiah)

Belanja Pemerintah	Konsolidasi			
	2023	%	2022	%
1. Belanja Pegawai	17.433.827.632.855	28,99%	17.449.425.513.735	32,08%
2. Belanja Barang/Jasa	18.125.437.694.048	30,14%	16.344.307.891.455	30,05%
3. Belanja Modal	14.664.572.068.286	24,39%	12.986.517.809.257	23,88%
4. Pembayaran Bunga Utang	54.788.194.668	0,09%	75.241.908.379	0,14%
5. Subsidi	15.920.009.714	0,03%	7.753.180.987	0,01%
6. Hibah	1.637.671.392.172	2,72%	903.977.271.542	1,66%
7. Bantuan Sosial	60.726.782.000	0,10%	62.382.800.683	0,11%
8. Belanja Lain-lain	5.924.002.538	0,01%	35.639.610.692	0,07%
9. Transfer	8.137.372.181.895	13,53%	6.521.356.345.649	11,99%
Total	60.136.239.958.176		54.386.602.332.380	

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan instrumen penting bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal, untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip desentralisasi fiskal yang dianut oleh Pemerintah adalah mengurangi *vertical fiscal imbalance* dan *horizontal fiscal imbalance*, meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi gap pelayanan publik antar daerah, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional, penegakan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan alokasi transfer ke daerah, dan mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi secara makro. Realisasi transfer ke daerah dan dana desa pemerintah pusat tahun 2023 mencapai Rp34.235.528.485.958 atau naik Rp1.723.196.973.673, atau 5,3 persen, dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp32.512.331.512.285. Realisasi transfer ke daerah dan dana desa tersebut terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp31.416.083.863.568, Dana Insentif Daerah Rp250.140.289.500 dan Dana Desa sebesar Rp2.569.304.332.890. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian, Belanja Transfer Pemerintah Pusat yang berupa Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian dieliminasi dengan Pendapatan Transfer pada Pemerintah Daerah. Metode eliminasi yang digunakan mengacu kepada angka Belanja Transfer Pemerintah Pusat dikarenakan adanya perbedaan dengan angka Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah. Terhadap selisih yang muncul, maka dieliminasi kepada



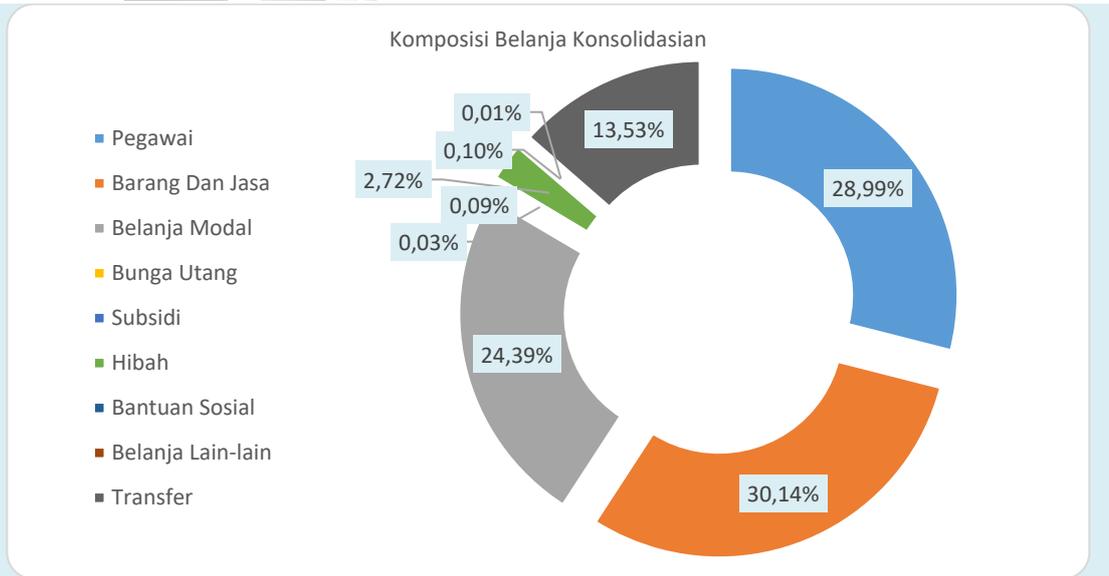
akun dalam skala resiprokal. Pada tahun 2023, setelah dilakukan eliminasi akun resiprokal dan sekala resiprokal, masih terdapat Belanja Transfer Perintah Pusat yang tidak habis tereliminasi sebesar Rp4.110.709.092.579

Boks 1. Komponen Terbesar Belanja Pemerintah

Di tahun 2023, komposisi Belanja Pemerintah Konsolidasian terbesar dilihat dari klasifikasi ekonomi anggaran (jenis belanja) didominasi oleh Belanja Barang Konsolidasian sebesar 30,14 persen. Di urutan kedua adalah Belanja barang Konsolidasian sebesar 28,99 persen, dan selanjutnya diikuti dengan Belanja Modal Konsolidasian sebesar 24,39 persen, Belanja Transfer Konsolidasian sebesar 13,53 persen, Belanja Hibai Konsolidasian sebesar 2,72 persen, Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian sebesar 0,10 persen, Belanja Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian sebesar 0,09 persen, Belanja Subsidi Konsolidasian sebesar 0,03 persen, dan Belanja Lain-Lain sebesar 0,01 persen. Sedangkan di tahun 2022, komposisi Belanja Pemerintah Konsolidasian terbesar dilihat dari klasifikasi ekonomi anggaran (jenis belanja) didominasi oleh Belanja Pegawai Konsolidasian sebesar 32,08 persen. Di urutan kedua adalah Belanja barang Konsolidasian sebesar 30,05 persen, dan selanjutnya diikuti dengan Belanja Modal Konsolidasian sebesar 23,88 persen, Belanja Transfer Konsolidasian sebesar 11,99 persen, Belanja Hibai Konsolidasian sebesar 1,66 persen, Belanja Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian sebesar 0,14 persen, Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian sebesar 0,11 persen, Belanja Lain-Lain Konsolidasian sebesar 0,07 persen, dan Belanja Subsidi sebesar 0,01 persen.

Di tahun 2023, komposisi Belanja Pemerintah Pusat terbesar dilihat dari klasifikasi ekonomi anggaran (jenis belanja) didominasi oleh Belanja Barang sebesar 31,81 persen. Di urutan kedua adalah Belanja Pegawai sebesar 25,43 persen, diikuti dengan Belanja Modal sebesar 22,53 persen, dan Belanja Transfer sebesar 20,21 persen (Nilai belanja tersebut merupakan nilai yang sudah dilakukan eliminasi antara Belanja Transfer Pempus dengan Pendapatan Tranfer Pemda) serta Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,12 persen. Tidak terdapat realisasi belanja untuk Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Hibah dan Belanja Lain-lain di tahun 2023

Di tahun 2023, komposisi konsolidasi belanja Pemerintah Daerah terbesar dilihat dari klasifikasi ekonomi anggaran (jenis belanja) didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar 30,82 persen. Di urutan kedua adalah Belanja Barang sebesar 29,28 persen, diikuti dengan Belanja Modal sebesar 25,34 persen, Belanja Transfer sebesar 10,14 persen, Belanja Hibah sebesar 4,13 persen, Pembayaran Bunga Utang sebesar 0,14 persen, Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,09 persen, Belanja Subsidi sebesar 0,04 persen dan Belanja Lain-Lain sebesar 0,01 persen



Grafik 16. Komposisi Belanja Konsolidasian Berdasarkan Jenis Belanja TA 2022

Belanja Barang merupakan komponen terbesar belanja pemerintah konsolidasian. Belanja Barang tersebut digunakan untuk membiayai operasional kegiatan sehari-sehari kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada tahun 2023, belanja barang mengalami kenaikan sebesar Rp1.781.129.802.593 atau sebesar 10,90 persen.

Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar kedua belanja pemerintah konsolidasian meskipun mengalami sedikit penurunan sebesar minus Rp15.597.880.880 atau 0,09 persen dibanding tahun 2022. Proporsi belanja pegawai yang cukup besar dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing daerah dalam menetapkan kebutuhan SDM pelayan publik dan alokasi belanja pegawai. Persentase yang cukup besar tersebut juga mengindikasikan komitmen pemerintah dalam rangka merestrukturisasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan insentif dalam birokrasi.

Belanja Modal merupakan komponen terbesar ketiga belanja pemerintah konsolidasian. Belanja modal mempunyai *multiplier effect* terhadap pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan investasi. Alokasi anggaran yang bertujuan untuk menambah atau memperoleh aset ini dialokasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah antara lain terkait dengan pembelian aset untuk operasional kegiatan satuan kerja dan pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Sumatera Selatan seperti pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan. Pada tahun 2023, belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp1.678.054.259.029 rupiah atau 12,92 persen.

3. DEFISIT DAN PEMBIAYAAN KONSOLIDASIAN

Pada tahun 2023, Pemerintah Konsolidasian mengalami defisit sebesar Rp30.966.510.142.238 yang merupakan implikasi dari lebih tingginya Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian dibandingkan dengan Pendapatan dan Hibah Konsolidasian. Defisit Konsolidasian pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp4.100.123.891.281 atau sebesar 15,26 persen jika dibandingkan dengan Defisit Konsolidasian pada



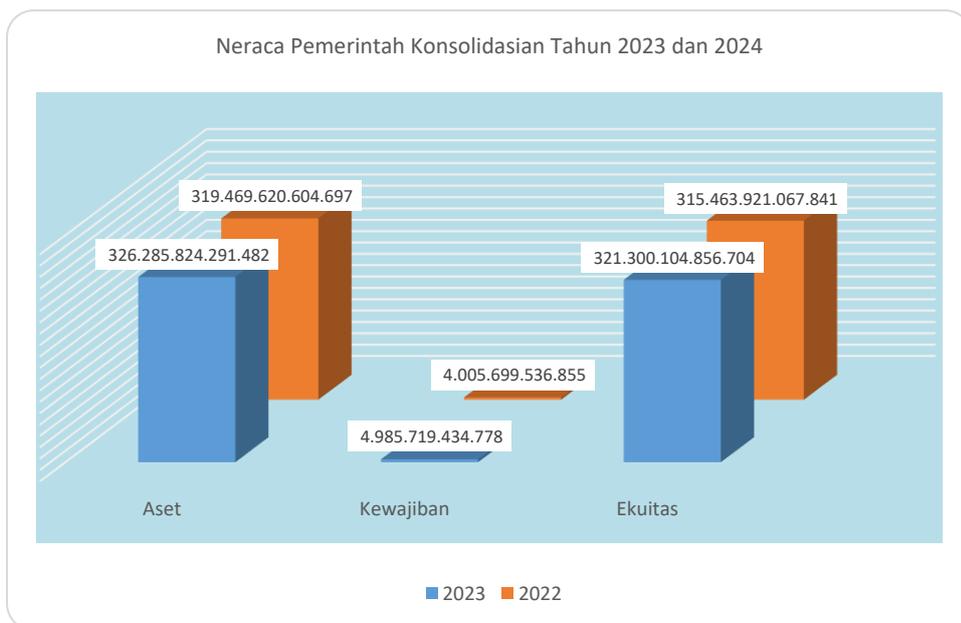
tahun 2022, yang sebesar Rp26.866.386.250.957. Defisit Konsolidasian tahun 2023 terdiri dari Defisit Pemerintah Pusat sebesar Rp 30.287.651.873.269,00 dan Surplus Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp678.858.268.969,33.

Pembiayaan Konsolidasian tahun 2023 adalah Rp2.464.725.160.533 merupakan Pembiayaan Dalam Negeri Pemerintah Daerah. Pembiayaan Dalam Negeri Konsolidasian tersebut merupakan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan Rp33.927.750.000,00 dan Penerimaan Pembiayaan Pemda sebesar Rp3.290.752.012.834,50 setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan Rp97.863.655.410,00, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Non Perbankan Rp616.948.154.431,00, Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp30.000.000.000,00 dan Penyertaan Modal Negara Pada BUMN/D sebesar Rp115.142.792.461,00.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih atau selisih kurang setelah pembiayaan atau selisih seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran. Secara umum, SiLPA menimbulkan saldo lebih bagi Pemerintah yang dapat digunakan untuk pengeluaran pada periode anggaran berikutnya sedangkan SiKPA yakni selisih kurang menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam membiayai kekurangan anggaran. Pada tahun 2023, pembiayaan konsolidasian neto lebih rendah dibandingkan dengan defisit konsolidasian, sehingga menghasilkan SiKPA konsolidasian sebesar Rp28.501.784.981.706. Pada tahun 2023 SiKPA realisasi APBN sebesar Rp30.287.651.873.269,00 sedangkan terdapa SiLPA pada realisasi APBD yaitu sebesar Rp1.785.866.891.563,17. Terdapat peningkatan SiKPA konsolidasian pada tahun 2023 sebesar Rp3.982.381.104.923 atau sebesar 16,24 persen dibandingkan dengan SiKPA konsolidasian tahun 2022 yang sebesar Rp 24.519.403.876.783.

B.2. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA KONSOLIDASIAN TAHUN ANGGARAN 2022

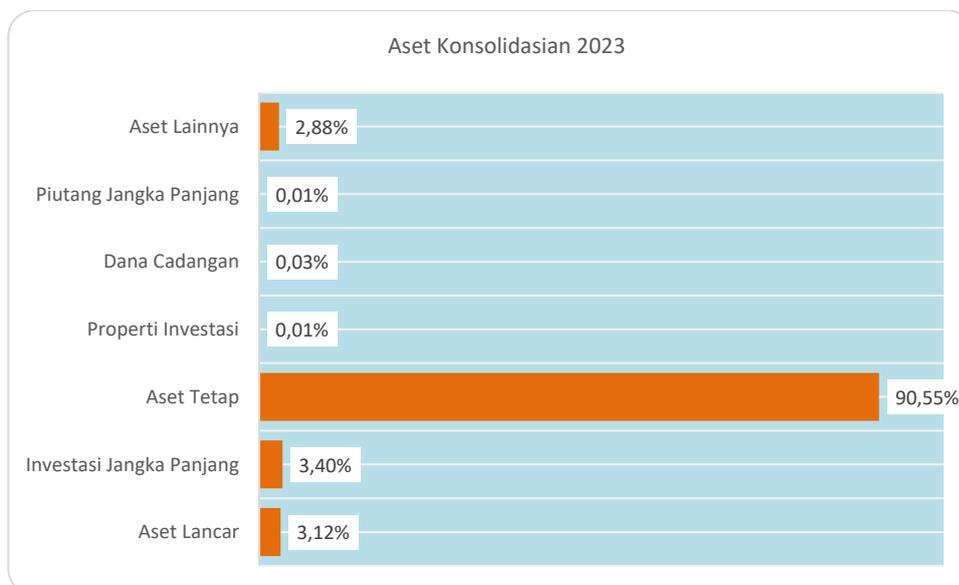
Neraca pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2023 meliputi Aset Konsolidasian sebesar Rp326.285.824.291.482, Kewajiban Konsolidasian sebesar Rp4.985.719.434.778, dan Ekuitas Konsolidasian sebesar Rp321.300.104.856.704. Pada tahun 2023, Aset Konsolidasian mengalami kenaikan sebesar Rp6.816.203.686.785 atau 2,13 persen dibandingkan tahun 2022. Selanjutnya, Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp980.019.897.923 atau 24,47 persen dibandingkan tahun 2022. Sehingga Ekuitas (kekayaan bersih) pemerintah konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.836.183.788.863 atau 1,85 persen terhadap tahun sebelumnya.



Grafik 19. Struktur Neraca Konsolidasian per 31 Desember 2023

1. ASET KONSOLIDASIAN

Aset Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp326.285.824.291.482 terdiri dari Aset Lancar Konsolidasian, Investasi Jangka Panjang Konsolidasian, Aset Tetap Konsolidasian, Dana Cadangan Konsolidasian, Piutang Jangka Panjang Konsolidasian dan Aset Lainnya Konsolidasian.



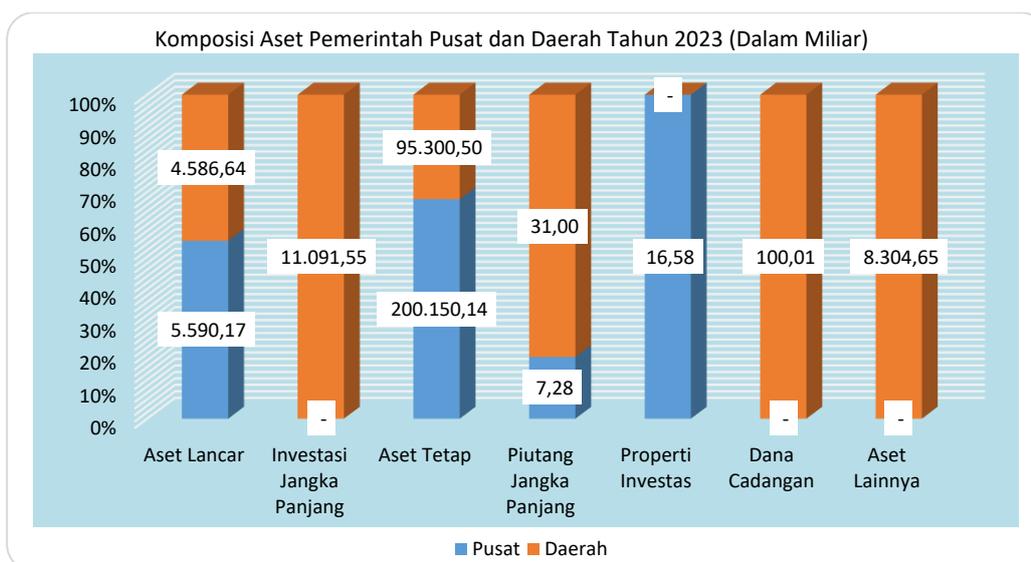
Grafik 20. Struktur Aset Konsolidasian per 31 Desember 2023

Berdasarkan grafik 17, terlihat bahwa komposisi Aset Konsolidasian didominasi oleh Aset Tetap Konsolidasian, yaitu 90,55 persen dari Total Aset Konsolidasian. Sedangkan, perbandingan perubahan struktur Aset Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2023 dan 202 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 21. Perbandingan Aset Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 2022

Dilihat dari sisi neraca Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagian besar komponen aset konsolidasian dimiliki oleh Pemerintah Pusat daripada Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, Aset Pemerintah Pusat yaitu Rp206.871.467.507.500,00 atau 63,40 persen dari total Aset Pemerintah Konsolidasian, sedangkan Aset Pemerintah Daerah yaitu Rp119.414.356.783.982,00 atau 36,60 persen dari total Aset Pemerintah Konsolidasian.



Grafik 22 Komposisi Aset Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2022

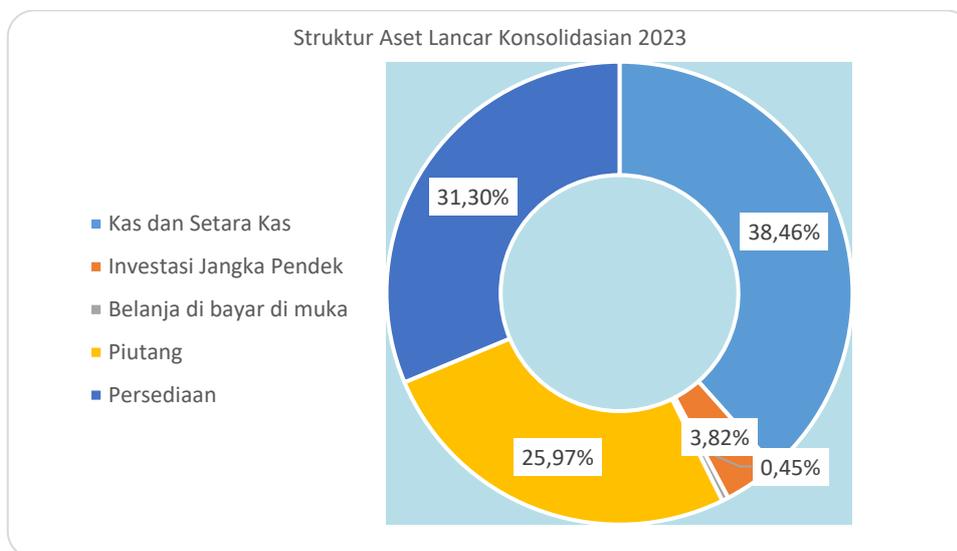
a. Aset Lancar Konsolidasian

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari antara lain Kas di Kas Negara dan Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara

Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, Kas pada BLU, Uang Muka dari Rekening BUN, Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, Uang Muka Belanja, Piutang dari Kegiatan BLU, Piutang Lain-lain, Bagian Lancar Pemberian Pinjaman, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima, Piutang Lancar Kredit Pemerintah & Piutang Jangka Pendek Lainnya, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Investasi Jangka Pendek, dan Persediaan

Jumlah Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.176.807.078.412 yang terdiri dari Kas dan Setara Kas Konsolidasian sebesar Rp3.914.020.661.669, Investasi Jangka Pendek Konsolidasian sebesar Rp388.548.923.943 Belanja Dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja Konsolidasian sebesar Rp46.261.230.405, Piutang Konsolidasian sebesar Rp2.642.926.994.894, Persediaan Konsolidasian sebesar Rp3.185.049.267.501.

Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp319.813.167.067 atau 3.24 persen dibandingkan Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2022.



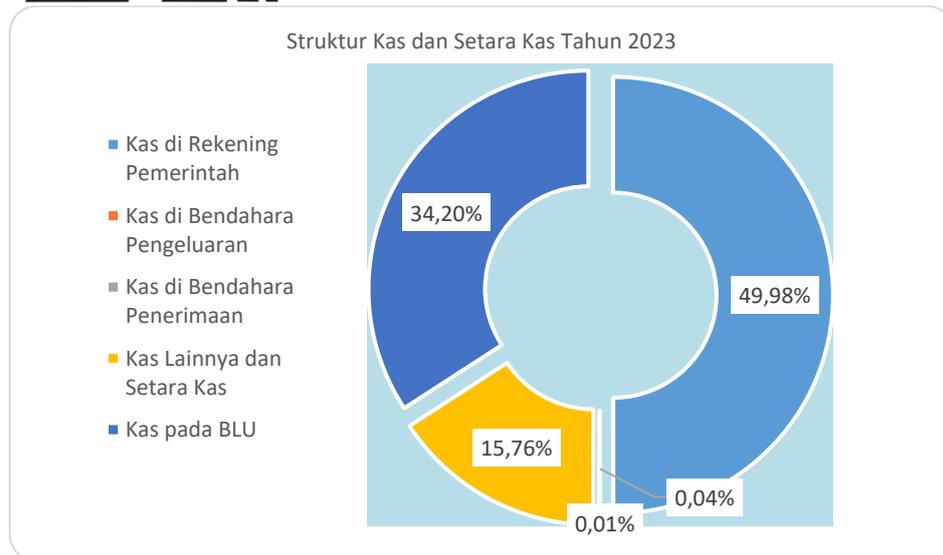
Grafik 23. Struktur Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2023

Kas dan Setara Kas Konsolidasian sebesar Rp3.914.020.661.669 terdiri dari:

- a. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.956.341.962.905,18, yang terdapat pada neraca pemerintah daerah. Kas di Kas Daerah Konsolidasian per 31 Desember 2023 turun sebesar minus Rp1.245.141.595.508,69 atau 38,89 persen dari Rekening Kas di Kas Daerah Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- b. Kas dalam Transito merupakan saldo kas yang disajikan karena transfer dari satu rekening pemerintah lainnya pada akhir periode pelaporan tetapi rekening yang dituju baru menerima pada awal periode pelaporan tahun anggaran yang akan datang. Kas dalam Transito per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp0,00.



- c. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara/daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.744.063.202,27, terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp1.182.438.238,00 dan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp561.624.964,27. Kas di Bendahara Pengeluaran Konsolidasian per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp815.180.407,74 atau turun 87,76 persen dari Kas di Bendahara Pengeluaran Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- d. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, termasuk bunga dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara/daerah. Kas di Bendahara Penerimaan Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp475.818.668,53 yang terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp350.128.001,00 dan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp 125.690.667,53. Kas di Bendahara Penerimaan Konsolidasian per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp139.788.667,00 atau sebesar 41,60 persen dari Kas di Bendahara Penerimaan Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- e. Kas Lainnya dan Setara Kas Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp616.924.593.133 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L. Kas Lainnya dan Setara Kas ini terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp555.922.486.694 dan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp61.002.106.439. Kas Lainnya dan Setara Kas Konsolidasian per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp489.748.157.864 atau 385.09 persen dari Kas Lainnya dan Setara Kas Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- f. Kas pada BLU Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.338.534.223.760 dan merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU. Kas pada BLU terdapat pada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.099.469.714.430 dan pada Pemerintah Daerah sebesar Rp 239.064.509.330. Kas pada BLU Konsolidasian per 31 Desember 2023 turun sebesar minus Rp381.075.752.800 atau sebesar 22,16 persen di bandingkan dengan per 31 Desember 2022.



Grafik 24. Struktur Kas dan Setara Kas Konsolidasian per 31 Desember 2022

Investasi Jangka Pendek Konsolidasian Per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp388.548.923.943, yaitu merupakan Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum pada Pemerintah Pusat. Pada tahun 2023, terdapat kenaikan Investasi Jangka Pendek Konsolidasian dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar Rp278.900.000.000 atau 254,36 persen

Belanja dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp46.261.230.405 merupakan uang muka dan/atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang/jasa yang terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp 18.359.167.870 dan pada Pemerintah Daerah sebesar Rp 27.902.062.535. Belanja dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar minus Rp17.895.082.804 atau minus 27,89 persen dari Belanja dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Konsolidasian per 31 Desember 2022.

Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.642.926.994.894 meningkat sebesar Rp1.083.968.360.448 atau sebesar 69,53 persen dibandingkan dengan Piutang Konsolidasian per 31 Desember 2022. Piutang Konsolidasian terdiri dari:

- a. Piutang Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.532.513.262.642 yang merupakan Piutang Pajak pada Neraca Pemerintah Pusat. Piutang Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp190.735.292.440 atau 14,22 persen jika dibandingkan dengan Piutang Pajak per 31 Desember 2022.

Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2023.

Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tagihan pajak yang telah



mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

- b. Piutang Bukan Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.653.378.045.322 merupakan penggabungan Piutang Bukan Pajak pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp627.334.121.625 dan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp2.026.043.923.697. Piutang Bukan Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp935.534.081.548 atau 54,46 persen dari Piutang Bukan Pajak Konsolidasian per 31 Desember 2022.

Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

- c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah Tagihan Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.317.598.034 merupakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran yang terdapat pada Neraca Pemerintah Daerah. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar minus Rp261.362.585 atau minus 7,30 persen jika dibanding dengan tahun 2021.
- d. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp163.438.057 merupakan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan yang terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat. Jumlah ini menurun sebesar minus Rp17.711.538 atau 9,77 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan pada Pemerintah Pusat merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada K/L dan BUN (Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya) yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
- e. Piutang Lain-lain Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah Rp117.901.203.636. Piutang Lain-lain merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Piutang Lain-Lain Konsolidasian terdiri dari Piutang Dari Kegiatan Operasional dan Non Operasional BLU pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp108.836.146.280 dan Rp225.011.788 serta Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangkapersen Pendek Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp8.840.045.568. Piutang Lain-Lain Konsolidasian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp26.587.789.173 atau 29,12 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022.
- f. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.664.346.552.797, mengalami kenaikan sebesar Rp68.609.728.590 atau 4,30 persen dibandingkan periode 31 Desember 2022. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pemerintah Pusat per



31 Desember 2023 adalah Rp986.575.477.731 dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 adalah Rp677.771.075.066.

- g. Persediaan Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.185.049.267.501 merupakan penggabungan Persediaan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp2.326.484.930.177 dan pada Pemerintah Daerah Rp858.564.337.324. Jumlah ini naik sebesar Rp110.354.110.792 atau 3,59 persen bila dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya.

b. Investasi Jangka Panjang Konsolidasian

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.091.547.676.045 yang seluruhnya merupakan Investasi Jangka Panjang pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Investasi Non Permanen Rp37.373.807.338 dan Investasi Permanen Rp11.054.173.868.707. Investasi Jangka Panjang tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp93.583.403.061 atau 0,85 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022

c. Aset Tetap Konsolidasian

Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan serta Akumulasi Penyusutan. Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp295.450.645.050.715 terdapat pada Pemerintah Pusat sebesar Rp200.150.144.494.957 dan pada Pemerintah Daerah sebesar Rp95.300.500.555.758. Nilai Aset Tetap Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.496.896.817.419 atau 1,90 persen dibanding periode 31 Desember 2022.

- 1) Tanah Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp158.966.583.537.975 merupakan penggabungan Tanah pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp133.625.761.192.636 dan pada Pemerintah Daerah sebesar Rp25.340.822.345.339. Jumlah ini meningkat sebesar Rp779.010.020.976 atau sebesar 0,49 persen dibandingkan dengan tahun 2022.
- 2) Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.944.876.918.410 merupakan penggabungan Peralatan dan Mesin pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp14.935.518.985.601 dan Peralatan dan Mesin pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp17.009.357.932.809. Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp2.627.541.351.134 atau 8,96 persen dibanding dengan Peralatan dan Mesin Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- 3) Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.531.771.212.717 merupakan penggabungan Gedung dan Bangunan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar



Rp13.345.582.918.686 dan Gedung dan Bangunan pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp28.186.188.294.031. Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp2.687.085.203.426 atau 6,92 persen dibanding dengan Gedung dan Bangunan Konsolidasian per 31 Desember 2022.

- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp154.536.405.562.291 merupakan penggabungan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp69.680.439.288.608 dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp84.855.966.273.683. Jalan, Irigasi dan Jaringan Konsolidasian per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp8.571.066.726.977 atau 5,87 persen dibanding dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan konsolidasian per 31 Desember 2022.
- 5) Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.137.797.970.195 merupakan penggabungan Aset Tetap Lainnya pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp624.007.806.902 dan Aset Tetap Lainnya pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp 2.513.790.163.293. Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp189.216.578.976 atau 6,42 persen dibanding dengan Aset Tetap Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.405.299.526.561 merupakan penggabungan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp5.418.232.257.965 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca Konsolidasian Pemerintah Daerah sebesar Rp1.987.067.268.596. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp1.434.700.005.903 atau 24,03 persen dibanding dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan konsolidasian per 31 Desember 2022.
- 7) Koneksi Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.423.874.645.407. Koneksi Jasa baru muncul pada Neraca Konsolidasian Tahun 2022 dan hanya terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat Terdapat kenaikan sebesar Rp439.839.125.589 atau 11,04 persen dibanding tahun 2022.
- 8) Akumulasi Penyusutan Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp106.495.964.322.841 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp11.231.562.195.563 atau 11,79 persen.

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan). Rincian Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat dan Daerah menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Tabel 8. Aset Tetap Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan 2022 (Dalam Rupiah)

Jenis Aset Tetap	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah	
	2023	2022	2023	2022
Tanah	133.625.761.192.636	132.891.106.902.454	25.340.822.345.339	25.296.466.614.545
Peralatan dan Mesin	14.935.518.985.601	13.896.991.181.010	17.009.357.932.809	15.420.344.386.266



Gedung dan Bangunan	13.345.582.918.686	12.553.812.131.985	28.186.188.294.031	26.290.873.877.306
Jalan, irigasi & jaringan	69.680.439.288.608	67.687.470.822.441	84.855.966.273.683	78.277.868.012.873
Aset Tetap Lainnya	624.007.806.902	592.261.627.712	2.513.790.163.293	2.356.319.763.507
Konstruksi dlm Pengerjaan	5.418.232.257.965	4.105.364.393.101	1.987.067.268.596	1.865.235.127.557
Konsesi Jasa	4.423.874.645.407	3.984.035.519.818		
Akumulasi Penyusutan	(41.903.272.600.848)	(37.092.490.721.495)	(64.592.691.721.993)	(58.171.911.405.783)
Jumlah	200.150.144.494.957	198.618.551.857.026	95.300.500.555.758	91.335.196.376.270

d. Properti Investasi

Properti Investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Properti Investasi Konsolidasian tahun 2023 adalah Rp16.581.036.000 yang hanya terdapat pada Pemerintah Pusat. Nilai Properti Investasi tahun 2023 sama dengan nilai pada tahun 2022.

e. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp100.011.660.275 dan Rp70.011.660.275. Dana Cadangan Tahun 2023 terdapat pada Neraca Pemerintah Pusat, dan mengalami kenaikan 42,85 persen dibanding tahun 2022.

f. Piutang Jangka Panjang Konsolidasian

Piutang Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.281.229.097. Piutang Jangka Panjang Konsolidasian terdiri dari antara lain Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Konsolidasian, dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Konsolidasian.

- Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp820.127.783, yang hanya tercatat pada Neraca Pemerintah Daerah. Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar minus Rp177.110.518 atau 17,76 persen dibandingkan dengan Tagihan Penjualan Angsuran Konsolidasian per 31 Desember 2022
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.346.860.359 merupakan konsolidasi Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp163.911.328 dan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp30.182.949.031. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Konsolidasian per 31 Desember 2023 turun sebesar minus Rp4.800.273.550 atau 13,66 persen dibandingkan dengan Tuntutan Ganti Rugi Konsolidasian per 31 Desember 2022.



- c. Piutang Jangka Panjang Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 Rp7.281.307.551, merupakan Piutang Jangka Panjang Lainnya pada pemerintah pusat, mengalami penurunan sebesar minus Rp90.000.000 atau 1,22 persen dibanding tahun 2022.
- d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp167.066.596. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang hanya berasal dari Pemerintah Pusat dan mengalami penurunan sebesar Rp230.442 atau 0,14 persen.

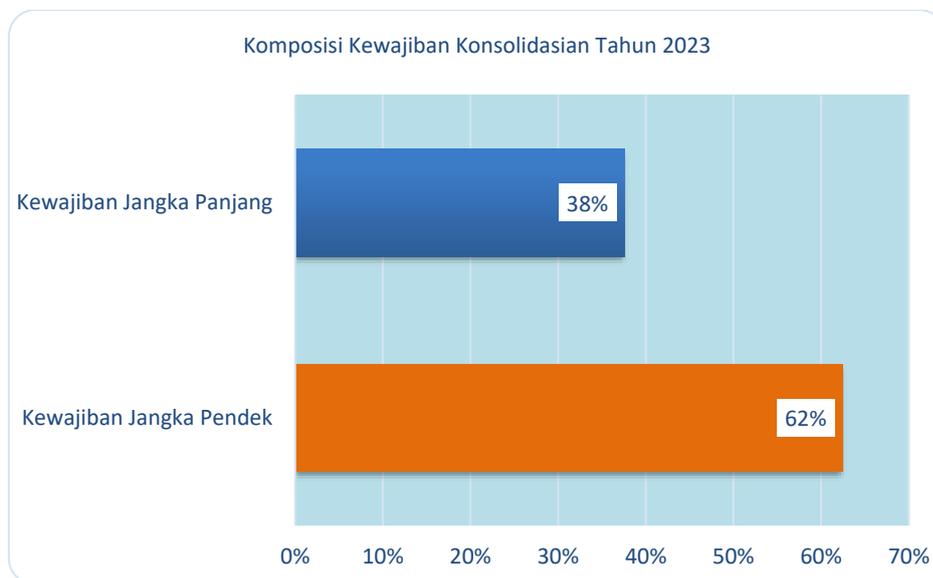
g. Aset Lainnya Konsolidasian

Aset Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.411.950.560.938 dan Rp8.530.973.108.073. Aset Lainnya Konsolidasian terdiri dari antara lain Kemitraan dengan Pihak Ke Tiga, Aset Tidak Berwujud, Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, Dana Pinjaman, dana Kelolaan BLU, Aset Lain-Lain, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya serta Amortisasi Aset Lainnya.

- 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.136.324.332.073, merupakan Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Neraca Pemerintah Daerah. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp15.737.847.189 atau 0,74 persen dibandingkan dengan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- 2) Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp771.502.426.292, yang merupakan konsolidasi Aset Tak Berwujud pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp280.042.819.577 dan Aset Tak Berwujud pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp491.459.606.715. Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2023 menurun sebesar minus Rp11.185.879.012 atau 1,43 persen dibandingkan dengan Aset Tak Berwujud Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- 3) Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca Pemerintah Pusat. Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp456.382.892.008 atau naik sebesar Rp451.462.239.236 atau 9174,84 persen dibanding saldo 31 Desember 2022.
- 4) Aset Lain-lain Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.879.536.916.496 merupakan konsolidasi Aset Lain-lain pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp938.349.376.409 dan Aset Lain-lain pada Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp5.941.187.540.087. Aset Lain-lain Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp269.353.889.226 atau 4,07 persen dibandingkan dengan Aset Lain-lain Konsolidasian per 31 Desember 2022.
- 5) Akumulasi Amortisasi –Aset lainnya (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp831.796.005.930 dan Rp987.405.362.157.

2. KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.



Grafik 25. Struktur Kewajiban Pemerintah Konsolidasian per 31 Desember 2023

Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.985.719.434.778 dan Rp4.005.699.536.855. Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2023 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian sebesar Rp3.113.501.886.335 dan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp1.872.217.548.443. Kewajiban jangka pendek merupakan komponen terbesar dari kewajiban konsolidasian.

a. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga Konsolidasian, Utang kepada Pihak Ketiga Konsolidasian, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Konsolidasian, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya, Utang Biaya Pinjaman Konsolidasian, Pendapatan Diterima Dimuka Konsolidasian, dan Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.113.501.886.335 dan Rp2.565.611.389.505 terdiri dari:

- a. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.071.067.472 seluruhnya merupakan Utang PFK pada Pemerintah Daerah. Utang PFK Konsolidasian per 31 Desember 2023 turun sebesar minus Rp15.970.941 atau 1,47 persen dibanding tahun sebelumnya.



- b. Utang kepada Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.787.467.565.455, serdapat pada Pemerintah Pusat sebesar Rp557.165.590.689 dan pada Pemerintah Daerah Rp1.230.301.974.766. Utang kepada Pihak Ketiga Konsolidasian per 31 Desember 2023 naik Rp828.473.479.126 atau 86,39 persen dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya.
- c. Utang Bunga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.954.187.929 dan Rp4.471.489.637. Utang Bunga Per 31 Desember 2023 terdapat pada Pemerintah Daerah dan mengalami penurunan yaitu sebesar minus Rp517.301.708 atau 11,57 persen dibanding dengan Utang Bunga Tahun 2022.
- d. Utang Transfer per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.242.737.152 dan Rp0. Utang Transfer Per 31 Desember 2023 terdapat pada Pemerintah Pusat.
- e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp296.063.331.062, seluruhnya terdapat pada Pemerintah Daerah. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2023 menurun sebesar minus Rp545.507.915.360 atau 64,82 persen dibanding dengan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang konsolidasian per 31 Desember 2022.
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp684.043.068.124 merupakan Penggabungan Utang Pendek Lainnya pada Pemerintah Pusat sebesar Rp441.148.560.585 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp242.894.507.539. Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian ini mengalami peningkatan sebesar Rp273.781.720.115 atau 66,73 persen jika dibanding dengan tahun 2022.
- g. Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp525.975.970 dan Rp40.133.122.
- h. Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp339.133.953.171 merupakan penggabungan Utang Jangka Pendek Lainnya pada Neraca Pemerintah Pusat sebesar Rp16.815.312 yang merupakan Utang Bendahara dan pada Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp339.117.137.859 yang merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer. Utang Jangka Pendek Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 turun sebesar minus Rp10.052.094.402 atau 2,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.872.217.548.443 dan Rp1.440.088.147.350. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian merupakan konsolidasian antara Utang Jangka Panjang dalam negeri sebesar Rp1.755.226 dan Kewajiban Konsesi Jasa sebesar Rp1.439.682.593.997 pada Neraca



Pemerintah Pusat dan Utang Jangka Panjang dalam Negeri Perbankan, Utang Jangka Panjang dalam Negeri Non Perbankan, Utang Pemerintah Pusat serta Utang Jangka Panjang Lainnya Pada Neraca Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp189.385.888.346, Rp176.009.381.499, Rp3.405.979.968 dan Rp63.731.949.408. Terdapat peningkatan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp432.129.401.093 atau 30,01 persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2022.

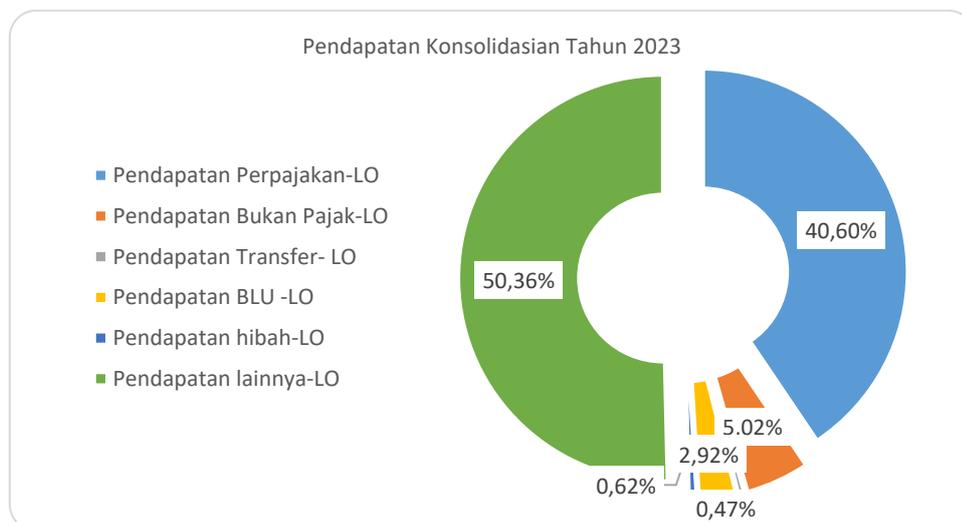
3. EKUITAS KONSOLIDASIAN

Sejak berlakunya basis akuntansi akrual sejak tahun anggaran 2015, maka Ekuitas tidak lagi dibagi ke dalam tiga jenis (Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan) seperti tahun-tahun sebelumnya. Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp321.300.104.856.704, terdiri atas Ekuitas Pemerintah Pusat Rp204.431.683.478.569 dan Ekuitas Pemerintah Daerah Konsolidasian Rp116.868.421.378.135. Ekuitas Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.836.183.788.863 atau 1,85 persen dibanding tahun 2022.

B.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN TAHUN ANGGARAN 2022

1. PENDAPATAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN

Pendapatan Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp62.370.610.882.224. Pendapatan Operasional Konsolidasian tersebut berasal dari konsolidasi Pendapatan Perpajakan sebesar Rp25.323.115.925.090 atau sebesar 38,78 persen, Pendapatan Negara Bukan Pajak Konsolidasian sebesar Rp3.133.541.391.630 atau sebesar 4,80 persen, Pendapatan Transfer sebesar Rp290.324.963.447 atau 0,44 persen, Pendapatan BLU sebesar Rp1.823.886.395.073 atau 2,79 persen, Pendapatan Hibah sebesar Rp388.816.848.535 atau sebesar 0,60 persen dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp31.410.925.358.449 atau 52,59 persen. Komposisi Pendapatan Operasional Konsolidasian Tahun 2022 dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut



Grafik 26. Pendapatan Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2023



Pada tahun 2023, Pendapatan Perpajakan Konsolidasian mencapai Rp25.323.115.925.090 yang merupakan konsolidasi dari Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat sebesar Rp18.785.311.882.696,00 dan Pendapatan Perpajakan Pemerintah Daerah sebesar Rp6.537.804.042.394,03. Pendapatan Perpajakan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.475.237.894.522 atau 6,19 persen dibandingkan tahun 2022. Rincian Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Tabel 9. Rincian Pendapatan Perpajakan Konsolidasian Tahun 2023

Jenis Aset Tetap	Konsolidasi			
	2023	%	2022	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	8.255.573.368.861,000	32,60%	8.223.840.315.820	34,48%
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	7.824.843.298.515,000	30,90%	6.681.044.608.482	28,02%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	2.198.146.799.008,000	8,68%	1.616.598.901.944	6,78%
Pendapatan Cukai	784.289.000,000	0,00%	62.400.000	0,00%
Pendapatan Perpajakan Pemerintah Daerah - LO	6.537.804.042.394,030	25,82%	6.557.604.126.025	27,50%
Pendapatan Pajak Lainnya	199.839.542.480,000	0,79%	172.248.659.610	0,72%
Pendapatan Bea Masuk	173.807.467.832,000	0,69%	188.417.990.687	0,79%
Pendapatan Bea Keluar	132.317.117.000,000	0,52%	408.061.028.000	1,71%
Jumlah	25.323.115.925.090,000		23.847.878.030.568	

Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.133.541.391.630 naik Rp583.943.075.812 atau 22,90 persen dibanding tahun 2022. Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian merupakan konsolidasi Pendapatan Bukan Pajak Pemerintah Pusat sebesar Rp946.584.275.292,00 dan Pemerintah Daerah sebesar Rp2.193.886.495.737,46. Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian terdiri dari Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp450.740.867.279 dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp2.682.800.524.350. Angka Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian merupakan angka setelah eliminasi akun sekala resiprokal sebesar Rp6.929.379.399,72.

Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp95.109.295.769 atau 26,74 persen dibanding dengan tahun 2022. Selanjutnya, Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya juga mengalami kenaikan sebesar Rp488.833.780.042 atau 22,28 persen dibanding tahun 2022.

Pendapatan Transfer Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp290.324.963.447, merupakan Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya. Pendapatan Transfer Pada Pemerintah Daerah merupakan akun resiprokal yang dieliminasi dengan akun resiprokal Belanja Transfer pada Pemerintah Pusat sebesar Rp27.031.805.118.687. Angka acuan yang dijadikan dasar proses eliminasi adalah angka Belanja Transfer Permerintah Pusat .



Pendapatan BLU Konsolidasian per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.823.886.395.073 merupakan Pendapatan BLU pada Pemerintah Pusat yang terdiri dari Pendapatan Jasa BLU sebesar Rp1.699.722.684.271, Pendapatan Hibah BLU sebesar Rp9.627.476.508 dan Pendapatan Lainnya BLU sebesar Rp114.536.234.294. Terdapat kenaikan Pendapatan BLU Konsolidasian tahun 2023 sebesar Rp313.330.806.338 atau 20,74 persen jika dibanding dengan Pendapatan BLU Konsolidasian tahun 2022.

Pendapatan Hibah Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp388.816.848.535 yang merupakan Pendapatan Hibah pada Pemerintah Daerah. Pendapatan Hibah Konsolidasian terdiri dari Pendapatan Hibah pada Pemerintah pusat berupa Pendapatan Hibah Luar Negeri sebesar Rp9.641.445.394 dan Pendapatan Hibah pada Pemerintah Daerah berupa Pendapatan Hibah Dalam Negeri sebesar Rp14.264.413.114, Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp165.495.140.398 dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp199.415.849.629. Terdapat penurunan Pendapatan Hibah Konsolidasian pada tahun 2023 yaitu sebesar minus Rp1.016.299.699.346 atau 72,33 persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya.

Pendapatan Lainnya Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp31.410.925.358.449, menurun sebesar minus Rp1.104.736.242.090 atau 3,40 persen dibanding tahun 2022. Pendapatan Lainnya Konsolidasian terdapat pada Pemerintah Pusat berupa Pendapatan Penyesuaian Akrual sebesar Rp 100.832.982.491 dan Pendapatan Penyesuaian Droning Dana Transfer sebesar R 31.310.092.375.958 serta pada Pemerintah Daerah berupa Pendapatan Lainnya Pemda sebesar Rp247.175.055.027. Nilai Pendapatan Lainnya pada Pemerintah Daerah sebesar Rp247.175.055.027 tersebut dilakukan eliminasi dengan Belanja Transfer Perintah Pusat.

2. BEBAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN

Beban Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.497.672.892.247. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp5.926.069.871.199 atau 11,08 persen dibandingkan tahun 2022. Beban Operasional Konsolidasian tersebut berasal dari konsolidasi Beban Operasional Pemerintah Pusat sebesar Rp48.698.062.099.633 dan Beban Operasional Pemerintah Daerah Konsolidasian sebesar Rp35.644.644.050.411 setelah eliminasi akun resiprokal sebesar Rp27.845.033.257.798. Rincian Beban Operasional Konsolidasian adalah sebagai berikut (dalam rupiah)

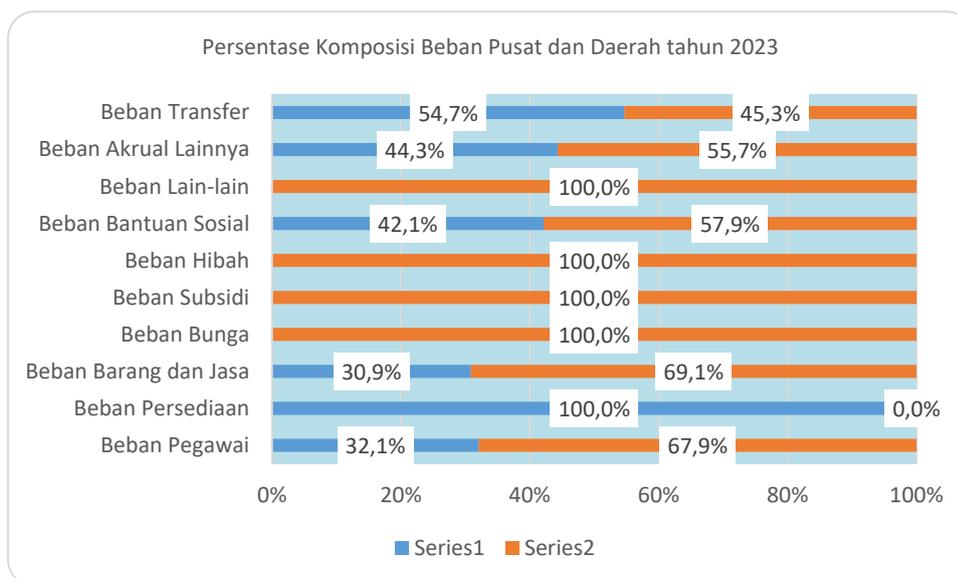
Tabel 10. Rincian Komposisi Beban Konsolidasian Tahun 2023

URAIAN	Konsolidasi			
	2023	%	2022	%
Beban Operasional				
Beban Pegawai	18.001.385.520.108	31,86%	17.970.454.684.091	33,59%
Beban Persediaan	982.479.894.141	1,74%	701.218.277.163	1,31%
Beban Barang dan Jasa	17.716.114.541.429	31,36%	15.736.758.656.835	29,42%



Beban Bunga	54.272.825.884	0,10%	74.662.470.165	0,14%
Beban Subsidi	15.920.009.714	0,03%	7.753.180.987	0,01%
Beban Hibah	1.735.049.223.148	3,07%	1.166.696.190.670	2,18%
Beban Bantuan Sosial	61.307.740.000	0,11%	66.238.775.396	0,13%
Beban Lain-lain	162.807.920	0,00%	123.103.632.285	0,20%
Beban Akruah Lainnya	11.591.298.900.155	20,52%	11.902.670.001.859	22,25%
Beban Transfer	6.339.681.429.748	11,22%	5.747.483.261.597	10,74%
JUMLAH BEBAN	56.497.672.892.247		53.497.039.131.048	

Komposisi Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 27 Komposisi Beban Operasional Konsolidasian Tahun 2023

3. PENDAPATAN KEGIATAN NON OPERASIONAL KONSOLIDASIAN

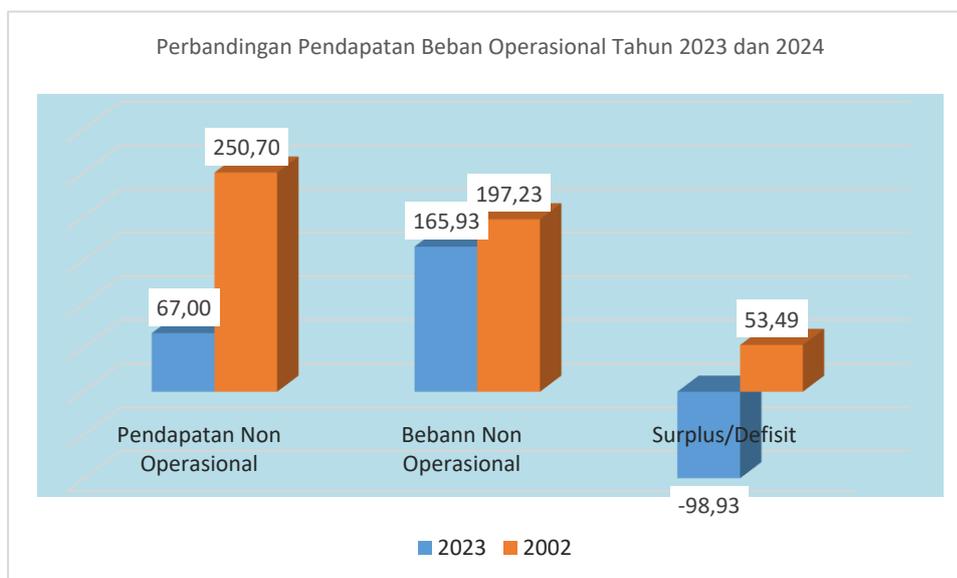
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp67.002.832.712 yang terdiri dari Pendapatan Selisih kurs pada Pemerintah Pusat yang belum terealisasi sebesar Rp15.767.738, Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Pemerintah Pusat sebesar Rp11.151.445.206, Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Pemerintah Pusat sebesar Rp 55.827.075.066, Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemda Rp5.471.656 dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemda Rp3.073.046.

4. BEBAN KEGIATAN NON OPERASIONAL KONSOLIDASIAN

Beban Kegiatan Non Operasional Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp165.928.269.675 yang terdiri dari Beban Pelepasan Aet Non Lancar pada Pemerintah Pusat sebesar



Rp72.815.418.421, Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Pemerintah Pusat sebesar Rp65.465.173.825, Beban Penjualan Aset Non Lancar Pemda sebesar Rp17.364.168.634, Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemda Rp78.661.500 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemda Rp10.204.847.295.



Grafik 28 Perbandingan Pendapatan/Beban Operasional Tahun 2023

5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa Konsolidasian per 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp-102.358.000. Pos Luar Biasa Konsolidasian tersebut berasal dari LO Pemerintah Daerah berupa Beban Luar Biasa Konsolidasian .

6. SURPLUS/DEFISIT LO

Suplus/(Defisit) LO merupakan selisih antara pendapatan operasional dan beban operasional selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pada tahun 2023, terjadi surplus-LO sebesar Rp5.773.910.195.014 yang berarti total pendapatan selama tahun 2023 lebih besar daripada total beban. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar minus Rp3.158.875.319.507 atau 35,36 persen dibandingkan tahun 2022.

C. LAPORAN STATISTIK PEMERINTAH KONSOLIDASIAN SEKTOR PEMERINTAH UMUM TAHUN 2023

C.1. STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

Data statistik keuangan pemerintah dikompilasi untuk sektor publik dan sektor pemerintahan umum.



Sektor publik mengkonsolidasi transaksi dari semua sektor, yaitu:

1. Sektor Pemerintah Umum

Sektor pemerintah umum mencakup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sektor pemerintah umum mencakup institusi yang bersifat non-pasar, yang memenuhi kebutuhan konsumsi kolektif masyarakat melalui penyediaan jasa tanpa membebankan biaya atau membebankan biaya di bawah harga pokok produksinya, dan yang merupakan transfer atau redistribusi kekayaan. Sebagian besar pelayanan tersebut dibiayai dari pajak, retribusi dan pembebanan biaya ke pengguna pelayanan. Dalam Statistik Keuangan Pemerintah, sektor pemerintah umum dibedakan menjadi: a) Pemerintah Pusat, b) Pemerintah Provinsi, dan c) Pemerintah Kabupaten/Kota. Subsektor Pemerintah Pusat terdiri dari kementerian negara/lembaga, Bendahara Umum Negara (BUN), Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga Non Struktural (LNS), yang mempunyai identitas legal terpisah atau otonomi yang cukup, namun berada dalam kendali Pemerintah Pusat.

2. Sektor Korporasi Publik



Sektor korporasi publik mencakup sektor korporasi publik non keuangan dan sektor korporasi publik keuangan. Sektor korporasi publik non keuangan terdiri dari badan yang terlibat dalam produksi barang dan jasa (non keuangan secara karakteristik) untuk dijual dalam pasar dengan harga yang menutupi sebagian besar dari biayanya. Sektor ini pada umumnya secara hukum dapat dipisahkan dari pemerintah yang memilikinya. Sektor korporasi publik keuangan adalah badan yang terlibat dalam penyediaan jasa intermediasi keuangan atau jasa keuangan tambahan. Mereka dapat memunculkan kewajiban keuangan atas tanggung jawabnya sendiri.

Konsolidasi sektor publik dilakukan dengan identifikasi dan eliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Dalam mengkompilasi statistik untuk sektor publik ini, transaksi dan hubungan debitor dan kreditor antara sub sektor dieliminasi untuk menghindari perhitungan ganda sebagai bagian dari proses konsolidasi. Total pelaporan sektor publik juga dikenal dengan pelaporan pemerintah secara keseluruhan (*whole of government reporting*).

Sumber data Statistik Keuangan Pemerintah adalah informasi akuntansi, yang berasal dari sistem akuntansi yang menghasilkan data akuntansi (merupakan sumber terbaik karena tepat waktu) dan laporan keuangan. Data transaksi dicatat dan dilaporkan secara berjenjang melalui sistem akuntansi yang ada pada sektor pemerintah umum dan korporasi publik. Dalam rangka memenuhi ketentuan metodologi pedoman Statistik Keuangan Pemerintah, data akuntansi tersebut akan diolah menjadi laporan Statistik Keuangan Pemerintah melalui analisis, penyesuaian, dan re-klasifikasi kedalam klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah dengan cara *mapping* Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan klasifikasi antara BAS sistem akuntansi dengan BAS Statistik keuangan Pemerintah.

Data yang akan di-*mapping* ke Statistik Keuangan Pemerintah adalah data Pemerintah Pusat, data konsolidasi pemerintah daerah, data perusahaan negara, dan data Bank Indonesia. Data hasil *mapping* Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dikonsolidasikan menjadi data konsolidasi statistik keuangan sektor pemerintah umum. Data hasil *mapping* perusahaan negara dan Bank Indonesia dikonsolidasikan menjadi data konsolidasi statistik keuangan sektor korporasi publik. Data statistik keuangan konsolidasian sektor pemerintah umum akan dikonsolidasi dengan data statistik keuangan konsolidasian sektor korporasi publik menjadi data statistik keuangan konsolidasian sektor publik. Statistik Keuangan Pemerintah akan menghasilkan tiga laporan utama yaitu: Laporan Operasional, termasuk arus ekonomi lain, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

C.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

Kementerian Keuangan telah melakukan *mapping* BAS sistem akuntansi pemerintah ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah dalam rangka penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah yang disampaikan ke International Monetary Fund (IMF). Namun *mapping* dan penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah tersebut masih terbatas pada sub sektor Pemerintah Pusat dan hanya untuk Laporan Arus Kas mengingat pemerintah menerapkan sistem akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual.

Dalam rangka penyusunan Manual dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah berbasis akrual, Pemerintah telah melakukan *exercise mapping* dan penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tahun 2022. Cakupan *exercise* penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah ini adalah Sektor Pemerintah Umum, yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendekatan *mapping* Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah dilakukan dengan *high level mapping* terhadap laporan keuangan konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dikonsolidasikan secara akuntansi, kemudian dilakukan *mapping* terhadap akun konsolidasian yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tersebut. Hal ini dilakukan karena belum tersedianya data detail BAS pemerintah daerah.

Oleh karena itu, data yang tertuang dalam Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 ini belum menggambarkan data yang sebenarnya dalam pengertian Statistik Keuangan Pemerintah, karena:

- a. Pendekatan *high level mapping* hanya memberikan gambaran secara umum mengenai laporan statistik keuangan pemerintah dan tidak memungkinkan penyajian BAS Statistik Keuangan Pemerintah secara detail.
- b. Keterbatasan data terkait akun resiprokal antar sektor.

C.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

Statistik Keuangan Pemerintah akan menghasilkan 3 (tiga) Laporan Statistik Keuangan Pemerintah, yang terdiri dari:

1. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan informasi atas transaksi (pendapatan dan beban) dan arus ekonomi lainnya (revaluasi dan penyesuaian). Laporan ini dirancang untuk menangkap komposisi pendapatan dan beban serta biaya bersih (*net cost*) dari aktivitas pemerintah dalam tahun fiskal. Laporan ini menunjukkan biaya penuh (*full cost*) dari sumber daya yang dikonsumsi oleh pemerintah dalam mencapai tujuannya, dan bagaimana biaya tersebut dipenuhi melalui pendapatan.

Selain menghasilkan hasil neto dari transaksi (Saldo Operasi Neto), laporan operasional juga meliputi total arus ekonomi lain yang merupakan perubahan kekayaan bersih yang disebabkan oleh arus ekonomi lain selain transaksi. Penjumlahan Saldo Operasi Neto dan arus ekonomi lain sama dengan perubahan total pada kekayaan bersih. Laporan operasional melaporkan dua ukuran fiskal utama, yaitu:

- a) Saldo Operasi Neto (*net operating balance*), yang dihitung dari pendapatan dikurangi dengan beban.
- b) Pinjaman Neto (*net lending/borrowing*, yang juga dikenal dengan saldo fiskal/*fiscal balance*) mencakup pengeluaran modal bersih tetapi tidak mencakup depresiasi, sehingga memberikan pengukuran keuangan yang lebih baik.

Penyusunan Laporan Operasional tahun 2023 dilakukan berdasarkan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (*high level mapping*) menjadi BAS Statistik Keuangan Pemerintah dengan menggunakan data pendapatan,

belanja dan pembiayaan berbasis kas.

Pendekatan *high level mapping* dilakukan dengan *mapping* data lembar muka laporan keuangan konsolidasian ke dalam laporan Statistik Keuangan Pemerintah. *Mapping* Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi ke BAS Statistik Keuangan Pemerintah seharusnya dilakukan pada level BAS yang terendah untuk memastikan keakuratan *mapping* tersebut. Pendekatan *high level mapping* ini dilakukan karena keterbatasan data BAS detail pemerintah daerah. Beberapa langkah telah dilakukan untuk meningkatkan keakuratan *high level mapping* yaitu antara lain perbandingan dengan pola *mapping* BAS sistem akuntansi pemerintah pusat.

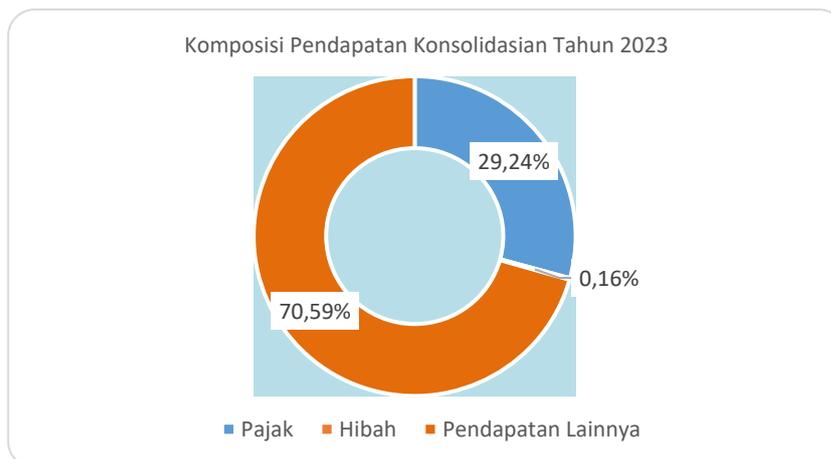
Secara umum, akun Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian telah sejalan dengan akun Statistik Keuangan Pemerintah terutama untuk klasifikasi pendapatan dan belanja. Pengecualian hanya dilakukan untuk belanja modal yang *dimapping* menjadi *net acquisition of nonfinancial assets*. Pembiayaan Konsolidasian (neto) di-*mapping* menjadi transaksi dalam aset keuangan dan kewajiban.

Berdasarkan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023, Pendapatan mencapai Rp79.705.483.466.703, yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan Konsolidasian sebesar Rp23.308.337.178.937, Pendapatan Lainnya Konsolidasian sebesar Rp56.265.864.636.310, dan Pendapatan Hibah Konsolidasian sebesar Rp131.281.651.456. Beban mencapai Rp45.471.667.889.889 terdiri dari Kompensasi Pegawai sebesar Rp17.973.707.710.840, Penggunaan Barang dan Jasa sebesar Rp16.473.359.050.047, Bunga sebesar Rp54.788.194.668, Belanja Subsidi Rp15.920.009.714, Beban Hibah sebesar Rp8.415.642.267.876, Manfaat Sosial Rp60.726.782.000, dan Beban Lainnya sebesar Rp2.477.523.874.745. Saldo Operasi Bruto/Neto (*Gross/Net Operating Balance*) sebesar Rp34.233.815.576.813, yang setelah dikurangi dengan akuisisi aset non keuangan neto sebesar Rp14.635.939.272.378 menghasilkan angka Pinjaman neto (*net lending/borrowing*) sebesar Rp19.597.876.304.436. Pinjaman neto (*Net lending/borrowing*) tersebut ditutupi oleh akuisisi aset keuangan neto (*net acquisition of financial assets*) sebesar Rp18.916.992.244.595 dan keterjadian kewajiban neto (*net incurrence of liabilities*) sebesar minus Rp680.884.059.841.

Berikut *Mapping* LRA Konsolidasian Tahun 2023 ke dalam Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan pendekatan *high level mapping*, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 dan 2022 mencapai Rp79.705.483.466.703 dan Rp73.926.126.540.820 terdapat kenaikan Pendapatan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp5.779.356.925.883 atau 7,82 persen. Pendapatan Pemerintah Umum terdiri dari Pendapatan Pajak, Hibah dan Pendapatan Lainnya. Berikut Tabel Perbandingan

Pendapatan Pemerintah Umum tahun 2023 dan 2022



Grafik 29 Komposisi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2023

Selanjutnya informasi rincian terkait komponen pendapatan umum konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut (dalam rupiah):

Tabel 11. Rincian Pendapatan Umum Tahun 2023

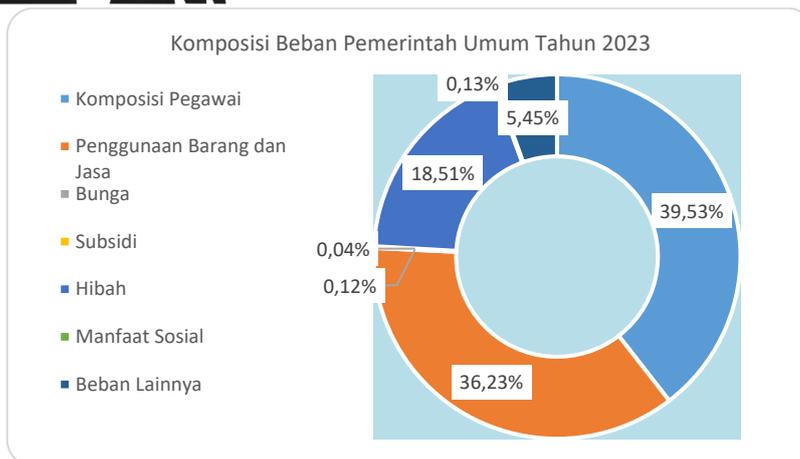
Pendapatan	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
Pajak	23.308.337.178.937	22.364.835.354.160	943.501.824.777	4,22%
Hibah	131.281.651.456	672.644.176.475	-541.362.525.019	-80,48%
Pendapatan Lainnya	56.265.864.636.310	50.888.647.010.184	5.377.217.626.126	10,57%
Jumlah	79.705.483.466.703	73.926.126.540.820	5.779.356.925.883	7,82%

2. Beban Pemerintah Umum dalam pengertian statistik keuangan pemerintah adalah semua transaksi yang mengurangi kekayaan neto sektor pemerintah umum. Beban Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 dan 2022, mencapai Rp45.471.667.889.889 dan Rp41.400.084.523.122 terdiri dari:

Tabel 12. Rincian Beban Pemerintah Umum Tahun 2023 dan 2022

Pendapatan	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
Komposisi Pegawai	17.973.707.710.840	17.960.246.223.538	13.461.487.302	0,07%
Penggunaan Barang dan Jasa	16.473.359.050.047	15.061.991.046.759	1.411.368.003.288	9,37%
Bunga	54.788.194.668	75.241.908.379	-20.453.713.711	-27,18%
Subsidi	15.920.009.714	7.753.180.987	8.166.828.727	105,34%
Hibah	8.415.642.267.876	6.657.205.967.529	1.758.436.300.347	26,41%
Manfaat Sosial	60.726.782.000	62.382.800.683	-1.656.018.683	-2,65%
Beban Lainnya	2.477.523.874.745	1.575.263.395.247	902.260.479.498	57,28%
Jumlah	45.471.667.889.889	41.400.084.523.122	4.071.583.366.767	9,83%

Selanjutnya informasi komposisi Beban Pemerintah Umum Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 30 Komposisi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2023

a. Kompensasi Pegawai

Kompensasi Pegawai berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 sebesar Rp17.973.707.710.840 mengalami kenaikan sebesar R13.461.487.302 atau 0,07 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp17.960.246.223.538. Beban kompensasi pegawai ini berasal dari jumlah belanja pegawai yang dibayarkan oleh pemerintah di semua tingkatan, termasuk belanja gaji pada satker BLU Pemerintah Pusat meskipun dibayarkan melalui belanja barang BLU.

b. Penggunaan Barang dan Jasa

Penggunaan Barang dan Jasa berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 sebesar Rp16.473.359.050.047 mengalami kenaikan sebesar Rp1.411.368.003.288 atau 9,37 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp15.061.991.046.759. Kenaikan Penggunaan Barang dan Jasa terjadi pada hampir semua tingkatan pemerintahan kecuali pada Pemerintah Pusat. Beban penggunaan barang dan jasa ini berasal dari besarnya jumlah belanja barang yang dibayar oleh pemerintah di semua tingkatan dan tidak termasuk belanja gaji pada BLU Pemerintah Pusat meskipun dalam pembayarannya menggunakan akun belanja barang BLU dan belanja yang diserahkan kepada masyarakat.

c. Bunga

Bunga berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 sebesar Rp54.788.194.668 mengalami penurunan sebesar Rp20.453.713.711 atau 27,18 persen dibanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp75.241.908.379. Beban bunga ini timbul pada debitor untuk penggunaan dana unit lain. Instrumen keuangan dapat diklasifikasikan sebagai deposito, surat berharga utang, pinjaman dan piutang/ utang. Beban Bunga tidak dicatat pada Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengingat Utang Jangka Panjang dicatat di BA 999.01 (BABUN Pengelola Utang) yang berlokasi di Jakarta dan tidak dicatat pada entitas akuntansi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga tidak ada beban bunga yang terjadi di entitas Pemerintah Pusat. Beban Bunga tercatat pada entitas Pemerintah Provinsi yaitu sebesar Rp8.817.133.280. dan pada entitas

Pemkab/Pemkot sebesar Rp45.971.061.388

d. Subsidi

Subsidi berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 sebesar Rp15.920.009.714 dan tercatat pada entitas akuntansi pemerintah kab/kota, mengalami kenaikan sebesar Rp8.166.828.727 atau 105,34 persen disbanding tahun 2022 yaitu sebesar Rp7.753.180.987. Beban subsidi merupakan transfer tahun berjalan yang dibayar oleh unit pemerintah kepada perusahaan, baik berdasarkan tingkat aktivitas produksi atau kuantitas atau nilai barang/jasa yang diproduksi, dijual atau diimpor. Subsidi meliputi transfer ke korporasi publik dan perusahaan lain yang ditujukan untuk mengkompensasi kerugian operasi.

e. Hibah

Hibah berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 sebesar Rp8.415.642.267.876 mengalami penurunan sebesar Rp1.758.436.300.347 atau 26,41 persen dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp6.657.205.967.529. Beban hibah merupakan transfer tidak wajib dalam bentuk kas atau non-kas yang dibayarkan ke pemerintah asing, unit pemerintah umum lainnya atau organisasi internasional. Beban hibah konsolidasian sebagian besar merupakan beban transfer dari tingkatan pemerintahan lebih tinggi ke pemerintahan yang lebih rendah. Di luar beban hibah dalam bentuk transfer, terdapat porsi beban hibah yang lain dalam bentuk beban hibah yang dikeluarkan oleh Pemda kepada satker di lingkungan Pemerintah Pusat. Nilai beban hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp34.235.528.485.958, beban hibah Pemerintah Provinsi sebesar Rp3.500.304.536.052, dan beban hibah pada Pemerintah Kota/Kabupaten sebesar Rp4.304.933.175.297 dengan jumlah eliminasi (pengurangan) sebesar Rp33.625.123.929.431 sehingga beban hibah setelah eliminasi adalah Rp8.415.642.267.876.

f. Manfaat sosial

Manfaat sosial berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 sebesar Rp60.726.782.000 mengalami penurunan sebesar Rp1.656.018.683 atau 2,65 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp62.382.800.683. Manfaat sosial adalah transfer tahun berjalan kepada rumah tangga untuk menyediakan kebutuhan yang timbul dari kejadian seperti sakit, menganggur, pensiun, perumahan atau keadaan keluarga yang dapat dibayarkan dalam kas atau non-kas. Beban manfaat sosial konsolidasian sebesar Rp60.726.782.000 terdapat pada Pemerintah Pusat sebesar Rp 25.249.888.000 pada Pemerintah Kota/Kabupaten sebesar 35.476.894.000.

g. Beban lainnya

Belanja lainnya berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 sebesar Rp2.477.523.874.745 mengalami kenaikan sebesar Rp902.260.479.498 atau 57,28 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.575.263.395.247. Beban lainnya meliputi semua beban transaksi yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, meliputi beban properti selain bunga, pajak, denda dan penalti yang dibebankan oleh satu pemerintah ke pemerintah lain, transfer tahun berjalan



ke institusi nirlaba yang melayani rumah tangga, transfer modal selain hibah modal, dan klaim dan premi asuransi nonjiwa. Beban lainnya terdapat pada Pemerintah Pusat sebesar Rp997.015.664.631, pada Pemerintah Provinsi sebesar Rp458.659.766.355, dan pada Pemkab/Pemkot sebesar Rp1.021.848.443.759.

3. Saldo Operasi Bruto/Neto Tahun 2023 merupakan hasil pengurangan antara pendapatan dan beban yaitu sebesar Rp34.233.815.576.813. Rincian perhitungan Saldo Operasi Bruto/Neto adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Rincian Perhitungan Saldo Operasi Bruto/Neto

Pendapatan	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan	79.705.483.466.703	73.926.126.540.820	5.779.356.925.883	7,82%
Beban	45.471.667.889.889	41.400.084.523.122	4.071.583.366.767	9,83%
Saldo Operasi Bruto/Neto	34.233.815.576.813	32.526.042.017.698	1.707.773.559.115	5,25%

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh informasi bahwa terdapat kenaikan Saldo Operasi Bruto/Neto pada tahun 2023 yaitu mencapai Rp1.707.773.559.115 atau 5,25 persen dibandingkan tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya berasal dari Kenaikan pendapatan secara signifikan yang jauh melebihi dari kenaikan beban. Pada dasarnya jumlah pendapatan yang dikumpulkan oleh satker di Provinsi Sumatera Selatan tidak cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran belanja dan transfer di Sumatera Selatan, namun demikian jumlah transfer dan jumlah belanja satker pemerintah pusat diakui sebagai pendapatan penyesuaian. Berdasarkan laporan statistik keuangan pemerintah yang telah dikonsolidasi, pendapatan pemerintah pusat sebesar Rp70.829.969.574.873 dengan beban sebesar Rp45.960.043.945.371 sehingga Saldo Operasi Bruto/Neto sebesar Rp24.869.925.629.502. Kondisi di Pemerintah Provinsi menunjukkan bahwa pendapatan yang mampu dikumpulkan sebesar Rp9.868.008.283.790 dengan beban sebesar Rp8.413.349.681.338 sehingga Saldo Operasi Bruto/Neto sebesar Rp1.454.658.602.452, begitu pula kondisi di Pemkot/kab dengan pendapatan sebesar Rp32.632.629.537.471 dikurangi dengan beban Rp24.723.398.192.612, sehingga Saldo Operasi Bruto/Neto sebesar Rp7.909.231.344.860.

4. Transaksi aset non keuangan berupa akuisisi neto aset non keuangan tahun 2023 sebesar Rp14.635.939.272.378 mengalami kenaikan sebesar Rp1.673.341.818.349 atau 12,91 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp12.962.597.454.029. Transaksi Aset non Keuangan Tahun 2022 terdiri dari Akuisisi Aset Tetap sebesar Rp14.587.598.625.163 serta Aset yang Tidak Diproduksi sebesar Rp48.340.647.215.
5. Pinjaman Neto (Net Lending/Borrowing) tahun 2023 adalah sebesar Rp19.597.876.304.436 mengalami kenaikan sebesar Rp34.431.740.769 atau 0,18 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp19.563.444.563.667.



6. Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban berupa Akuisisi Neto Aset Keuangan tahun 2023 sebesar Rp18.916.992.244.595 serta Keterjadian Kewajiban Neto tahun 2023 sebesar minus Rp680.884.059.841.

2. NERACA

Neraca menyediakan informasi sumber daya (aset) berupa aset keuangan dan aset non keuangan serta kewajiban yang dimiliki pemerintah, pada setiap akhir tahun fiskal. Hal ini membuka kemungkinan untuk perbandingan aset dan kewajiban antar unit-unit dalam suatu sektor.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengelompokkan akun Neraca berdasarkan manfaat dan jangka waktunya, sehingga aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non lancar sedangkan kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Statistik Keuangan Pemerintah mengelompokkan akun Neraca ke dalam Aset Non-keuangan, Aset Keuangan dan Kewajiban. Aset Keuangan dan Kewajiban dikelompokkan berdasarkan residensi pihak debitur/kreditur dari instrumen tersebut ke dalam klasifikasi Dalam Negeri (Domestik) dan Luar Negeri. Aset keuangan dan kewajiban diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan likuiditas (tingkat kemudahan negosiasi, pengalihan, penjualan, perubahan bentuk) dan karakteristik hukum dari instrumen yang mendasari hubungan antara kreditur dan debitur. Struktur klasifikasi aset keuangan/kewajiban baik aset keuangan/kewajiban dalam negeri (domestik) maupun aset keuangan/kewajiban luar negeri adalah sebagai berikut:

- 1) Uang dan deposito

Uang terdiri dari uang kertas dan logam dalam sirkulasi yang umumnya digunakan dalam pembayaran. Deposito adalah aset keuangan yang mempunyai nilai nominal tetap dan digunakan untuk pembayaran. Deposito menyimpan nilai dan dapat menghasilkan bunga atau jasa tertentu bagi pemiliknya.

- 2) Surat berharga selain saham

Surat berharga selain saham adalah instrumen keuangan yang menjadi bukti bahwa suatu unit mempunyai kewajiban untuk melunasi dengan kas, instrumen keuangan atau hal lain yang bernilai ekonomis.

- 3) Pinjaman

Pinjaman adalah instrumen keuangan yang diciptakan ketika kreditur meminjamkan dana secara langsung ke debitur dan menerima dokumen non-negosiasi sebagai bukti dari aset tersebut.

- 4) Saham dan ekuitas lain

Saham dan ekuitas lain terdiri dari semua instrumen dan catatan yang mengakui klaim atas nilai sisa dari suatu perusahaan.

- 5) Cadangan teknis asuransi

Cadangan teknis asuransi terdiri dari ekuitas bersih rumah tangga dalam cadangan dana pensiun dan asuransi jiwa, premi yang dibayar di muka, dan cadangan klaim yang belum dibayar.

- 6) Derivatif keuangan

Derivatif keuangan adalah instrumen keuangan yang dihubungkan dengan instrumen keuangan,



indikator atau komoditas tertentu dan dapat diperjualkan dalam pasar keuangan dengan resiko keuangan tertentu.

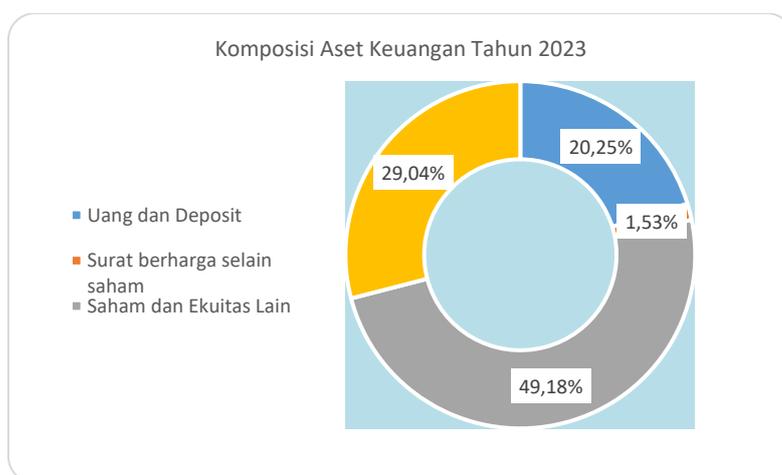
7) Piutang/utang lain

Piutang/utang lain terdiri dari kredit dagang, uang muka dan piutang/utang lain yang harus dibayar.

Aset dan kewajiban Pemerintah Umum terdiri dari konsolidasi aset dan kewajiban Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. *Mapping* data kewajiban Pemerintah Umum ke dalam klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah (Dalam Negeri/Domestik dan Luar Negeri) dilakukan berdasarkan jenis mata uang kewajiban tersebut (Rupiah atau mata uang asing) dan belum dilakukan berdasarkan residensi pihak debitur/kreditur. Kewajiban dengan mata uang Rupiah diklasifikasikan sebagai kewajiban dalam negeri (domestik) dan kewajiban dengan mata uang asing diklasifikasikan sebagai kewajiban luar negeri. Laporan statistik keuangan pemerintah ini juga belum dapat menggambarkan keterkaitan antara arus (*flow*) dan posisi (*stock*) secara sempurna.

Neraca Statistik Keuangan Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aset Keuangan Pemerintah Umum per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.478.819.219.802 yang terdapat pada Pemerintah Pusat sebesar Rp4.714.084.026.512, pada Pemerintah Provinsi sebesar Rp9.155.291.860.818 dan pada Pemerintah Daerah sebesar Rp9.059.756.193.755 setelah eliminasi akun resiprokal sebesar Rp450.312.861.283. Aset Keuangan Pemerintah Umum per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp863.784.890.282 atau 4,00 persen dibandingkan per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp21.615.034.329.520. Aset Keuangan Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah terdiri dari uang dan deposit, surat berharga selain saham, saham dan ekuitas lain serta piutang lainnya dengan komposisi sebagai berikut:



Grafik 31 Komposisi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2023

a. Aset Keuangan Domestik – Uang dan Deposit

Uang terdiri dari uang kertas dan logam dalam sirkulasi yang umumnya digunakan dalam pembayaran, sedangkan deposito merupakan aset keuangan yang mempunyai nilai nominal tetap dan digunakan untuk pembayaran. Deposito menyimpan nilai dan dapat menghasilkan bunga atau



jasa tertentu bagi pemiliknya. Aset Keuangan Domestik – Uang dan Deposit terdiri dari uang dan deposit yang ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Aset Keuangan Domestik - Uang dan Deposit per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.553.064.137.895 mengalami penurunan sebesar minus Rp310.451.982.134 atau 6,38 persen dibandingkan per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.863.516.120.029 terdiri dari.

b. Aset Keuangan Domestik – Surat berharga selain saham

Saldo Surat Berharga Utang dan Pinjaman selain saham per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp343.273.807.338. Surat berharga selain saham per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar minus Rp60.871.293.023 atau 15,05 persen dibandingkan per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp404.145.100.361. Surat berharga selain saham pada Pemerintah Pusat sebesar Rp305.900.000.000 berupa Investasi Jangka Pendek pada BLU dan Surat berharga selain saham pada Pemkab/Pemkot sebesar Rp37.373.807.338 berupa Dana Bergulir dan Investasi non Permanen Lainnya.

c. Aset Keuangan Domestik – Saham dan Ekuitas Lain

Saham dan ekuitas lain terdiri dari semua instrumen dan catatan yang mengakui klaim atas nilai sisa dari suatu perusahaan. Aset Keuangan Domestik – Saham dan Ekuitas Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.054.173.868.707 berupa Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Saham dan ekuitas lain mengalami kenaikan sebesar Rp93.583.403.061 atau 0,85 persen dibandingkan per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp10.960.590.465.646.

Saham dan Ekuitas Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.054.173.868.707 merupakan Aset Keuangan Domestik – Saham dan Ekuitas Lain yang berasal dari Pemerintah Provinsi dengan sebesar Rp7.464.748.909.688 serta dari Pemerintah Kab/Kota sebesar Rp 3.589.424.959.020.

d. Aset Keuangan Domestik – Piutang Lainnya

Piutang Lainnya terdiri dari kredit dagang, uang muka dan piutang/utang lain yang harus dibayar. Aset Keuangan Domestik - Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.528.307.405.861. Sebagian dari Piutang Lainnya konsolidasian merupakan piutang transfer dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi ke pemerintahan yang lebih rendah sehingga perlu dilakukan eliminasi. Dalam hal ini, eliminasi dilakukan terhadap Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yaitu piutang transfer pemda dari Pemprov atas bagi hasil pajak. sedangkan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tidak dilakukan eliminasi karena tidak diketahui nilai utang Transfer pada Pemerintah Pusat (tidak dilakukan split pada masing-masing kanwil). Nilai Piutang Lainnya sebelum eliminasi adalah Rp6.978.620.267.144 yang terdiri dari Piutang Lainnya Pempus sebesar Rp 2.294.876.367.141, Piutang Lainnya Pemerintah Provinsi sebesar R 1.535.661.544.792, dan Piutang Lainnya pada Pemerintah Kota/Kabupaten sebesar Rp 3.148.082.355.211 dengan jumlah eliminasi (pengurangan) sebesar minus Rp450.312.861..

2. Aset Non-Kuangan Pemerintah Umum per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 305.471.518.691.073 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.021.028.294.651 atau 2.01 persen dibandingkan per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp299.450.490.396.422. Aset NonKuangan Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Aset Tetap

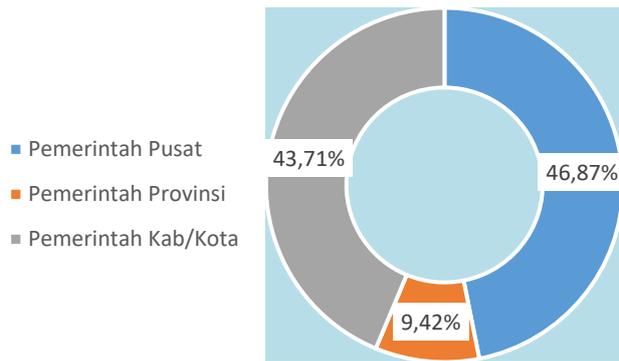
Aset Tetap meliputi Gedung dan Bangunan, Mesin dan Peralatan, dan Aset Tetap Lainnya. Laporan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah menunjukkan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp143.289.570.974.685 mengalami kenaikan sebesar Rp5.104.691.307.725 atau 3,69 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp 38.184.879.666.960. Berikut grafik rincian Aset Tetap tahun 2023:



Grafik 32 Komposisi Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

Jika dilihat dari komposisi Aset Tetap Konsolidasian tahun 2023, paling besar disumbangkan oleh Pemerintah Pusat dengan persentase sebesar 46,87 persen dengan jumlah nominal Rp67.161.564.991.589 diikuti oleh Pemerintah Kab/Kota dengan persentase sebesar 43,71 persen dengan jumlah nominal sebesar Rp62.625.829.336.623 serta Pemerintah Provinsi dengan persentase sebesar 9,42 persen dengan jumlah nominal sebesar Rp13.502.176.646.473.

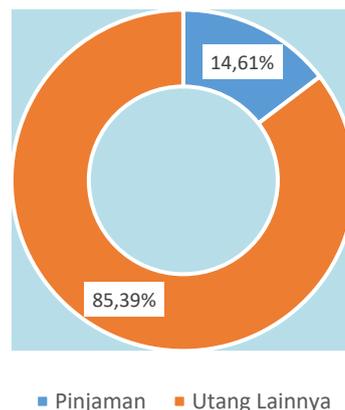
Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Kepemilikan Tahun 2023



Grafik 33 Komposisi Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

- b. Konsolidasian Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.185.049.267.501 yang mengalami kenaikan sebesar Rp110.354.110.792 atau 5,59 persen dibandingkan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp3.074.695.156.709. Persediaan terdiri-dari Persediaan di Pemerintah pusat sebesar Rp2.326.484.930.177, Pemerintah Provinsi sebesar Rp100.611.085.181, Pemkab/Pemkot sebesar Rp757.953.252.143.
 - c. Konsolidasian Aset yang tidak diproduksi per 31 Desember 2023 sebesar Rp158.996.898.448.888 yang mengalami kenaikan sebesar Rp805.982.876.135 atau 0,51 persen dibanding per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp158.190.915.572.753 yang sebagian besar berbentuk Tanah, dengan rincian di Pempus sebesar Rp133.656.076.103.549, Pemerintah Provinsi sebesar Rp12.297.793.502.931, Pemkab/Pemkot sebesar Rp13.043.028.842.408.
3. Kewajiban Pemerintah Umum per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.985.719.434.778 yang mengalami penurunan sebesar Rp980.019.897.923 atau 24,47 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar Rp4.005.699.536.855, komposisi Kewajiban Pemerintah umum berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Komposisi Kewajiban Pemerintah Umum Tahun 2023



Grafik 34 Komposisi Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

a. Kewajiban Domestik-Pinjaman

Kewajiban Domestik – Pinjaman Saham per per 31 Desember 2023 sebesar Rp728.596.530.283 yang mengalami penurunan sebesar minus Rp543.198.772.856 atau 42,71 persen dibandingkan per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp1.271.795.303.139. Nilai tersebut terdapat pada Pemerintah Provinsi sebesar Rp103.177.705.206 dan pada Pemerintah Kab/Kota sebesar Rp625.418.825.076.

b. Kewajiban Domestik-Utang Lainnya

Kewajiban Domestik - Utang lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.257.122.904.495 yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.523.218.670.778 atau 55,72 persen dibandingkan per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.733.904.233.717. Sebagian dari Utang Lainnya konsolidasian merupakan piutang transfer dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi ke pemerintahan yang lebih rendah sehingga perlu dilakukan eliminasi. Dalam hal ini, eliminasi dilakukan terhadap Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yaitu Utang transfer pemda dari pemprov atas bagi hasil pajak. sedangkan utang Transfer pada Pemerintah Pusat tidak dilakukan eliminasi karena tidak diketahui nilainya (tidak dilakukan split pada masing-masing kanwil). Nilai Utang Lainnya sebelum eliminasi adalah Rp4.707.435.765.778 yang terdiri dari Utang Lainnya Pempus sebesar Rp2.439.784.028.931, Utang Lainnya Pemerintah Provinsi sebesar Rp829.578.451.715, dan Utang Lainnya pada Pemerintah Kota/Kabupaten sebesar Rp1.438.073.285.132 dengan jumlah eliminasi (pengurangan) sebesar minus Rp450.312.861.283.

3. LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas menyajikan informasi atas aliran kas masuk dan keluar pada suatu entitas. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil konsolidasi Laporan Sumber dan Penggunaan Kas - Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas - Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidas.

Berdasarkan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023, secara umum Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mencapai Rp65.107.811.184.452 yang diperoleh dari Arus Kas Masuk sebesar Rp48.007.084.693.623 dikurangi Arus Kas Keluar sebesar Rp22.964.380.466.699. Arus Kas Bersih dari Investasi Non Keuangan mencapai Rp16.054.897.912.635 yang diperoleh dari Pembelian Aset Non Keuangan sebesar Rp16.035.190.061.328 dan Penjualan Aset non Keuangan sebesar Rp28.632.795.909. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan mencapai minus Rp565.741.267.380 yang berasal dari Akuisisi Aset Keuangan Neto selain Kas sebesar Rp115.142.792.461 dan Keterjadian Kewajiban Neto sebesar minus Rp680.884.059.841. Penjumlahan seluruh aktivitas Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah menghasilkan Perubahan Bersih dalam Persediaan Uang Tunai sebesar Rp80.596.967.829.707.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN FACE LAPORAN

LKPK & LSKP TAHUN 2023 *UNAUDITED*
Kanwil DJPb Sumsel





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LKPK & LSKP TAHUN 2023 *UNAUDITED*
Kanwil DJPb Sumsel



LAPORAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	Pendapatan Negara dan Hibah	29.169.729.815.937	27.520.216.081.423	6,0%
A.1	Pendapatan Perpajakan	23.309.222.171.057	22.372.901.137.390	4,2%
1	Pajak Dalam Negeri	23.012.226.694.725	21.776.105.118.611	5,7%
2	Pajak Perdagangan Internasional	296.995.476.332	596.796.018.779	-50,2%
A.2	Pendapatan Bukan Pajak	5.719.843.112.303	4.464.315.186.967	28,1%
1	Pendapatan Sumber Daya Alam			
2	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	452.312.073.909	312.955.036.724	44,5%
3	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya	2.345.322.203.217	1.307.403.743.048	79,4%
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA			
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA			
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA			
7	Bantuan Keuangan - LRA		149.099.516.458	-100,0%
8	Pendapatan BLU	2.922.208.835.178	2.694.856.890.736	8,4%
A.3	Pendapatan Hibah	140.664.532.577	682.999.757.066	-79,4%
1	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	140.664.532.577	682.999.757.066	-79,4%
2	Pendapatan Hibah Luar Negeri			
B	Belanja Pemerintah	60.136.239.958.176	54.386.602.332.380	10,6%
1	Belanja Pegawai	17.433.827.632.855	17.449.425.513.735	-0,1%
2	Belanja Barang Dan Jasa	18.125.437.694.048	16.344.307.891.455	10,9%
3	Belanja Modal	14.664.572.068.286	12.986.517.809.257	12,9%
4	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	54.788.194.668	75.241.908.379	-27,2%
5	Subsidi	15.920.009.714	7.753.180.987	105,3%
6	Hibah	1.637.671.392.172	903.977.271.542	81,2%
7	Belanja Bantuan Sosial	60.726.782.000	62.382.800.683	-2,7%
8	Belanja Lain-lain	5.924.002.538	35.639.610.692	
9	Belanja Tak Terduga			
10	Transfer	8.137.372.181.895	6.521.356.345.649	24,8%
C	Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(30.966.510.142.238)	(26.866.386.250.957)	15,3%
D	Pembiayaan	2.464.725.160.533	2.346.982.374.173	5,0%
	Penerimaan Pembiayaan	3.324.679.762.835	3.062.429.972.050	8,6%
	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	3.324.679.762.835	3.062.429.972.050	8,6%

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	33.927.750.000	190.040.104.713	-82,1%
2	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan		188.825.236.249,6	-100,0%
3	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat		72.180.084.070	-100,0%
4	Penerimaan Pembiayaan - Pemda	3.290.752.012.835	2.611.384.547.018,08	26,0%
	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri			
	Pengeluaran Pembiayaan	859.954.602.302	715.447.597.877	20,2%
	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	744.811.809.841	610.457.282.679	22,0%
1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	97.863.655.410	5.000.000.000	1857,3%
2	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan	616.948.154.431	529.178.766.549	16,6%
3	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		6.278.516.130	-100,0%
4	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	70.000.000.000	-57,1%
	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri			
	Penyertaan Modal Negara	115.142.792.461	104.990.315.198	9,7%
E	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-(D+C)	(28.501.784.981.706)	(24.519.403.876.783)	16,2%

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	20.276.734.573.405	18.301.266.578.249	10,79%
A.1	Pendapatan Perpajakan	16.804.928.797.437	15.887.133.218.686	5,78%
1	Penerimaan Pajak Dalam Negeri	16.507.933.321.105	15.290.337.199.907	7,96%
2	Pajak Perdagangan Internasional	296.995.476.332	596.796.018.779	-50,24%
A.2	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.471.805.775.968	2.414.133.359.563	43,81%
1	Penerimaan Sumber Daya Alam			
2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)			
3	Pendapatan PNPB Lainnya	1.686.886.713.409	862.549.570.988	95,57%
4	Pendapatan BLU	1.784.919.062.559	1.551.583.788.575	15,04%
A.3	Pendapatan Hibah	-	-	
1	Hibah	-	-	
B	BELANJA NEGARA	50.564.386.446.674	46.429.830.814.624	8,90%
B.1	Belanja Pemerintah Pusat per Wilayah	16.328.857.960.716	13.917.499.302.339	17,33%
1	Belanja Pegawai	5.198.320.024.637	5.226.195.293.611	-0,53%
2	Belanja Barang	6.500.945.546.776	5.300.912.772.927	22,64%
3	Belanja Modal	4.604.342.501.303	3.370.178.847.801	36,62%
4	Belanja Bantuan Sosial	25.249.888.000	20.212.388.000	24,92%
B.2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	34.235.528.485.958	32.512.331.512.285	5,30%
1	Transfer Ke Daerah	31.416.083.863.568	29.961.952.700.881	4,85%
	Dana Transfer Umum	25.780.994.499.695	24.102.796.823.021	6,96%
1.1	Transfer Dana Bagi Hasil	13.540.987.828.695	12.532.998.808.021	8,04%
1.2	Transfer Dana Alokasi Umum	12.240.006.671.000	11.569.798.015.000	5,79%
	Dana Transfer Khusus	5.635.089.363.873	5.570.969.624.860	1,15%
1.4	Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik	1.512.259.719.656	1.687.762.452.277	-10,40%
1.5	Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.122.829.644.217	3.883.207.172.583	6,17%
2	Insentif Fiskal	250.140.289.500	288.186.253.000	-13,20%
2	Dana Desa	2.569.304.332.890	2.550.378.811.404	0,74%
C	Surplus (Defisit) Anggaran (A-B)	(30.287.651.873.269)	(28.128.564.236.375)	7,68%
D	Pembiayaan			
E	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SILPA/SIKPA	(30.287.651.873.269)	(28.128.564.236.375)	7,68%

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	Pendapatan Pemerintah Daerah	39.017.814.635.911	39.352.221.310.226	-0,85%
A.1	Pendapatan Asli Daerah	8.758.284.627.044	8.548.000.560.705	2,46%
1	Pajak Daerah	6.504.293.373.620	6.485.767.918.704	0,29%
2	Retribusi Daerah	112.477.411.819	114.447.530.393	-1,72%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	452.312.073.909	312.955.036.724	44,53%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.689.201.767.697	1.634.830.074.884	3,33%
A.2	Pendapatan Transfer	29.948.682.774.397	29.693.924.648.348	0,86%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	27.185.779.737.707	26.855.359.583.944	1,23%
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	3.554.655.956.672	3.955.741.769.182	-10,14%
1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	6.884.984.792.038	6.698.330.304.940	2,79%
1.3	Dana Alokasi Umum	11.842.874.891.543	11.511.790.686.929	2,88%
1.4	Dana Alokasi Khusus	4.903.264.097.455	4.689.496.822.893	4,56%
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	2.762.903.036.690	2.838.565.064.404	-2,67%
2.1	Dana Penyesuaian			
2.2	Dana Insentif Daerah	221.063.979.000	288.186.253.000	-23,29%
2.3	Dana Desa	2.541.839.057.690	2.550.378.811.404	-0,33%
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi			
3.1	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA			
4	Transfer Bantuan Keuangan			
A.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	310.847.234.470	1.110.296.101.173	-72,00%
1	Pendapatan Hibah	140.664.532.577	682.999.757.066	-79,40%
2	Pendapatan Lainnya	170.182.701.893	427.296.344.106	-60,17%
B	Belanja Negara	39.696.672.904.881	38.090.043.324.808	4,22%
B.1	Belanja Operasi	25.603.856.246.043	24.295.768.112.243	5,38%
1	Belanja Pegawai	12.235.507.608.218	12.223.230.220.124	0,10%
2	Belanja Barang dan Jasa	11.624.492.147.272	11.043.395.118.528	5,26%
3	Belanja Bunga	54.788.194.668	75.241.908.379	-27,18%
4	Subsidi	15.920.009.714	7.753.180.987	105,34%
5	Hibah	1.637.671.392.172	903.977.271.542	81,16%
6	Bantuan Sosial	35.476.894.000	42.170.412.683	-15,87%
B.2	Belanja Modal	10.060.229.566.983	9.616.338.961.456	4,62%
1	Belanja Modal Tanah	34.548.876.526	54.327.287.228	-36,41%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.574.367.057.055	1.352.592.225.918	16,40%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.950.171.446.103	1.708.431.731.733	14,15%
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	6.254.310.882.848	6.211.830.673.382	0,68%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	186.192.935.282	169.800.685.604	9,65%

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
6	Belanja Modal Aset Lainnya	31.269.967.215	27.587.783.684	13,35%
7	Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	26.160.847.787	37.026.677.545	-29,35%
8	Belanja Modal BLUD	3.207.554.167	54.741.896.363	-94,14%
B.3	Belanja Tak Terduga	5.924.002.538	35.639.610.692	-83,38%
1	Belanja Tak Terduga	5.924.002.538	35.639.610.692	-83,38%
C	Transfer	4.026.663.089.316	4.142.296.640.416	-2,79%
C.1	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan	54.460.531.759	286.051.943.120	-80,96%
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	49.884.269.285	283.575.381.619	-82,41%
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.576.262.474	2.476.561.501	84,78%
C.2	Transfer Bantuan Keuangan	3.972.202.557.557	3.856.244.697.296	3,01%
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	1.964.937.273.729		
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.007.265.283.828	3.856.244.697.296	-47,95%
3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			
D	Surplus (Defisit) Anggaran (A - B - C)	(678.858.268.969)	1.262.177.985.418	-153,78%
E	Pembiayaan	2.464.725.160.533	2.346.982.374.173	5,02%
E.1	Penerimaan Pembiayaan	3.324.679.762.835	3.062.429.972.050	8,56%
1	Penggunaan SILPA	3.290.752.012.835	2.611.384.547.018	26,02%
2	Pencairan Dana Cadangan			
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
4	Pinjaman Dalam Negeri	33.927.750.000	451.045.425.032	-92,48%
5	Penerimaan Kembali Piutang			
6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya			
E.2	Pengeluaran Pembiayaan	859.954.602.302	715.447.597.877	20,20%
1	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	70.000.000.000	-57,14%
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	115.142.792.461	104.990.315.198	9,67%
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	714.811.809.841	540.457.282.679	32,26%
4	Pemberian Pinjaman Daerah			
5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya			
F.	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+E)	1.785.866.891.563	3.609.160.359.592	-50,52%



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NERACA

LKPK & LSKP TAHUN 2023 *UNAUDITED*
Kanwil DJPb Sumsel



**NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	ASET	326.285.824.291.482	319.469.620.604.697	2,13%
A.1	Aset Lancar	10.176.807.078.412	9.856.993.911.345	3,24%
1	Kas dan setara kas	3.914.020.661.669	5.049.534.883.039	-22,49%
2	Uang muka rekening BUN-khusus pusat			
3	Investasi jangka pendek	388.548.923.943	109.648.923.943	254,36%
4	Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja	46.261.230.405	64.156.313.209	-27,89%
5	Piutang	2.642.926.994.894	1.558.958.634.446	69,53%
	Piutang Perpajakan	1.532.513.262.642	1.341.777.970.202	14,22%
	Piutang Bukan Pajak	2.653.378.045.322	1.717.843.963.774	54,46%
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	3.317.598.034	3.578.960.619	-7,30%
	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	163.438.057	181.149.595	-9,78%
	Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman			
	Piutang lain-lain	117.901.203.636	91.313.414.463	29,12%
	Penyisihan piutang tak tertagih	(1.664.346.552.797)	(1.595.736.824.207)	4,30%
6	Persediaan	3.185.049.267.501	3.074.695.156.709	3,59%
7	Piutang PFK			
A.2	Investasi jangka panjang	11.091.547.676.045	10.997.964.272.984	0,85%
1	Investasi jangka panjang non permanen	37.373.807.338	37.373.807.338	0,00%
2	Investasi jangka panjang permanen	11.054.173.868.707	10.960.590.465.646	0,85%
3	Dana Bergulir Diragukan Tertagih			
A.3	Aset Tetap	295.450.645.050.715	289.953.748.233.296	1,90%
1	Tanah	158.966.583.537.975	158.187.573.516.999	0,49%
2	Peralatan dan Mesin	31.944.876.918.410	29.317.335.567.276	8,96%
3	Gedung dan Bangunan	41.531.771.212.717	38.844.686.009.291	6,92%
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	154.536.405.562.291	145.965.338.835.314	5,87%
5	Aset tetap lainnya	3.137.797.970.195	2.948.581.391.219	6,42%
6	Konstruksi dalam pengerjaan	7.405.299.526.561	5.970.599.520.658	24,03%
7	Konsesi Jasa	4.423.874.645.407	3.984.035.519.818	11,04%
8	Akumulasi penyusutan	(106.495.964.322.841)	(95.264.402.127.278)	11,79%
9	Aset Tetap Yang Belum Diregister			
A.4	Properti Investasi	16.581.036.000	16.581.036.000	0,00%
A.5	Dana Cadangan	100.011.660.275	70.011.660.275	42,85%
1	Dana Cadangan	100.011.660.275	70.011.660.275	42,85%
A.6	Piutang Jangka Panjang	38.281.229.097	43.348.382.724	-11,69%

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
1	Tagihan piutang penjualan angsuran	820.127.783	997.238.301	-17,76%
2	Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	30.346.860.359	35.147.133.909	-13,66%
3	Piutang jangka panjang kredit pemerintah			
4	Piutang jangka panjang lainnya	7.281.307.551	7.371.307.551	-1,22%
5	Penyisihan piutang jangka panjang	(167.066.596)	(167.297.038)	-0,14%
A.7	Aset Lainnya	9.411.950.560.938	8.530.973.108.073	10,33%
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	2.136.324.332.073	2.120.586.484.884	0,74%
2	Aset tidak berwujud	771.502.426.292	782.688.305.304	-1,43%
3	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	456.382.892.008	4.920.652.772	9174,84%
4	Dana Penjaminan			
5	Dana Kelolaan BLU			
6	Aset lain-lain	6.879.536.916.496	6.610.183.027.270	4,07%
7	Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya			
8	Aset Lainnya Penerusan Pinjaman			
9	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(831.796.005.930)	(987.405.362.157)	-15,76%
B	KEWAJIBAN/UTANG	4.985.719.434.778	4.005.699.536.855	24,47%
B.1	Kewajiban Jangka Pendek	3.113.501.886.335	2.565.611.389.505	21,36%
1	Utang perhitungan pihak ketiga	1.071.067.472	1.087.038.413	-1,47%
2	Utang kepada pihak ketiga	1.787.467.565.455	958.994.086.329	86,39%
3	Utang bunga	3.954.187.929	4.471.489.637	-11,57%
4	Utang subsidi			
5	Utang Transfer	1.242.737.152		100%
6	Bagian lancar utang jangka panjang	296.063.331.062	841.571.246.422	-64,82%
7	Utang surat perbendaharaan negara			
8	Utang Yang Belum Ditagihkan			
9	Utang jangka pendek lainnya	684.043.068.124	410.261.348.009	66,73%
10	Uang Muka	525.975.970	40.133.122	1210,58%
11	Utang Jangka Pendek Lainnya	339.133.953.171	349.186.047.573	-2,88%
B.2	Kewajiban Jangka Panjang	1.872.217.548.443	1.440.088.147.350	30,01%
1	Utang jangka panjang dalam negeri	432.534.954.446	430.225.811.942	0,54%
2	Utang jangka panjang luar negeri		-	!
3	Kewajiban Konsesi Jasa	1.439.682.593.997	1.009.862.335.408	42,56%
C	EKUITAS	321.300.104.856.704	315.463.921.067.841	1,85%

**NERACA PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

No	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	ASET	206.871.467.507.500	203.533.700.603.068	1,64%
A.1	Aset lancar	5.590.165.368.071	4.445.751.905.452	25,74%
1	Kas dan Setara Kas	1.656.924.767.363	1.511.951.676.828	9,59%
1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.182.438.238	566.109.092	108,87%
1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	350.128.001	50.001	700,142%
1.3	Kas Lainnya dan Setara Kas	555.922.486.694	7.824.766.703	7004,65%
1.4	Kas pada BLU	1.099.469.714.430	1.503.560.751.033	-26,88%
2	Investasi Jangka Pendek/BLU (Investasi dalam Deposito)	305.900.000.000	27.000.000.000	1032,96%
3	Belanja dibayar di muka	8.606.087.176	19.684.994.252	-56,28%
4	Uang Muka Belanja	32.409.076	20.347.670	59,28%
5	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	9.720.671.618	16.202.407.000	-40,00%
6	Piutang	1.282.496.502.661	668.650.510.910	91,80%
6.1	Piutang Pajak	1.532.513.262.642	1.341.777.970.202	14,22%
6.2	Piutang Bukan Pajak	627.334.121.625	180.832.667.620	246,91%
6.3	Bagian Lancar TP/TGR	163.438.057	181.149.595	-9,78%
6.4	Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima)			
6.5	Piutang dari Kegiatan BLU	109.061.158.068	79.448.177.967	37,27%
6.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(986.575.477.731)	(933.589.454.474)	5,68%
7	Persediaan	2.326.484.930.177	2.202.241.968.792	5,64%
8	Persediaan Belum Diregister			
A.2	Investasi Jangka Panjang			
A.3	Aset Tetap	200.150.144.494.957	198.618.551.857.026	0,77%
1	Tanah	133.625.761.192.636	132.891.106.902.454	0,55%
2	Peralatan dan Mesin	14.935.518.985.601	13.896.991.181.010	7,47%
3	Gedung dan Bangunan	13.345.582.918.686	12.553.812.131.985	6,31%
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	69.680.439.288.608	67.687.470.822.441	2,94%
5	Aset Tetap Lainnya	624.007.806.902	592.261.627.712	5,36%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.418.232.257.965	4.105.364.393.101	31,98%
7	Aset Tetap Belum Diregister			
8	Aset Konsesi Jasa	4.423.874.645.407	3.984.035.519.818	11,04%
9	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(41.903.272.600.848)	(37.092.490.721.495)	12,97%
A.4	Properti Investasi	16.581.036.000	16.581.036.000	0,00%
A.5	Piutang Jangka Panjang	7.278.152.283	7.324.010.513	-0,63%
1	Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	163.911.328	120.000.000	36,59%
2	Piutang Jangka Panjang Lainnya	7.281.307.551	7.371.307.551	-1,22%
3	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	(167.066.596)	(167.297.038)	-0,14%
A.6	Aset Lainnya	1.107.298.456.189	445.491.794.077	148,56%
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			

No	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
2	Aset Tak Berwujud	280.042.819.577	306.499.145.703	-8,63%
3	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	456.382.892.008	4.920.652.772	9174,84%
4	Aset Lain-lain	938.349.376.409	859.713.943.711	9,15%
5	Akumulasi Penyusutan	(567.476.631.805)	(725.641.948.109)	-21,80%
5.1	Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	(457.995.457.723)	(631.671.668.963)	-27,49%
5.2	Akum. Amortisasi Aset Lainnya	(109.481.174.082)	(93.970.279.146)	16,51%
B	KEWAJIBAN	2.439.784.028.931	1.321.411.337.484	84,63%
B.1	Kewajiban Jangka Pendek	1.000.099.679.708	311.547.246.850	221,01%
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	557.165.590.689	99.171.190.897	461,82%
2	Utang Transfer	1.242.737.152		100%
3	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	399.036.785.725	129.340.064.952	208,52%
4	Uang Jangka Pendek Lainnya	16.815.312	179.753.906	-90,65%
5	Pendapatan Diterima Dimuka	42.111.774.860	82.816.103.973	-49,15%
6	Uang Muka dari KPPN	525.975.970	40.133.122	1210,58%
B.2	Kewajiban Jangka Panjang	1.439.684.349.223	1.009.864.090.634	42,56%
1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	1.755.226	1.755.226	0,00%
2	Kewajiban Konsesi Jasa	1.439.682.593.997	1.009.862.335.408	42,56%
C	EKUITAS	204.431.683.478.569	202.212.289.265.585	1,10%
D	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	206.871.467.507.500	203.533.700.603.068	1,64%
	Selisih Aset = Kewajiban dan Ekuitas			

**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	ASET	119.414.356.783.982	115.935.920.001.631	3,00%
A.1	ASET LANCAR	4.586.641.710.341	5.411.242.005.894	-15,24%
1	Kas dan Setara Kas	2.257.095.894.306	3.537.583.206.211	-36,20%
1.1	Kas di Kas Daerah	1.956.341.962.905	3.201.483.558.414	-38,89%
1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	125.690.668	335.980.001	-62,59%
1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	561.624.964	362.773.703	54,81%
1.4	Kas di BLUD	239.064.509.330	216.049.225.527	10,65%
1.5	Kas Lainnya	58.707.377.434	114.113.149.573	-48,55%
1.6	Setara Kas	2.294.729.005	5.238.518.993	-56,20%
2	Investasi Jangka Pendek	82.648.923.943	82.648.923.943	0,00%
3	Piutang Pendapatan	2.026.043.923.697	1.537.011.296.154	31,82%
4	Piutang Lainnya	12.157.643.602	15.444.197.115	-21,28%
5	Penyisihan Piutang	(677.771.075.066)	(662.147.369.733)	2,36%
5	Beban Dibayar Dimuka	27.902.062.535	28.248.564.287	-1,23%
7	Persediaan	858.564.337.324	872.453.187.917	-1,59%
A.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	11.091.547.676.045	10.997.964.272.984	0,85%
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	37.373.807.338	37.373.807.338	0,00%
1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	33.545.100.361	33.545.100.361	0,00%
1.2	Dana Bergulir	3.828.706.977	3.828.706.977	0,00%
1.3	Cadangan Dana Bergulir			
1.4	Investasi Non Permanen Lainnya			
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	11.054.173.868.708	10.960.590.465.646	0,85%
2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.015.668.770.212	10.922.085.367.150	0,86%
2.2	Investasi Permanen Lainnya	38.505.098.496	38.505.098.496	0,00%
A.3	ASET TETAP	95.300.500.555.758	91.335.196.376.271	4,34%
1	Tanah	25.340.822.345.339	25.296.466.614.545	0,18%
2	Peralatan dan Mesin	17.009.357.932.809	15.420.344.386.266	10,30%
3	Gedung dan Bangunan	28.186.188.294.031	26.290.873.877.306	7,21%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	84.855.966.273.683	78.277.868.012.873	8,40%
5	Aset Tetap Lainnya	2.513.790.163.293	2.356.319.763.507	6,68%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.987.067.268.596	1.865.235.127.557	6,53%
7	Akumulasi Penyusutan	(64.592.691.721.993)	(58.171.911.405.783)	11,04%
	Akumulasi Penyusutan-Peralatan dan Mesin	(12.429.893.551.631)	(11.135.917.420.769)	11,62%
	Akumulasi Penyusutan-Gedung dan Bangunan	(6.079.867.343.776)	(5.527.706.342.611)	9,99%
	Akumulasi Penyusutan-Jalan, Irigasi dan Jaringan	(44.841.181.791.373)	(40.398.896.779.242)	11,00%
	Akumulasi Penyusutan-Aset Tetap Lainnya	(1.241.749.035.212)	(1.109.390.863.161)	11,93%

NO.	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A.4	Dana Cadangan	100.011.660.275	70.011.660.275	42,85%
A.5	ASET LAINNYA	8.335.655.181.563	8.121.505.686.207	2,64%
1	Tagihan Jangka Panjang	31.003.076.814	36.024.372.210	-13,94%
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.136.324.332.073	2120.586.484.884	0,74%
3	Aset Tidak Berwujud	227.140.232.590	214.425.745.554	5,93%
4	Aset Lain-lain	5.941.187.540.087	5.750.469.083.559	3,32%
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
B	KEWAJIBAN	2.545.935.405.847	2.684.288.199.372	-5,15%
B.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.113.402.206.627	2.254.064.142.655	-6,24%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.071.067.472	1.087.038.413	-1,47%
2	Utang Bunga	3.954.187.929	4.471.489.637	-11,57%
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	296.063.331.062	841.571.246.422	-64,82%
4	Pendapatan Diterima Dimuka	21.243.919.382	20.907.444.284	1,61%
5	Utang Belanja	1.230.301.974.766	859.822.895.432	43,09%
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	560.767.726.015	526.204.028.467	6,57%
B.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	432.533.199.220	430.224.056.717	0,54%
1	Utang Dalam Negeri	368.801.249.813	366.492.107.309	0,63%
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	63.731.949.408	63.731.949.408	0,00%
C	EKUITAS	116.868.421.378.135	113.251.631.802.259	3,19%
D	JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	119.414.356.783.982	115.935.920.001.631	3,00%
Selisih Aset = Kewajiban dan Ekuitas				



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAP. PERUBAHAN EKUITAS

LKPK & LSKP TAHUN 2023 *UNAUDITED*
Kanwil DJPb Sumsel



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	Ekuitas Awal	315.432.799.474.525	299.143.023.805.086	5,45%
1	Ekuitas Awal Pemerintah Pusat	202.181.167.672.268	193.383.683.314.438	4,55%
2	Ekuitas Awal Pemerintah Daerah	113.251.631.802.257	105.759.340.490.648	7,08%
A.1	Penyesuaian Ekuitas Awal			
B	EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	315.432.799.474.525	299.143.023.805.086	5,45%
C	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	5.867.305.373.178	16.320.897.262.756	100%
C.1	Surplus/Defisit LO	5.773.910.195.014	8.932.785.514.521	-35,36%
C.2	KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	1.323.200.341.351	1.480.404.337.267	-10,62%
1	Penyesuaian Nilai Aset			
2	Koreksi SILPA			
3	Koreksi Nilai Persediaan	(3.740.981.867)	(7.375.290.977)	-49,28%
4	Selisih Revaluasi Aset Tetap		30.234.426.107	-100,00%
5	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	863.782.597.133	97.349.766.725	787,30%
6	Koreksi atas Reklasifikasi Aset	23.654.902.927	(2.263.674.596)	-
7	Koreksi Lain-lain	439.503.823.158	1.362.459.110.008	-67,74%
C.3	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1.229.805.163.187)	5.907.707.410.967	-120,82%
C.4	REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE			
E	EKUITAS AKHIR	321.300.104.847.704	315.463.921.067.842	1,85%

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	EKUITAS AWAL	202.181.167.672.268	193.383.683.314.439	4,55%
A.1	PENYESUAIAN EKUITAS			
B	EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	202.181.167.672.268	193.383.683.314.439	4,55%
C	KENAIKAN/PENURUTAN EKUITAS	2.250.515.806.301	8.828.605.951.146	-74,51%
C.1	SURPLUS/DEFISIT LO	4.207.000.953.035	3.005.214.869.504	39,99%
C.2	KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(726.679.983.547)	(84.316.329.325)	761,85%
1	Penyesuaian Nilai Aset			
2	Koreksi Nilai Persediaan	(3.740.981.867)	(20.009.692.600)	-81,30%
3	Selisih Revaluasi Aset			
4	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	863.782.597.133	97.349.766.725	787,30%
5	Koreksi atas Reklasifikasi	23.654.902.927	(2.263.674.596)	-1144,98%
6	Koreksi Lain-lain	(1.610.376.501.740)	(159.392.728.854)	910,32%
C.3	TRANSAKSI ATAS ENTITAS	(1.229.805.163.187)	5.907.707.410.967	-120,82%
C.4	REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS			
1	Uang muka dari KPPN			
E	EKUITAS AKHIR	204.431.683.478.569	202.212.289.265.585	1,10%

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	EKUITAS AWAL	113.251.631.802.257	105.759.340.490.648	7,08%
B	SURPLUS/DEFISIT-LO	1.566.909.241.979	5.927.570.645.016	-73,57%
C	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN- KESALAHAN MENDASAR	2.049.880.324.898	1.564.720.666.592	31,01%
C.1	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		12.634.401.623	-100,00%
C.2	SELISIH REVALUASI ASET TETAP		30.234.426.107	-100,00%
C.3	LAIN-LAIN	2.049.880.324.898	1.521.851.838.862	34,70%
D	EKUITAS AKHIR	116.868.421.369.135	113.251.631.802.256	3,19%



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

LKPK & LSKP TAHUN 2023 *UNAUDITED*
Kanwil DJPb Sumsel



**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	KEGIATAN OPERASIONAL			
A.1	PENDAPATAN OPERASIONAL	62.370.610.882.224	62.391.511.297.581	4,66%
1	Pendapatan Perpajakan-LO	25.323.115.925.090	23.847.878.030.568	6,19%
2	Pendapatan Bukan Pajak-LO	3.133.541.391.630	2.549.598.315.818	22,90%
2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam			
2.2	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	450.740.867.279	355.631.571.510	26,74%
2.3	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.682.800.524.350	2.193.966.744.308	22,28%
3	Pendapatan Transfer- LO	290.324.963.447	562.701.214.040	-48,41%
3.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO			
3.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		562.701.214.040	-100,00%
3.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO			
3.4	Bantuan Keuangan - LO	290.324.963.447		100,00%
4	Pendapatan BLU -LO	1.823.886.395.073	1.510.555.588.735	20,74%
4.1	Pendapatan Jasa BLU - LO	1.699.722.684.271	1.353.370.749.030	25,59%
4.2	Pendapatan Hibah BLU - LO	9.627.476.508	8.642.497.799	11,40%
4.3	Pendapatan Lainnya BLU - LO	114.536.234.294	148.542.341.906	-22,89%
5	Pendapatan Hibah-LO	388.816.848.535	1.405.116.547.881	-72,33%
5.1	Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO	388.816.848.535	1.405.116.547.881	-72,33%
6	Pendapatan lainnya-LO	31.410.925.358.449	32.515.661.600.539	5,60%
6.1	Pendapatan Penyesuaian Akrual	100.832.982.491	3.330.088.254	2927,94%
6.2	Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	31.310.092.375.958	32.512.331.512.285	5,30%
A.2	BEBAN OPERASIONAL	56.497.672.892.247	53.497.039.131.048	11,08%
1	Beban Pegawai	18.001.385.520.108	17.970.454.684.091	0,17%
2	Beban Persediaan	982.479.894.141	701.218.277.163	40,11%
3	Beban Barang dan Jasa	17.716.114.541.429	15.736.758.656.835	12,58%
4	Beban Bunga	54.272.825.884	74.662.470.165	-27,31%
5	Beban Subsidi	15.920.009.714	7.753.180.987	105,34%
6	Beban Hibah	1.735.049.223.148	1.166.696.190.670	48,71%
7	Beban Bantuan Sosial	61.307.740.000	66.238.775.396	-7,44%
8	Beban Lain-lain	162.807.920	123.103.632.285	-99,87%
9	Beban Akrual Lainnya	11.591.298.900.155	11.902.670.001.859	-2,62%
10	Beban Transfer	6.339.681.429.748	5.747.483.261.597	61,20%
A.3	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	5.872.937.989.977	8.894.472.166.533	-33,97%
B	KEGIATAN NON OPERASIONAL			
B.1	Surplus (Defisist) Pempus Selisih Kurs Belum Terealisa	15.767.738	64.677.564	-75,62%

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
B.1	Surplus/(Defisit) Penpus Pelepasan Aset Non Lancar	(61.663.973.215)	(68.309.875.497)	-9,73%
B.2	Surplus/(Defisit) Penpus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
B.3	Surplus/(Defisit) Penpus Kegiatan Non Operasional Lainnya	(9.638.098.759)	69.721.778.708	-113,82%
B.4	Surplus/(Defisit) Pemda Penjualan Aset Non Lancar	(17.364.168.634)	(72.191.968.243)	-75,95%
B.5	Surplus (Defisit) Pemda Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(73.189.844)	(1.950.494.984)	-96,25%
B.6	Surplus (Defisit) Pemda Kegiatan Non Operasional Lainnya	(10.201.774.249)	126.160.608.367	-108,09%
B.7	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	(98.925.436.963)	53.494.725.914	-284,93%
C	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		8.947.966.892.447	-100,00%
	POS LUAR BIASA	(102.358.000)	(15.181.377.926)	-99,33%
D	SURPLUS/(DEFISIT) LO	5.773.910.195.014	8.932.785.514.521	-35,36%

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	KEGIATAN OPERASIONAL			
A.1	PENDAPATAN OPERASIONAL	52.976.349.356.904	45.769.378.008.537	15,75%
1	PENDAPATAN PERPAJAKAN	18.785.311.882.696	45.769.378.008.537	-58,96%
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	8.255.573.368.861	6.217.450.984.115	32,78%
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	7.824.843.298.515	5.417.227.537.019	44,44%
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	2.198.146.799.008	1.389.524.085.869	58,19%
1.4	Pendapatan Cukai	784.289.000	40.000.000	1860,72%
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	199.731.449.106	217.053.707.625	-7,98%
1.6	Pendapatan Bea Masuk	173.807.467.832	119.787.551.830	45,10%
1.7	Pendapatan Bea Keluar	132.317.117.000	302.311.694.000	-56,23%
1.8	Pendapatan Pajak Lain-lain	108.093.374	158.622.125	-31,85%
2	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	2.871.303.652.856	2.414.119.695.833	18,94%
2.1	Pendapatan BLU	1.823.886.395.073	1.645.604.687.629	10,83%
2.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.047.417.257.783	768.515.008.204	36,29%
3	PENDAPATAN HIBAH	9.641.445.394	-	
4	PENDAPATAN PENYESUAIAN	31.310.092.375.958	29.691.704.130.121	5,45%
4.1	Pendapatan Dropping Dana Tranfer	31.310.092.375.958	29.691.704.130.121	5,45%
A.2	BEBAN OPERASIONAL	48.698.062.099.633	45.632.840.152.623	6,72%
1	Beban Pegawai	5.774.911.902.328	5.476.454.050.555	5,45%
2	Beban Persediaan	982.473.874.141	1.091.222.487.894	-9,97%
3	Beban Barang dan Jasa	3.219.410.606.190	2.385.426.964.680	34,96%
4	Beban Pemeliharaan	653.256.577.737	596.319.615.285	9,55%
5	Beban Perjalanan Dinas	587.795.156.826	346.762.077.688	69,51%
6	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.005.892.479.371	787.577.907.330	27,72%
7	Beban Bantuan Sosial	25.830.846.000	17.796.395.096	45,15%
8	Beban Lain-lain			
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.892.081.268.642	5.098.001.497.271	-4,04%
10	Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih	246.317.012.440	141.575.026.703	73,98%
11	Beban Transfer	31.310.092.375.958	29.691.704.130.121	5,45%
A.3	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	4.278.287.257.271	136.537.855.914	3033,41%
B	KEGIATAN NON OPERASIONAL			
B.1	SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	(61.663.973.215)	(32.313.247.117)	90,83%
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	11.151.445.206	7.316.477.730	52,42%
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	72.815.418.421	39.629.724.847	83,74%

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
B.2	SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
B.3	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	(9.622.331.021)	16.680.887.127	-157,68%
1	Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya	55.842.842.804	25.687.951.096	117,39%
2	Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya	65.465.173.825	9.007.063.969	626,82%
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(71.286.304.236)	(15.632.359.990)	356,02%
C	SURPLUS/(DEFISIT) LO	4.207.000.953.035	120.905.495.924	3379,58%

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A	KEGIATAN OPERASIONAL			
A.1	PENDAPATAN	37.239.294.783.117	39.095.964.689.521	-4,75%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.732.422.486.041	8.573.085.069.658	1,86%
1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	6.537.804.042.394	6.557.604.126.025	-0,30%
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	112.812.978.454	118.201.652.019	-4,56%
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	450.740.867.279	355.631.571.511	26,74%
1.4	Lain-lain PAD yang sah-LO	1.631.064.597.913	1.541.647.720.103	5,80%
2	PENDAPATAN TRANSFER	27.880.521.838.908	28.638.406.521.792	-2,65%
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	27.369.864.844.371	27.787.519.054.752	-1,50%
2.1.1	Bagi Hasil Pajak	3.571.043.921.140	3.981.588.793.979	-10,31%
2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.052.681.934.233	7.584.327.872.969	-7,01%
2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	11.842.874.891.543	11.528.257.198.915	2,73%
2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	4.903.264.097.455	4.693.345.188.889	4,47%
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	221.063.979.000	850.887.467.040	-74,02%
2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO			
2.4	Bantuan Keuangan			
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	626.350.458.168	1.884.473.098.071	-66,76%
3.1	Pendapatan Hibah	379.175.403.141	1.405.116.547.881	-73,01%
3.2	Pendapatan Lainnya	247.175.055.027	479.356.550.190	-48,44%
A.2	BEBAN	35.644.644.050.411	33.205.230.811.718	7,35%
1	BEBAN OPERASI	32.770.021.738.823	31.088.445.871.270	5,41%
1.1	Beban Pegawai	12.226.473.617.780	12.232.340.759.256	-0,05%
1.2	Beban Barang dan Jasa	12.249.765.741.305	10.782.340.713.083	13,61%
1.3	Beban Bunga	54.272.825.884	74.662.470.165	-27,31%
1.4	Beban Subsidi	15.920.009.714	7.753.180.987	105,34%
1.5	Beban Hibah	1.735.049.223.148	1.166.696.190.669	48,71%
1.6	Beban Bantuan Sosial	35.476.894.000	42.170.412.683	-15,87%
1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.437.629.904.823	6.452.591.885.445	-0,23%
1.8	Beban Penyisihan Piutang	15.270.714.250	206.554.146.697	-92,61%
1.9	Beban Lain-lain	162.807.920	123.336.112.285	-99,87%
2	BEBAN TRANSFER	2.874.622.311.588	2.116.784.940.448	35,80%
2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	201.005.085.175	167.967.073.201	19,67%
2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.153.087.474	834.230.001	158,09%
2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah ke Pemda Lainnya	1.965.383.273.729	1.000.000.000	196438,33%
2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	706.080.865.210	1.946.983.637.246	-63,73%
2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			

NO	URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	%
A.3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	1.594.650.732.706	5.890.733.877.803	-72,93%
B	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(27.639.132.727)	52.018.145.139	-153,13%
B.1	SURPLUS NON OPERASIONAL	8.544.702	166.750.078.923	-99,99%
1	Surplus penjualan aset non lancar		1.868.771.530	-100,00%
2	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang	5.471.656	1.807.658.014	-99,70%
3	Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	3.073.046	163.073.649.379	-100,00%
B.2	DEFISIT NON OPERASIONAL	27.647.677.429	114.731.933.784	-75,90%
1	Defisit penjualan aset non lancar	17.364.168.634	74.060.739.773	-76,55%
2	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	78.661.500	3.758.152.998	-97,91%
3	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	10.204.847.295	36.913.041.013	-72,35%
C	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	1.567.011.599.978	5.942.752.022.942	-73,63%
D	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(102.358.000)	(15.181.377.926)	-99,33%
D.1	PENDAPATAN LUAR BIASA			
D.2	BEBAN LUAR BIASA	102.358.000	15.181.377.926	-99,33%
E	SURPLUS/DEFISIT-LO	1.566.909.241.978	5.927.570.645.016	-73,57%



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

LKPK & LSKP TAHUN 2023 *UNAUDITED*
Kanwil DJPb Sumsel



**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	JUMLAH		
		31 DES 2023	31 DES 2022	
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :				
A1	Pendapatan	79.705.483.466.703	73.926.126.540.820	7,82%
A11	Pajak	23.308.337.178.937	22.364.835.354.160	4,22%
A12	Kontribusi Sosial			
A13	Hibah	131.281.651.456	672.644.176.475	-80,48%
A14	Pendapatan Lainnya	56.265.864.636.310	50.888.647.010.184	10,57%
A2	Beban	45.471.667.889.889	41.400.084.523.122	9,83%
A21	Kompensasi Pegawai	17.973.707.710.840	17.960.246.223.538	0,07%
A22	Penggunaan Barang dan Jasa ¹⁾	16.473.359.050.047	15.061.991.046.759	9,37%
A23	Konsumsi Aset Tetap			
A24	Bunga	54.788.194.668	75.241.908.379	-27,18%
A25	Subsidi	15.920.009.714	7.753.180.987	105,34%
A26	Hibah	8.415.642.267.876	6.657.205.967.529	26,41%
A27	Manfaat Sosial	60.726.782.000	62.382.800.683	-2,65%
A28	Beban Lainnya	2.477.523.874.745	1.575.263.395.247	57,28%
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	34.233.815.576.813	32.526.042.017.698	5,25%
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	34.233.815.576.813	32.526.042.017.698	5,25%
Transaksi Aset Non Keuangan :				
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	14.635.939.272.378	12.962.597.454.029	12,91%
A311	Aset Tetap	14.587.598.625.163	12.843.251.113.666	13,58%
A312	Perubahan Persediaan			
A313	Barang Berharga			
A314	Aset Non Produksi	48.340.647.215	119.346.340.363	-59,50%
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	19.597.876.304.436	19.563.444.563.667	0,18%
Transaksi Aset Keuangan Dan Kewajiban (Pembiayaan) :				
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	18.916.992.244.595	19.474.032.706.021	-2,86%
A321	Dalam Negeri	18.916.992.244.595	19.474.032.706.021	-2,86%
A322	Luar Negeri			
A323	Monetary gold and SDRs			
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(680.884.059.841)	(89.411.857.646)	661,51%
A331	Dalam Negeri	(680.884.059.841)	(89.411.857.646)	661,51%
A332	Luar Negeri			

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	JUMLAH		%
		31 DES 2023	31 DES 2022	
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :				
A1	Pendapatan	70.829.969.574.873	64.724.370.821.441	9,43%
A11	Pajak	16.804.043.805.317	15.879.067.435.456	5,83%
A12	Kontribusi Sosial			
A13	Hibah	2.296.377.402		100,00%
A14	Pendapatan Lainnya	54.023.629.392.154	48.845.303.385.985	10,60%
A2	Beban	45.960.043.945.371	43.059.651.966.823	6,74%
A21	Kompensasi Pegawai	5.738.200.102.622	5.737.016.003.414	0,02%
A22	Penggunaan Barang dan Jasa ¹⁾	4.964.049.804.160	4.225.061.162.787	17,49%
A23	Konsumsi Aset Tetap			
A24	Bunga			
A25	Subsidi			
A26	Hibah	34.235.528.485.958	32.512.331.512.285	5,30%
A27	Manfaat Sosial	25.249.888.000	20.212.388.000	24,92%
A28	Beban Lainnya	997.015.664.631	565.030.900.337	76,45%
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	24.869.925.629.502	21.664.718.854.618	14,79%
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	24.869.925.629.502	21.664.718.854.618	14,79%
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN :				
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	4.593.191.056.097	3.363.452.276.369	36,56%
A311	Aset Tetap	4.579.399.285.408	3.298.433.223.234	38,84%
A312	Perubahan Persediaan			
A313	Barang Berharga			
A314	Aset Non Produksi	13.791.770.689	65.019.053.135	-78,79%
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	20.276.734.573.405	18.301.266.578.249	10,79%
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) :				
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	20.276.734.573.405	18.301.266.578.249	10,79%
A321	Dalam Negeri	20.276.734.573.405	18.301.266.578.249	10,79%
A322	Luar Negeri			
A323	Monetary gold and SDRs			
A33	Keterjadian Kewajiban Neto			
A331	Dalam Negeri			
A332	Luar Negeri			

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	JUMLAH		%
		31 DES 2023	31 DES 2022	
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :				
A1	Pendapatan	42.500.637.821.261	42.943.402.241.111	-1,03%
A11	Pajak	6.504.293.373.620	6.485.767.918.704	0,29%
A12	Kontribusi Sosial			
A13	Hibah	33.410.950.733.793	33.969.443.539.503	-1,64%
A14	Pendapatan Lainnya	2.585.393.713.848	2.488.190.782.903	3,91%
A2	Beban	33.136.747.873.950	32.082.079.078.031	3,29%
A21	Kompensasi Pegawai	12.235.507.608.218	12.223.230.220.124	0,10%
A22	Penggunaan Barang dan Jasa ¹⁾	11.509.309.245.887	10.836.929.883.972	6,20%
A23	Konsumsi Aset Tetap			
A24	Bunga	54.788.194.668	75.241.908.379	-27,18%
A25	Subsidi	15.920.009.714	7.753.180.987	105,34%
A26	Hibah	7.805.237.711.349	7.886.520.976.976	-1,03%
A27	Manfaat Sosial	35.476.894.000	42.170.412.683	-15,87%
A28	Beban Lainnya	1.480.508.210.114	1.010.232.494.910	46,55%
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	9.363.889.947.312	10.861.323.163.080	-13,79%
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	9.363.889.947.312	10.861.323.163.080	-13,79%
Transaksi Aset Non Keuangan :				
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	10.042.748.216.281	9.599.145.177.660	4,62%
A311	Aset Tetap	10.008.199.339.755	9.544.817.890.432	4,85%
A312	Perubahan Persediaan			
A313	Barang Berharga			
A314	Aset Non Produksi	34.548.876.526	54.327.287.228	-36,41%
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	(678.858.268.969)	1.262.177.985.418	-153,78%
Transaksi Aset Keuangan Dan Kewajiban (Pembiayaan) :				
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	(1.359.742.328.810)	1.172.766.127.772	-215,94%
A321	Dalam Negeri	(1.359.742.328.810)	1.172.766.127.772	-215,94%
A322	Luar Negeri			
A323	Monetary gold and SDRs			
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(680.884.059.841)	(89.411.857.646)	661,51%
A331	Dalam Negeri	(680.884.059.841)	(89.411.857.646)	661,51%
A332	Luar Negeri			-1,03%

**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	31 DES 2023	31 DES 2022	%
6	KEKAYAAN BERSIH	322.964.618.476.097	317.059.825.189.086	1,86%
61	Aset Non Keuangan	305.471.518.691.073	299.450.490.396.422	2,01%
611	Aset Tetap	143.289.570.974.685	138.184.879.666.960	3,69%
6111	Gedung dan Bangunan	125.355.366.062.114	121.034.636.717.950	3,57%
6112	Peralatan dan Mesin	8.045.760.800.564	7.852.480.940.199	2,46%
6113	Aset Tetap Lainnya	9.886.201.566.442	9.297.762.008.810	6,33%
612	Persediaan	3.185.049.267.501	3.074.695.156.709	3,59%
614	Aset Nonproduksi	158.996.898.448.888	158.190.915.572.753	0,51%
6141	Tanah	158.966.583.537.975	158.187.573.516.999	0,49%
6144	Aset Tak Berwujud	30.314.910.913	3.342.055.754	807,07%
62	Aset Keuangan	22.478.819.219.802	21.615.034.329.520	4,00%
6202	Uang dan Deposito	4.553.064.137.895	4.863.516.120.029	-6,38%
6203	Surat Berharga Selain Saham	343.273.807.338	404.145.100.361	-15,06%
6204	Pinjaman		3.828.706.977	-100,00%
6205	Saham dan Ekuitas Lain	11.054.173.868.707	10.960.590.465.646	0,85%
6208	Piutang Lainnya	6.528.307.405.861	5.382.953.936.507	21,28%
621	Aset Keuangan Domestik	22.478.819.219.802	21.615.034.329.520	4,00%
6212	Uang dan Deposito	4.553.064.137.895	4.863.516.120.029	-6,38%
6213	Surat Berharga Selain Saham	343.273.807.338	404.145.100.361	-15,06%
6214	Pinjaman		3.828.706.977	-100,00%
6215	Saham dan Ekuitas Lain	11.054.173.868.707	10.960.590.465.646	0,85%
6218	Piutang Lainnya	6.528.307.405.861	5.382.953.936.507	21,28%
622	Aset Keuangan Luar Negeri			
6222	Uang dan Deposito			
6223	Surat Berharga Selain Saham			
6224	Pinjaman			
6225	Saham dan Ekuitas Lain			
6228	Piutang Lainnya			
63	Kewajiban	4.985.719.434.778	4.005.699.536.855	24,47%
6303	Surat Berharga Utang			
6304	Pinjaman	728.596.530.283	1.271.795.303.139	-42,71%
6308	Utang Lainnya	4.257.122.904.495	2.733.904.233.717	55,72%
631	Kewajiban Domestik	4.985.719.434.778	4.005.699.536.855	24,47%
6313	Surat berharga selain saham			
6314	Pinjaman	728.596.530.283	1.271.795.303.139	-42,71%

6318	Utang Lainnya	4.257.122.904.495	2.733.904.233.717	55,72%
632	Kewajiban Luar Negeri			
6323	Surat berharga selain saham			
6324	Pinjaman			
6328	Utang Lainnya			

**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	31 DES 2023	31 DES 2022	%
6	KEKAYAAN BERSIH	205.418.426.022.896	203.146.046.017.097	1,12%
61	Aset Non Keuangan	203.144.126.025.315	201.277.946.003.123	0,93%
611	Aset Tetap	67.161.564.991.589	66.181.255.076.123	1,48%
6111	Gedung dan Bangunan	62.488.942.396.166	61.636.653.685.230	1,38%
6112	Peralatan dan Mesin	3.468.538.964.950	3.568.053.974.702	-2,79%
6113	Aset Tetap Lainnya	1.204.083.630.473	976.547.416.191	23,30%
612	Persediaan	2.326.484.930.177	2.202.241.968.792	5,64%
614	Aset Nonproduksi	133.656.076.103.549	132.894.448.958.208	0,57%
6141	Tanah	133.625.761.192.636	132.891.106.902.454	0,55%
6144	Aset Tak Berwujud	30.314.910.913	3.342.055.754	807,07%
62	Aset Keuangan	4.714.084.026.512	3.189.511.351.457	47,80%
6202	Uang dan Deposito	2.113.307.659.371	1.173.272.329.600	80,12%
6203	Surat Berharga Selain Saham	305.900.000.000	370.600.000.000	-17,46%
6204	Pinjaman			
6205	Saham dan Ekuitas Lain			
6208	Piutang Lainnya	2.294.876.367.141	1.645.639.021.857	39,45%
621	Aset Keuangan Domestik	4.714.084.026.512	3.189.511.351.457	47,80%
6212	Uang dan Deposito	2.113.307.659.371	1.173.272.329.600	80,12%
6213	Surat Berharga Selain Saham	305.900.000.000	370.600.000.000	-17,46%
6214	Pinjaman			
6215	Saham dan Ekuitas Lain			
6218	Piutang Lainnya	2.294.876.367.141	1.645.639.021.857	39,45%
63	Kewajiban	2.439.784.028.931	1.321.411.337.484	84,63%
6303	Surat Berharga Utang			
6304	Pinjaman			
6308	Utang Lainnya	2.439.784.028.931	1.321.411.337.484	84,63%
631	Kewajiban Domestik	2.439.784.028.931	1.321.411.337.484	84,63%
6313	Surat berharga selain saham			
6314	Pinjaman			
6318	Utang Lainnya	2.439.784.028.931	1.321.411.337.484	84,63%
632	Kewajiban Luar Negeri			
6323	Surat berharga selain saham			
6324	Pinjaman			
6328	Utang Lainnya			

NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	31 DES 2023	31 DES 2022	%
6	KEKAYAAN BERSIH	117.546.192.453.201	113.913.779.171.990	3,19%
61	Aset Non Keuangan	102.327.392.665.758	98.172.544.393.299	4,23%
611	Aset Tetap	76.128.005.983.096	72.003.624.590.837	5,73%
6111	Gedung dan Bangunan	62.866.423.665.948	59.397.983.032.721	5,84%
6112	Peralatan dan Mesin	4.577.221.835.614	4.284.426.965.497	6,83%
6113	Aset Tetap Lainnya	8.682.117.935.969	8.321.214.592.619	4,34%
612	Persediaan	858.564.337.324	872.453.187.918	-1,59%
614	Aset Nonproduksi	25.340.822.345.339	25.296.466.614.545	0,18%
6141	Tanah	25.340.822.345.339	25.296.466.614.545	0,18%
6144	Aset Tak Berwujud			
62	Aset Keuangan	18.215.048.054.573	18.875.835.839.345	-3,50%
6202	Uang dan Deposito	2.439.756.478.524	3.690.243.790.428	-33,89%
6203	Surat Berharga Selain Saham	37.373.807.338	33.545.100.361	11,41%
6204	Pinjaman		3.828.706.977	-100,00%
6205	Saham dan Ekuitas Lain	11.054.173.868.708	10.960.590.465.646	0,85%
6208	Piutang Lainnya	4.683.743.900.003	4.187.627.775.933	11,85%
621	Aset Keuangan Domestik	18.215.048.054.573	18.875.835.839.345	-3,50%
6212	Uang dan Deposito	2.439.756.478.524	3.690.243.790.428	-33,89%
6213	Surat Berharga Selain Saham	37.373.807.338	33.545.100.361	11,41%
6214	Pinjaman		3.828.706.977	-100,00%
6215	Saham dan Ekuitas Lain	11.054.173.868.708	10.960.590.465.646	0,85%
6218	Piutang Lainnya	4.683.743.900.003	4.187.627.775.933	11,85%
63	Kewajiban	2.996.248.267.130	3.134.601.060.654	-4,41%
6303	Surat Berharga Utang			
6304	Pinjaman	728.596.530.282	1.271.795.303.138	-42,71%
6308	Utang Lainnya	2.267.651.736.847	1.862.805.757.516	21,73%
631	Kewajiban Domestik	2.996.248.267.130	3.134.601.060.654	-4,41%
6313	Surat berharga selain saham			
6314	Pinjaman	728.596.530.282	1.271.795.303.138	-42,71%
6318	Utang Lainnya	2.267.651.736.847	1.862.805.757.516	21,73%
632	Kewajiban Luar Negeri			
6323	Surat berharga selain saham			
6324	Pinjaman			
6328	Utang Lainnya			

**LAPORAN SUMBER DANA PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	31 DES 2023
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
C1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	88.072.191.651.151
C11	Pajak	48.007.084.693.623
C12	Kontribusi Sosial	
C13	Hibah	128.985.274.054
C14	Penerimaan Lainnya	39.936.121.683.474
C2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	22.964.380.466.699
C21	Kompensasi Pegawai	17.973.707.710.840
C22	Pembelian Barang dan Jasa	
C23	Bunga	54.788.194.668
C24	Subsidi	15.920.009.714
C25	Hibah	2.381.713.894.732
C26	Manfaat Sosia	60.726.782.000
C27	Pembayaran Lainnya	2.477.523.874.745
CIO	Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (C1-C2)	65.107.811.184.452
	ARUS KAS DARI INVESTASI NON KEUANGAN	
C31A	Pembelian Aset Non Keuangan	16.083.530.708.543
C311A	Aset Tetap	16.035.190.061.328
C312A	Persediaan untuk Tujuan Strategis	
C313A	Barang Berharga	
C314A	Aset Non Produksi	48.340.647.215
C31B	Penjualan Aset Non Keuangan	28.632.795.909
C311B	Aset Tetap	28.632.795.909
C311B	Persediaan untuk Tujuan Strategis	
C311B	Barang Berharga	
C311B	Aset Non Produksi	
C31	Arus Kas Neto dari Investasi Non Keuangan	16.054.897.912.635
CSD	Surplus/Defisit Kas	81.162.709.097.086
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	
C32X	Akuisisi Aset Keuangan Neto selain Kas	115.142.792.461
C321X	Domestik	115.142.792.461
C322X	Luar Negeri	
C33	Keterjadian Kewajiban Neto	(680.884.059.841)
C331	Domestik	(680.884.059.841)
C332	Luar Negeri	
NFB	Arus Kas Neto dari Aktivitas Pembiayaan (-C32X+C33)	(565.741.267.380)

NCB	Perubahan Bersih Dalam Persediaan Uang Tunai (CSD-C32X+C33)	80.596.967.829.707



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAP. ARUS KAS

LKPK & LSKP TAHUN 2023 *UNAUDITED*
Kanwil DJPb Sumsel



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 31 DESEMBER 2023

URAIAN	JUMLAH'
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Pendapatan Perpajakan	
a. Pajak Penghasilan	8.024.408.803.711,00
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	7.188.902.266.250,00
c. Pajak Bumi dan Bangunan	1.136.697.246.131,00
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-
e. Cukai	806.689.000,00
f. Pajak Lainnya	157.118.316.013,00
g. Pajak daerah	6.504.293.373.619,96
h. Pajak Perdagangan Internasional	296.995.476.332,00
Total Pendapatan Perpajakan	23.309.222.171.056,90
2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara/Daerah Dipisahkan	452.312.073.908,53
c. Pendapatan Retribusi Daerah	112.477.411.819,17
d. Pendapatan PNBP Lainnya	3.358.983.118.810,60
e. Pendapatan Badan Layanan Umum	1.784.919.062.559,00
Total Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	5.708.691.667.097,30
3. Pendapatan Hibah	140.664.532.577,00
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)	29.158.578.370.731,20
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Pegawai	17.433.827.632.854,70
2. Belanja Barang	-
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	54.788.194.668,00
4. Belanja Subsidi	15.920.009.714,00
5. Belanja hibah	-
6. Belanja Bantuan Sosial	60.726.782.000,00
7. Belanja Lain-lain	5.924.002.538,00
8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	722.215.120.408,50
9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.433.592.491.336,50
10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	
11. Dana Alokasi Umum	220.995.160.475,06
12. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)	
13. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	29.076.310.500,00
14. Transfer Lainnya	731.825.266.418,00
13. Dana Desa	27.465.275.200,00
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)	14.975.138.253.445,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)	14.183.440.117.286,10
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	11.151.445.206,00
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)	11.151.445.206,00
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Modal	14.603.933.699.117,10
5. Penyertaan Modal Negara	115.142.792.461,00
8. Pembentukan Dana Cadangan Pemda	30.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)	14.749.076.491.578,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)	-
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
I. Arus Kas Masuk	
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	33.927.750.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)	33.927.750.000,00
II. Arus Kas Keluar	
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	714.811.809.841,00

Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)	714.811.809.841,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)	- 680.884.059.841,00
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	
2. Transito (Netto)	451.206.071.698,00
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (D)	451.206.071.698,00
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	14.190.975.336.216,10
Penyesuaian Pembukuan	30.699.248.043,00
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	14.221.674.584.259,10
SALDO AWAL KAS	749.469.767.686,00
SALDO AKHIR KAS	14.971.144.351.945,10
Kas di Bendahara Pengeluaran	525.975.970,00
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	
Kas Lainnya dan Setara Kas (Total)	
Kas Lainnya dan Setara Kas yg Sudah Disahkan	
Kas BLU yg Belum Disahkan/Lainnya	
Kas pada BLU dan Investasi Jangka Panjang BLU (Total)	749.469.767.686,00
Kas BLU yg Sudah Disahkan	- 749.469.767.686,00
Kas Transito (Kiriman Uang)	
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	14.971.670.327.915,10

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Unaudited) DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Penerimaan Perpajakan	
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	8.024.408.803.711
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	7.188.902.266.250
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	1.136.697.246.131
e. Pendapatan Cukai	806.689.000
f. Pendapatan Pajak Lainnya	157.118.316.013
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	296.995.476.332
Total Penerimaan Perpajakan	16.804.928.797.437
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
c. Pendapatan PNBPN Lainnya	1.675.735.268.203
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	1.784.919.062.559
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.460.654.330.762
3. Penerimaan Hibah	
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)	20.265.583.128.199
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Pegawai	5.198.320.024.637
2. Belanja Barang	6.500.945.546.776
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	
4. Belanja Subsidi	
5. Belanja hibah	
6. Belanja Bantuan Sosial	25.249.888.000
7. Belanja Lain-lain	
8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	4.226.850.173.000
9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	9.314.001.020.900
10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	136.634.795
11. Dana Alokasi Umum	12.240.006.671.000
12. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)	1.512.259.719.656
13. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	250.140.289.500
14. Transfer Lainnya	4.122.829.644.217
15. Dana Desa	2.569.304.332.890
16. Hibah Kepada Daerah	
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)	45.960.043.945.371
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)	(25.694.460.817.172)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	11.151.445.206
2. Penerimaan Kembali Investasi	
3. Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
4. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	
5. Penerimaan Investasi Pemerintah	
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)	11.151.445.206
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Modal	4.604.342.501.303
2. Pengeluaran Program Restrukturisasi	
3. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	
4. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	
5. Penyertaan Modal Negara	
6. Pengeluaran Dukungan Infrastruktur	
7. Pengeluaran Investasi Pemerintah	
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)	4.604.342.501.303
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)	(4.593.191.056.097)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
I. Arus Kas Masuk	
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	
3. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	
4. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	
5. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	
6. Penerimaan Pembiayaan Lain	
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)	

II. Arus Kas Keluar	
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	
3. Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	
4. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement	
5. Pengeluaran Pembiayaan Lain	
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)	
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	
2. Transito (Netto)	451.206.071.698
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (D)	451.206.071.698
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	(29.836.445.801.571)
Penggunaan SAL	
Penyesuaian Pembukuan	(34.204.829.237.915)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	(64.041.275.039.486)
SALDO AWAL KAS	749.469.767.686
SALDO AKHIR KAS	(63.291.805.271.800)
Kas Lainnya & Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	
Kas BLU yg Belum Disahkan/Lainnya	
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	
Kas Transito (Kiriman Uang)	
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	(63.291.805.271.800)

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Unaudited) DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Pajak Daerah	(6.504.293.373.620)
Penerimaan Retribusi Daerah	(112.477.411.819)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(452.312.073.909)
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	(1.689.201.767.697)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	(3.554.655.956.672)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	(6.884.984.792.038)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	(11.842.874.891.543)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	(4.903.264.097.455)
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	
Penerimaan Dana Penyesuaian	
Penerimaan Hibah	(140.664.532.577)
Penerimaan Dana Darurat	
Penerimaan Lainnya	(170.182.701.893)
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	
Jumlah Arus Masuk Kas	(36.254.911.599.221)
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pegawai	12.235.507.608.218
Pembayaran Barang	11.624.492.147.272
Pembayaran Bunga	54.788.194.668
Pembayaran Subsidi	15.920.009.714
Pembayaran Beban Hibah	1.637.671.392.172
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	35.476.894.000
Pembayaran Tak Terduga	5.924.002.538
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	49.884.269.285
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	4.576.262.474
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	4.576.262.474
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	
Jumlah Arus Keluar Kas	25.668.817.042.814
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(61.923.728.642.036)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Arus Masuk Kas	
Pencairan Dana Cadangan	
Penjualan atas Tanah	
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Penjualan Aset Tetap Lainnya	
Penjualan Aset Lainnya	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	

Jumlah Arus Masuk Kas	
Arus Keluar Kas	
Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
Perolehan Tanah	34.548.876.526
Perolehan Peralatan dan Mesin	1.574.367.057.055
Perolehan Gedung dan Bangunan	1.950.171.446.103
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.254.310.882.848
Perolehan Aset Tetap Lainnya	186.192.935.282
Perolehan Aset Lainnya	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	115.142.792.461
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Keluar Kas	10.144.733.990.275
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(10.144.733.990.275)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Masuk Kas	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	(33.927.750.000)
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Jumlah Arus Masuk Kas	(33.927.750.000)
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	97.863.655.410
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	616.948.154.431
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Jumlah Arus Keluar Kas	714.811.809.841
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(748.739.559.841)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Masuk Kas	
Arus Keluar Kas	
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	
Kenaikan/Penurunan Kas	(72.817.202.192.152)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	
Saldo Akhir Kas	(72.817.202.192.152)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAP. PERUBAHAN SAL

LKPK & LSKP TAHUN 2023 *UNAUDITED*
Kanwil DJPb Sumsel



**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Unaudited) DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
1. PERHITUNGAN CATATAN SAL	
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	749.995.743.656
B. Penyesuaian Awal Saldo Anggaran Lebih	
Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Penyesuaian	749.995.743.656
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL	749.995.743.656
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(38.183.405.098.647)
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1)	(37.433.409.354.991)
D. Penyesuaian SAL	
1. Penyesuaian Pembukuan	
2. Penyesuaian Lain-lain	37.433.409.354.991
Total Penyesuaian SAL (A.II)	37.433.409.354.991
Rincian Penyesuaian Pembukuan:	
Koreksi SILPA	
Selisih Kurs (Unrealized)	
Koreksi Kas BUN	
Koreksi Kas KPPN	
Koreksi Kas BLU	
Koreksi Kas Hibah	
Koreksi Utang PFK	
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	
Rincian Penyesuaian Catatan SAL/Lain-lain:	
Penyesuaian Transaksi RPL	
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow	
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL	
Pembulatan	37.433.409.354.991
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)	
2. PERHITUNGAN FISIK SAL	
SALDO AKHIR KAS BUN	
SALDO AKHIR KAS KPPN	
SALDO AKHIR KAS BLU	655.899.946.744
SALDO AKHIR KAS DI KL DARI HIBAH	548.603.668.417
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	656.462.268
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	
Saldo di Rek Escrow yang Memiliki Unsur SAL	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam bentuk Invoice	
Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	
Selisih Kiriman Uang	
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	
Pembiayaan diterima RKUN yang Ditangguhkan	
Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)	
Penyetoran Dana Hibah Langsung Yang Disahkan	
Pengembalian Escrow PNPB	
Transito BLU	
Dana Optimalisasi Kas	
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Unaudited) DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL	
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(30.287.651.873.269)
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1)	(30.287.651.873.269)
D. Penyesuaian SAL	
1. Penyesuaian Pembukuan	
2. Penyesuaian Lain-lain	
Total Penyesuaian SAL (A.II)	
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)	(30.287.651.873.269)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Unaudited) DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Sub Total	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	
Sub Total	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (BAS level 4)	
Lain-lain	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	